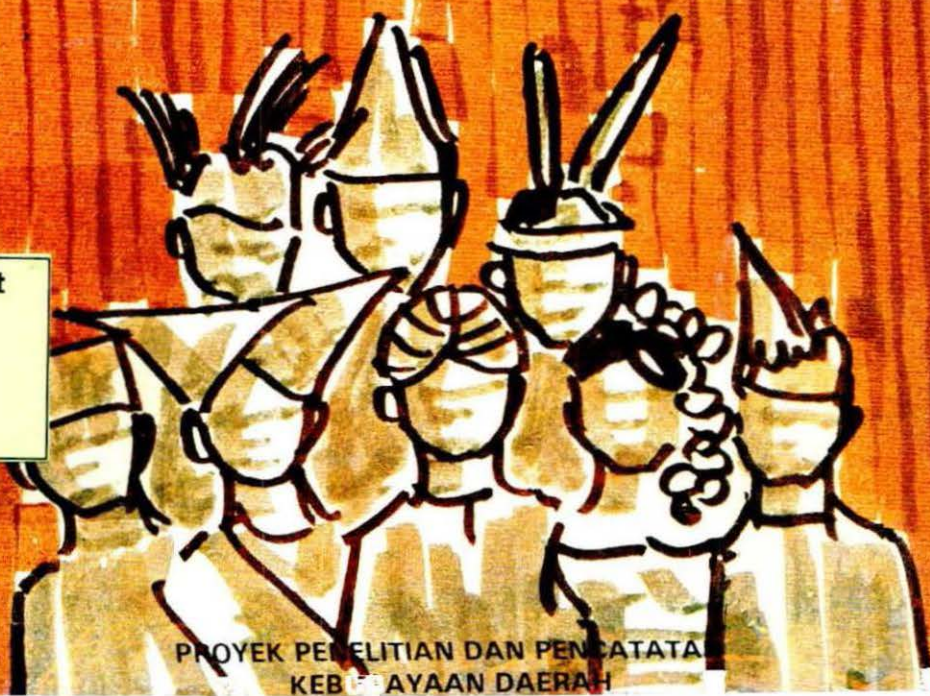


Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

rektorat
dayaan



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat

Editor:

1. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja
2. Sutrisno Kutoyo

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1978/1979

P E R S I S T A N A N	
Direktorat Perlindungan dan Pemeliharaan Peningkatan Keamanan dan Pertahanan	
NO. INDUK	2102 a Hadrah
T G L.	1 Maret 1984

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional."

Adapun sasaran proyek ini adalah:

Untuk menghasilkan lima buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
- Cerita Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini

masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseum dan Kepurbakalaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari:

- 1) Lalu Wacana
- 2) Abdul Wahab H. Ismail
- 3) Joko Sumpeno

6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:

- Konsultan/Anggota :
 1. Prof. Dr. Haryati Soebadio
 2. Abdurrahman Surjomihardjo
 3. A.B. Lopian
- Ketua : Sutrisno Kutoyo
- Sekretaris : M. Soenjata Kartadarmadja
- Anggota :
 1. Anhar Gonggong
 2. Mardanas Safwan
 3. Masjkuri
 4. Surachman
 5. Muchtaruddin Ibrahim
 6. Sri Sutjiatiningsih
 7. Frans Hitipeuw
- 7. Editor :
 1. M. Soenjata Kartadarmadja
 2. Sutrisno Kutoyo

8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP: 130117589

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	5
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. TUJUAN PENELITIAN	11
B. MASALAH	12
C. RUANG LINGKUP	13
D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN	14
E. HASIL AKHIR	15
BAB II. KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD IXX	17
A. PEMERINTAHAN	17
1. <i>Kerajaan Mataram</i>	18
2. <i>Kerajaan Sumbawa</i>	19
3. <i>Kerajaan Bima</i>	22
4. <i>Kerajaan Dompu</i>	23
5. <i>Kerajaan Sanggar</i>	23
B. SOSIAL - BUDAYA	24
1. <i>Pendidikan</i>	24
2. <i>Kesenian</i>	25
C. ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN	27
D. KEHIDUPAN EKONOMI	24
BAB III. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 - 1928	35
A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI DI DAERAH	35
B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI PROSES ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH	46
C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI	49
1. <i>Politik</i>	49
2. <i>Sosial</i>	49

3. <i>Wanita</i>	50
4. <i>Agama</i>	51
5. <i>Pendidikan</i>	54
6. <i>Kesenian</i>	55
7. <i>Kepemudaan dan kepanduan</i>	59
8. <i>Pers</i>	60
9. <i>Koperasi</i>	61
10. <i>Organisasi Profesional</i>	61
D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 – 1918) DAN PENDIRIAN VOLK- SRAAD	62
E. PERJUANGAN DI DAERAH	64
BAB IV. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942	71
A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN 1930	71
B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH	74
C. INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN ORGANI- SASI/PARTAI	75
D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUN- TUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG	77
E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JE- PANG	92
F. SIKAP JEPANG TERHADAP BANGSA INDONE- SIA	100
G. SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP JE- PANG	109
BAB V. PENUTUP	113
DAFTAR KATA DAN NAMA	129
DAFTAR NAMA INFORMAN	135
DAFTAR KEPUSTAKAAN	141
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangkaian kegiatan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 1978/1979 antara lain termasuk Penelitian dan Penulisan Sejarah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional.

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa daerah Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilalui begitu saja dalam hal peranannya dalam sejarah kebangsaan, mulai dari pra-sejarah sampai sekarang. Lalu-lintas perdagangan di daerah ini demikian ramainya pada masa-masa silam, sehingga tidak mengherankan jika kota-kota pelabuhan antara lain Ampenan, Labuhan Haji, Labuan Lombok, Alas, Sumbawa, Kempo, Sanggar, Bima, dan Sape tumbuh dengan ramainya, justru daerah ini merupakan daerah yang strategis sebagai tempat persinggahan dan mengisi air bagi pelayaran Nusantara.

Perlawanan bersenjata pada tahun 1894 oleh rakyat Lombok terhadap penjajah Belanda, pemberontakan Undru di Sumbawa Besar pada tahun 1906-1907, peristiwa pemberontakan Donggo tahun 1910, Ngali tahun 1908-1909, Dena tahun 1910 masing-masing berlangsung di Bima.

Demikian pula pemberontakan Gandor pada tahun 1898, Perang Pringgabaya I, Perang Pringgabaya II, Perlawanan Sesela, peristiwa Sori Utu pada tahun 1942 di Dompu, peristiwa Mamben 1944, peristiwa Lendang Marang, Labuhan Haji, Wanasaba tahun 1945, peristiwa Nggembe di Bima tahun 1945, penyerbuan Tangsi Militer Belanda di Selong tahun 1946 dan lain-lain, cukup memberi gambaran kepada kita bahwa daerah ini juga memberikan andil dalam mempertahankan negara dan bangsa pada masa-masa Kebangkitan Nasional.

Sebagaimana diketahui, bahwa daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Daerah ini merupakan salah satu bagian dari Propinsi Nusa Tenggara yang dahulu terkenal dengan Sunda Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RIS Tahun 1950, LN. RIS Nomor 59 Tahun 1950. Adapun bagian lainnya ialah Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan daerah ini bersama-sama dengan kedua Propinsi tersebut sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 LN Nomor 6 – 1957, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 1957 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Untuk jelasnya mengenai pembentukan daerah ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 64/1958, Tambahan LN Nomor 1949 yang disyahkan tanggal 11 Agustus 1958 dan diundangkan tanggal 14 Agustus 1958 pada hari Selasa, P.313/1958.
2. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat meliputi daerah Lombok, daerah Sumbawa sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari Staatblad 1946 Nomor 143 (Pasal 1 ayat 2a dan 2b Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958), terletak di tengah-tengah/diapit antara daerah Tingkat I Bali di sebelah barat dan daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di sebelah timur dengan ibukota pemerintahannya adalah Kota Mataram (Pasal 2-1, Undang-Undang Nomor 64/1958).
3. Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat meliputi enam buah Daerah Tingkat II yaitu: tiga buah di Pulau Lombok dan tiga buah di Pulau Sumbawa. Daerah-daerah Tingkat II ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 (LN. Nomor 122-1958, T.LN. Nomor 1655, disetujui DPR dalam rapat terbuka ke-86 tanggal 2 Juli 1958 pada hari Selasa, P.314/1958) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang disyahkan pada tanggal 9 Agustus 1958 dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Adapun ke-6 Daerah Tingkat II tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Lombok Barat menjadi Daerah Tingkat II Lombok Barat dengan ibukotanya Mataram.
- b. Wilayah Lombok Tengah menjadi Daerah Tingkat II Lombok Tengah dengan ibukotanya Praya.
- c. Wilayah Lombok Timur menjadi Daerah Tingkat II

Lombok Timur dengan ibukotanya Selong. 1 sampai dengan 3 dimaksud Bijblad 14377.

- d. Daerah Swapraja Bima menjadi Daerah Tingkat II Bima dengan ibukotanya Raba.
 - e. Daerah Swapraja Dompu menjadi Daerah Tingkat II Dompu dengan ibukotanya Dompu.
 - f. Daerah Swapraja Sumbawa menjadi Daerah Tingkat II Sumbawa dengan ibukotanya Sumbawa Besar. (Pasal 1-2 dan Pasal 2-1, angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 Undang-Undang Nomor 69, Tahun 1950).
4. Daerah-daerah Tingkat II ini dibentuk sebagai pelaksana dari pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan mengingat Pasal 89, 131, 132, dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat Panitia Negara dalam daerah-daerah Swatantra termasuk Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1956, serta memperhatikan suara-suara rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1978 Nomor 21-1978, Kota Mataram dijadikan Kota Administratif, yang meliputi wilayah Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara.

Mengenai keadaan sosial-budaya di daerah ini pada garis besarnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di mana pada masa penjajahan kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan sangat terbatas. Itulah sebabnya jumlah sekolah dan jenisnya terbatas pula di daerah Nusa Tenggara Barat. Sekolah-sekolah pada umumnya hanya di Kota Mataram, Praya, Selong, Sumbawa Besar, Dompu, dan Bima dan di tiap-tiap ibukota Kedistrikan (Bima: Kekenjelian, Sumbawa: Kedemungan). Sekolah-sekolah tersebut hanya terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Guru dua tahun, sedangkan Sekolah Swasta pada Zaman Kebangkitan Nasional hanya beberapa buah saja seperti Sekolah-sekolah Agama: *Al Irsyad*, *Al Ittihad*, *Darul Uhum*, *Ibtidaiyah*, dan Sekolah-sekolah Umum: *Schakelschool* di Mataram dan Selong, Sekolah Cina yang didirikan oleh *Chung Hwa Chung Hwi* di Ampenan, Labuhan Haji, Masbagik, Praya, Sumbawa Besar, dan Bima. Namun setelah kemerdekaan perkembangan dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat me-

nunjukkan angka perkembangan yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Penyebaran sekolah sampai ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga rakyat dapat menikmatinya. Pada awal tahun 1978 anak usia sekolah sudah tertampung 78%. Jumlah Sekolah Dasar seribu tujuh ratus lima puluh delapan buah, Sekolah Lanjutan Pertama empat puluh empat buah, Sekolah Lanjutan Atas dua puluh dua buah. Jumlah ini belum termasuk sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama maupun Departemen-departemen lainnya. Di daerah ini telah berdiri *Universitas Mataram* pada tahun 1962 yang memiliki Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Peternakan di samping IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (tahun 1965). Selain itu terdapat pula IKIP, Universitas NW, Perguruan Tinggi Keguruan, Fakultas Ilmu Dakwah Universitas Muhammadiyah yang diselenggarakan swasta.

Dari segi kebudayaan dapat dikemukakan bahwa daerah Nusa Tenggara Barat bukan suatu Daerah Kultural yang berasal dari masyarakat adat, tetapi daerah administratif yang di dalamnya tergabung berjenis-jenis kebudayaan, kesenian, peradaban, karakter, hukum adat, dan adat-istiadat dari berbagai suku bangsa yang berlainan. Itulah sebabnya kita tidak dapat mengatakan, bahwa kebudayaan yang ada sekarang di Nusa Tenggara Barat adalah kebudayaan Nusa Tenggara Barat sebab bukan merupakan kebulatan. Hal ini terlihat dari susunan penduduk di Nusa Tenggara Barat yang secara etnologis terdiri dari empat suku bangsa asli yaitu:

- a. Suku bangsa Sasak yang bertempat tinggal di Pulau Lombok;
- b. Suku bangsa Bali yang bertempat tinggal di Lombok Barat;
- c. Suku bangsa Sumbawa yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
- d. Suku bangsa Bima yang bertempat tinggal di Kabupaten Bima dan Dompu.

Sedangkan suku-suku bangsa lainnya merupakan bangsa pendatang seperti suku bangsa Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, dan sebagainya. Dan sebagai akibat suku-suku bangsa yang berlainan ini menggambarkan kebudayaan suku bangsa tersebut. Sebagai contoh kebudayaan daerah (lokal) dapat dikemukakan:

- a. Kebudayaan Sasak;
- b. Kebudayaan Bali;
- c. Kebudayaan Sumbawa;
- d. Kebudayaan Bima;
- e. Kebudayaan Pendatang.

Demikian pula bahasa-bahasa daerah terdiri dari:

- a. Bahasa Sasak
- b. Bahasa Bali
- c. Bahasa Sumbawa
- d. Bahasa Bima
- e. Bahasa pendatang.

Selain daripada itu dalam bidang keagamaan, di daerah ini hidup berdampingan agama Islam, Hindu Dharma, Budha, Nasrani, dan sebagian kecil agama Kong Fu Tse.

Sedang batas wilayah/letak daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Nusa Tenggara Barat terletak antara $115^{\circ}46'$ Bujur Timur dan $119^{\circ}10'$ Bujur Timur, $8^{\circ}5'$ Lintang Selatan, termasuk gugusan pulau-pulau Nusa Tenggara (Sunda Kecil dahulu).
- b. Luas wilayah Nusa Tenggara Barat 17.700 Km², Pulau Lombok 4.700 Km² dan Pulau Sumbawa 13.000 Km².
- c. Batas-batasnya di sebelah Utara Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur Selat Sape (Propinsi Nusa Tenggara Timur), di sebelah selatan Samudera Indonesia dan di sebelah barat Selat Lombok (Propinsi Bali).
- d. Tinggi beberapa kota dari permukaan laut:

1) Mataram	: 16 meter
2) P r a y a	: 101 meter
3) Selong	: 148 meter
4) Sumbawa Besar	: 20 meter
5) Dompu	: 50 meter
6) B i m a	: 13 meter

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan Sejarah Daerah Tematis Kebangkitan Nasional tidak lain adalah:

1. Untuk menghimpun, menggali dan mencatat segala peris-

tiwa-peristiwa sejarah daerah sebagai bahan penyusunan Sejarah Nasional.

2. Untuk mengumpulkan, mengolah dan mencari data-data Sejarah Daerah yang baru yang telah dan yang belum pernah diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan ataupun untuk pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan kebudayaan nasional.
3. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, bahwa daerah Nusa Tenggara Barat pada abad ke-19 tidak kalah pentingnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia ini dalam mengadakan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan terhadap kaum penjajah.
4. Untuk memperoleh gambaran dan data-data kepahlawanan di daerah ini guna bahan penelitian selanjutnya.

Selain daripada itu penyusunan materi Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu berusaha untuk menampilkan materi/sumber yang ada dan diperoleh di daerah Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian disadari, bahwa data-data sejarah yang diperoleh belum lengkap disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan tenaga sehingga untuk sementara dianggap sudah memadai.

B. MASALAH

Sebagaimana diketahui, bahwa Zaman Kebangkitan Nasional merupakan sebagian dari proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebab perjuangan dan perlawanan terhadap kaum penjajah bukan saja pada masa-masa ini, melainkan telah berlangsung jauh sebelum itu. Namun demikian proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan itu mencapai puncaknya pada zaman ini, sehingga perlawanan dan pergerakan tersebut antara daerah yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya sebab tujuan mereka merupakan satu kebulatan yaitu kemerdekaan.

Di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat terjadi pergerakan kemerdekaan, meskipun corak ragamnya antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kaum pergerakan di daerah ini (pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) menitik-beratkan perjuangan-

an mereka kepada usaha sosial, sedangkan kepada soal-soal yang bersifat politik mereka sangat berhati-hati dalam segala tindakannya. Organisasi massa/partai politik tidak dapat berkembang di daerah ini karena mendapat tekanan dari Pemerintah Belanda. Meskipun demikian anggota-anggota dari partai politik ini dengan diam-diam tersiar di daerah ini (*anggota tersiar*). Mereka mengingatkan diri dalam usaha sosial misalnya pada waktu kematian, perkawinan, selamatan, sunatan, dan sebagainya. Dan mereka inilah nantinya yang gigih menentang kaum penjajah.

Jadi jelaslah bahwa proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan di daerah Nusa Tenggara Barat meskipun ternyata pada awalnya berbeda-beda dengan daerah lain di Indonesia, namun tujuan pergerakan dan perlawanan perjuangan tersebut satu ialah mengusir penjajah dari persada Nusantara ini.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, maka Penulisan Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional ini ruang-lingkupnya dititik-beratkan kepada pembahasan materi yang benar-benar bersifat kedaerahan dan yang menjangkau ke-6 Kabupaten Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena itu dalam penulisan ini disusun sesuai dengan sistematika tersebut yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang tujuan penelitian, masalah, ruang-lingkup penelitian, **pertanggung-jawab ilmiah** prosedur penelitian dan hasil akhir.

Bab II : Keadaan di daerah pada akhir abad ke-19. Menguraikan tentang pemerintahan, sosial-budaya dan kehidupan ekonomi.

Bab III : Keadaan di daerah dari tahun ± 1900 – 1928.

Menguraikan tentang pengaruh politik Kolonial Belanda dan desentralisasi di daerah, kegiatan masyarakat yang relevan ataupun yang merupakan embrio dari proses Zaman Kebangkitan Nasional di daerah, interaksi di daerah dengan kegiatan partai/organisasi, keadaan di daerah sekitar Perang Dunia I (1914-1918) dan pendirian *Volksraad* dan perjuangan di daerah.

Bab IV : Keadaan di daerah dari tahun 1928-1942.

Menguraikan tentang pengaruh politik Pemerintah/Hindia Belanda pada kurang-lebih 1930, depresi ekonomi di daerah, interaksi terhadap kegiatan partai/organisasi, keadaan di daerah menjelang keruntuhan Pemerintah Hindia Belanda dan kedatangan pasukan pendudukan Jepang.

Bab V : Penutup.

Menguraikan tentang ringkasan atau rangkaian dari seluruh naskah, daftar kata, appendix, daftar sumber bacaan dan daftar informan.

D. PERTANGGUNG-JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian Sejarah Kebangkitan Nasional ini dilaksanakan oleh sebuah TIM yang dibentuk oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 22 Juli 1978 Nomor 412/C.II/Sp. (terlampir).

Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim mendapatkan pengarah/penjelasan, dari Proyek di Pusat dan juga dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Selain itu antara anggota Tim diadakan rapat/pertemuan dengan maksud untuk merencanakan tata-kerja pembagian tugas dan penulisan naskah beserta sistematikanya.

Adapun pengumpulan data dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ruang-lingkup dan masalah yang diteliti. Sedangkan metoda yang dipakai adalah metoda wawancara yang diawali dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan kedua metoda ini diperoleh bahan-bahan yang diperlukan, kemudian dianalisa, diolah dan dibahas sampai kepada penyusunan naskah. Oleh karena terbatasnya waktu dan terbatasnya data tulisan artikel maupun buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini serta tidak adanya pers daerah dan demikian pula terbatasnya pengetahuan/kemampuan Tim untuk menggali sumber-sumber sejarah, maka metoda wawancaralah yang banyak digunakan. Namun demikian diakui bahwa pengujian fakta belum dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga penulisan ini barulah merupakan taraf penam-

pilan peristiwa-peristiwa sejarah yang tentunya pada masa yang akan datang memerlukan penelitian lebih lanjut.

E. HASIL AKHIR

Naskah ini aslinya disusun oleh Tim Daerah Nusa Tenggara Barat dengan mendasarkan pola suatu kerangka yang dibuat oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat. Kemudian dalam suatu lokakarya naskah ini mengalami penyempurnaan dan pada akhirnya dilakukan editing. Dalam melakukan editing ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: materi atau bahan, cara penyajian dan pendekatan dan segi bahasa. Pada materi diadakan perbaikan, sesuai dengan permasalahannya. Sedangkan pada cara penyajian dan pendekatan, selain diperhatikan segi sistematika, juga diusahakan agar asas-reggiosentrisme sejauh mungkin didekati. Pada penulisan sejarah daerah sudah wajar ditempuh pendekatan serupa itu. Mengenai kebahasaan, dilakukan perbaikan terutama pada segi susunan kalimat pada ejaan.

Pada akhirnya naskah ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan *terms o reference* (cakupan tugas) yang dimaksud. Selanjutnya naskah ini dengan kelebihan dan kekurangannya, hendaknya dilihat sebagai hasil usaha perintisan.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19

A. PEMERINTAHAN

Pada masa itu Pulau Lombok dan Sumbawa terbagi dalam lima kerajaan, masing-masing Kerajaan Mataram di Pulau Lombok, Kerajaan Sumbawa, Kerajaan Dompu, Kerajaan Bima, dan Kerajaan Sanggar di Pulau Sumbawa. Kelimanya kecuali Bima, Sanggar, dan Dompu mempunyai susunan dan tata-pemerintahan tersendiri yang membedakan satu dengan yang lain.

Sebelum Belanda memerintah secara langsung kedua pulau itu merupakan sahabat gubernemen, yang mengakui kekuasaan Belanda di atas wilayahnya dan mengakui wilayah mereka adalah bagian Hindia Belanda. ¹⁾ Bagi Pemerintah Belanda jalinan persahabatan yang demikian itu hanyalah untuk mengelabui mata raja-raja akan maksud yang sebenarnya dari Gubernemen, untuk memperluas kontrol atas gerak-gerik raja-raja tersebut, sehingga Pemerintah Belanda dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa seluruh Nusantara adalah wilayah kekuasaan Belanda.

Demikian pada tahun 1882 berdasarkan Ind. Stbl. No. 123 Pemerintah Belanda mendirikan Keresidenan Bali dan Lombok dengan ibukota Buleleng.²⁾ Walaupun raja-raja di Bali dan Lombok keberatan atas tindakan itu, terutama bagi raja Mataram merasakan tindakan Pemerintah Belanda yang demikian itu bertentangan dengan isi perjanjian persahabatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 1843. Tetapi Pemerintah Belanda tidak pernah menghiraukan protes dari raja Mataram bahkan tindakannya sering melewati batas yang merobek-robek isi perjanjian yang telah mereka tandatangani bersama. Tindakan yang demikian itu terlihat pada waktu pergantian takhta atau kalau ada pemberontakan di wilayah kerajaan tersebut, selalu Belanda cam-

-
- 1). Dr. E. Utrecht SH, Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok, halaman 328-329, Tahun 1962.
 - 2). Dr. E. Utrecht SH, Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok, halaman 226, Tahun 1962.

pur-tangan di dalamnya. Maka dapat dikatakan sejak kerajaan-kerajaan itu menandatangani perjanjian persahabatan dengan Gubernurnemen, kedaulatan mereka sudah tidak penuh lagi. Kalau ada di antara raja-raja itu yang bertindak bertentangan dengan kehendak Belanda mereka dicap indisipliner dan mendapat hukuman administratif atau fisik dan sebagainya. Belanda hanya mengenal susunan tata-pemerintahannya. Mengenai hal yang terakhir ini sejak abad ke-18 hampir tidak ada perubahan dan tampak seperti uraian berikut ini.

1. Kerajaan Mataram

Wilayah kekuasaan meliputi Pulau Lombok dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Batas-batasnya; di sebelah timur Selat Alas, di sebelah selatan Samudera Hindia (Samudera Indonesia sekarang), di sebelah barat Selat Lombok, di sebelah utara Laut Jawa. Seluruh wilayah kekuasaan dibagi atas dua bagian besar yang menurut istilah daerah (Sasak) disebut *Timuq Juring* (sebelah timur Sungai Babak) dan *Baret Juring* (di sebelah barat Sungai Babak) dengan batas kedua wilayah itu ialah Sungai Babak (atau *Kokoq Pandan*).

Beda antara kedua wilayah itu ialah *Timuq Juring* otonom dan yang *Baret Juring* diperintah langsung. Kebijaksanaan politik raja Mataram yang demikian itu juga menentukan susunan tata pemerintahannya.³⁾

Kekuasaan tertinggi di tangan raja (waktu itu Raja A.A. Gde Ngurah Karangasem 1870-1894. Dalam menjalankan pemerintahannya raja didampingi oleh putra mahkota (AA. Ketut Karangasem — 1894) dan setelah gugur waktu penyerangan Belanda atas kota Mataram pada tahun 1894 raja menunjuk AA. Made Jelantik Bharayangwangsa. Ketika Kerajaan Mataram menyerah beliau ikut ditawan bersama ayahnya pada tahun 1894.

Wilayah *Timuq Juring* dibagi atas beberapa wilayah kekuasaan yang didasarkan kepada teritorial genealogis dan tiap wilayah dipimpin oleh *perkanggo*. Wilayah kekuasaan *perkanggo* ini dulu sebelum kekuasaan raja asal Bali di Pulau Lombok adalah kedatuan-kedatuan kecil, seperti antara lain: Pujut, Praya, Sakra, Rarang

3). Wawancara dengan Haji Hasyim, tanggal 22-7-1978
Wawancara dengan Haji Adam, tanggal 26-9-1980
Wawancara dengan Maniq Fadelah, tanggal 15-10-1978.

Mantang, Kopang dan Pringgabaya. Tiap perkanggo membawahi beberapa *pemekel* (Kepala Desa) dan tiap pemekel membawahi beberapa kiliang (Kepala Kampung). Sedang wilayah baret Juring dibagi atas beberapa wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang *punggawa*. Tiap punggawa membawahi beberapa *perbekel*, yang mengepalai wilayah administratif yang terkecil dan membawahi beberapa keliang.

Secara skematis susunan pemerintahan Kerajaan Mataram pada akhir abad ke-19 seperti di bawah ini: Putra Mahkota selalu diutamakan putra yang lahir dari permaisuri. Punggawa atau perkanggo diangkat dan diberhentikan oleh raja berdasarkan keturunan di samping kecerdasan dan keberaniannya. Pemekel dan keliang diangkat oleh perkanggo atau punggawa berdasarkan keturunan dan wibawanya di dalam masyarakat dan atas nasihat pemuka-pemuka masyarakat. Perbekel dan keliang harus dihormati dan ditakuti oleh rakyat. Penghasilan perkanggo atau punggawa berasal dari pemberian izin memiliki tanah yang tidak terbatas yang dikerjakan secara gotong-royong oleh rakyat. Bagi perbekel dan keliang mempunyai *tanah pecatu*, yang dapat dibedakan atas *pecatu pusaka* dan *pecatu mider*.

Punggawa, perkanggo, perbekel dan keliang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah di wilayah kekuasaannya. Hanya yang tidak dapat diselesaikannya sendiri harus diajukan ke instansi yang lebih tinggi. Selain perkanggo dan punggawa diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya, mereka juga diwajibkan untuk mengumpulkan upeti/membayar pajak dalam bentuk uang dan *swinih* dalam bentuk natura. Rakyat yang diwajibkan membayar upeti hanyalah golongan kaula yang mempunyai tanah.

Bagi *perwangsa*, *permenak*, pejabat agama dan pemerintahan, dibebaskan dari membayar upeti. Rakyat juga diwajibkan *ngayah* (kerja rodi) dan ikut berperang jika raja memerlukannya.

2. Kerajaan Sumbawa

Wilayah kekuasaannya meliputi hampir dua per tiga dari luas Pulau Sumbawa. Batas-batasnya di sebelah timur Kerajaan Dompu, di sebelah selatan Samudera Hindia, di sebelah barat Selat Alas, di sebelah utara Laut Jawa. Seluruh wilayah dibagi atas *kedemungan* dan tiap kedemungan diperintah oleh seorang Demung. Tiap Kedemungan dibagi atas beberapa kampung. Kampung di-

kepalai oleh seorang kepala kampung. Di Sumbawa kampung merupakan kesatuan administratif yang terkecil. Mengenai struktur organisasi pemerintahannya kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang dalam bahasa Sumbawa disebut *Dewa Masmawa*. Dalam menjalankan kekuasaannya, raja didampingi oleh tiga orang menteri (bahasa Sumbawa: *Menteri Telu*), yaitu: *Datu Rangga*, *Datu Kalibelah* dan *Datu Dipati* dengan tugas masing-masing: Datu Rangga selain sebagai Ketua Dewan Menteri juga bertugas memegang urusan pemerintahan umum. Datu Kalibelah mengurus masalah pengadilan dan Datu Dipati mengurus keamanan dan pertahanan. Keputusan adat tertinggi adalah yang dihasilkan oleh keputusan permusyawaratan Menteri Telu, *Memanca Lima* dan *Lelurah Pitu*. Keputusan-keputusan yang ringan cukup dikerjakan oleh musyawarah *Tau Telu*, yaitu Rangga (Ketua Dewan Menteri), *Longan Samapuin* (Ketua Mamanca Lima) dan *Ngeru* (Ketua *Lelurah Pitu*).

Anggota-anggota Mamanca Lima (Majelis Lima Orang) ialah:

- a. *Longan Samapuin* (Ketua)
- b. *Kadimangan*
- c. *Demunga Langu*
- d. *Menteri Tuban dan*
- e. *Mekal Tana*.

Anggota-anggota Lelurah Pitu (Majelis Tujuh Orang) ialah:

- a. *Ngeru* (Ketua)
- b. *Demung Pulit*
- c. *Nyaka Samapuin*
- d. *Nyaka Pamulung*
- e. *Nyaka Bangkong*
- f. *Nyaka Berare dan*
- g. *Nyaka Lamok*.

Anggota Mamanca dan Lelurah yang berjumlah dua belas orang itu disebut *Lante Reya*. Lante-lante ini disertai memimpin wilayah (*ulayet*) yang lebih kecil yang disebut *lar* atau *lar lamat*. Mereka itu langsung berhubungan dengan rakyat. Wilayah, segala pejabat, rakyat dan segala pekerjaan yang menjadi beban baktinya disebut "*pengantong*" sehingga dikenal 12 lingkungan kekuasaan yang disebut "*Pengantong Du Olas*". Pada zaman awal, sebelum akhir abad ke-19, rakyat diperintah bukan menurut wilayah tem-

pat tinggalnya, tetapi menurut pembagian kewajiban terhadap kerajaan, misalnya apa yang dikatakan *tau marisi* dan sebagainya. Di samping pangkat-pangkat adat tersebut di atas ada pula pangkat adat yang disebut *Enti Desa*, *Sangarya*, *Keroya*, *Ngampo* dan *Demung*. Semuanya adalah wakil mahkota yang ditempatkan di tiap wilayah kekuasaan pemerintahan yang membawahi *Nyakanyaka*. Tiap *Nyaka* membawahi pula pejabat-pejabat yang lebih rendah dengan tugasnya masing-masing.

Urusan keagamaan diserahkan kepada *Lembaga Hukum Syara'* yang diketuai oleh *Qadhi* dan anggota-anggotanya: Imam, Penghulu, *Lebe Dalam*, *Kabir* dan *Rura*.

Penghasilan para pejabat kerajaan dibebankan kepada rakyat, yaitu untuk raja disebut "*Bunga Antin*", sedangkan untuk pejabat-pejabat lainnya disebut "*Bekal Beraya*". Selain itu para pejabat memperoleh sawah yang dibuat oleh rakyat. Tanah yang demikian disebut "*Pamangan*" (bahasa Sasak: *Pecatu*, bahasa Jawa: *Bengkok*).⁴⁾

Sejak Sultan Muhammad Amarullah (1843 – 1885) menandatangani kontrak politik pada tanggal 27 Pebruari 1875 pemerintahan berdasar adat yang sebelumnya dikenal dengan nama *Tana Samawa* tidak berperan lagi. *Masmawa* (kekuasaan raja) bersama ("*Tana Samawa*") merupakan pemerintahan tertinggi mendapat corak lain sejak kontrak politik ditandatangani. Dalam *Politek Contract* disebutkan *Zelfbestuurder* (Sultan) menjalankan pemerintahan bersama dengan orang-orang besar kerajaan. Segala keputusan yang akan dijalankan dengan persetujuan wakil Pemerintah Hindia Belanda setempat. Pada tanggal 14 Mei 1905 Sultan Muhammad Jalaluddin III (1883 – 1931) menandatangani kontrak politik yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh *Zelfbestuurder* (Sultan). Kontrak tersebut diperbaharui lagi pada tanggal 14 Desember 1938 yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931 – 1958) yang menetapkan hak dan wewenang Sultan. Urusan Pertahanan, Hubungan Luar Negeri dan monopoli candu dan garam dipegang oleh Gubernur.⁵⁾

4). Wawancara dengan L. Mala, tanggal 30 - 9 - 1978.

Wawancara dengan L. Muhammad Zain Mustami, tanggal 1 - 10 - 1978.

Wawancara dengan Permaisuri Sultan Kaharuddin III, tanggal 20 - 10 - 1978.

Wawancara dengan L. Imbang, tanggal 2 - 10 - 1978.

5). L. Wacana dkk, Sejarah Nusa Tenggara Barat, hal. 119. Tahun 1977/1978.

3. Kerajaan Bima

Daerah kekuasaannya meliputi bagian timur pulau Sumbawa. Batas-batasnya; di sebelah timur Selat Sape, di sebelah Selatan Samudera Hindia, di sebelah barat kerajaan Dompu dan di sebelah utara Laut Jawa. Seluruh wilayah kerajaan dibagi atas *Kejenelian-kejenelian* yang dikepalai oleh seorang *Jeneli* dan tiap *Kejenelian* dibagi atas *Kegelarangan* yang dikepalai oleh seorang *Gelarang*.

Dalam menjalankan pemerintahan Sultan Bima dibantu oleh Majelis Pemerintahan Harian yang disebut *Majelis Tureli* yang anggota-anggotanya terdiri dari: *Tureli Parado*, *Tureli Woha*, *Tureli Belo*, *Tureli Sakuru*, *Tureli Bolo* dan *Tureli Donggo* yang masing-masing dijabat oleh bangsawan tinggi. Majelis *Tureli* tersebut dikepalai oleh *Tureli Nggampo* yang dijabat oleh adik kandung Sultan atau keluarganya yang terdekat. Jabatan *Tureli* dijabat oleh bangsawan tinggi yang pada umumnya masih ada hubungan kekerabatan dengan Sultan.

Di samping Majelis *Tureli* ada lagi *Majelis Hadat* yang dikepalai oleh *Bumi Luma Rasanae* yang dibantu oleh *Bumi Luma Bolo*. Anggota-anggotanya terdiri dari 12 orang yang bergelar *Bumi Nae*. Majelis ini berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan yang berhak mengangkat dan memberhentikan raja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) sewaktu-waktu mereka membantu para *Jeneli*. Dalam penyelenggaraan adat mereka mempunyai bawahan yang terdiri dari *Bumi Nggeko* yang beranggotakan 16 orang, *Nenti Mome* yang beranggotakan 4 orang serta petugas-petugas adat lainnya.

Di bidang urusan agama Sultan dibantu oleh Majelis agama yang dikepalai oleh seorang *Qadli* atau Imam Kerajaan Bima yang beranggotakan 4 orang *Khatib Kerajaan* yang dibantu oleh 17 *Lebenae*. Majelis agama bersama-sama Majelis Adat turut aktif bersama Majelis *Tureli* membicarakan masalah pemerintahan. Di tiap *Kejenelian* *Jeneli* melaksanakan pemerintahan dibantu oleh *Bumi Nae* dan *Lebenae*.⁶⁾

Pada akhir abad ke 19 yang memerintah Kerajaan Bima ialah Sultan Ibrahim. Sejak Sultan Abdul Hamid 18 Zulkaidah 1203 Hijriah sampai Sultan Ibrahim dan dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Salahuddin, hukum dan peraturan sudah mulai dicatat dan dikodifikasikan. Pada garis besarnya meliputi, Bab I: menge-

6) Ahmad Amin, Sejarah Bima, hal. 11 - 12, tahun 1971.

nai Hukum Adat, Bab II mengenai Hukum Syahbandar/Dagang, Bab III mengenai Hukum Agama.

4. Kerajaan Dompu

Wilayah kekuasaannya meliputi Kabupaten Dompu sekarang. Batas-batasnya di sebelah timur : Kerajaan Bima, di sebelah Selatan Samudera Indonesia, di sebelah Barat Kerajaan Sumbawa, di sebelah utara Laut Jawa dan Kerajaan Sanggar.

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang pada akhir abad ke - 19 dijabat oleh Sultan Abdullah, yang pada tahun 1886 menanda tangani Kontrak Panjang.

Seluruh Kerajaan Dompu dibagi menjadi 4 (empat) Kejenelien masing-masing Kejenelien Dompu, Kampo, Huku dan Kilo. Tiap Kejenelien diperintah seorang *Jeneli* yang membawahi beberapa orang *Gelarang* yang memerintah Kegelarangan. Dalam menjalankan pemerintahan raja dibantu oleh *Majelis Adat* dan *Majelis Agama*. Majelis Adat beranggotakan 4 orang, yaitu : Raja Bicara, Rato Rasanae, Rato Parenta dan Rato Renda. Majelis Adat berwenang mengangkat dan memberhentikan Sultan⁷⁾. Sultan dipilih dari putera raja atau keluarga yang terdekat.

5. Kerajaan Sanggar

Kerajaan ini merupakan yang terkecil di antara kerajaan yang ada. Batas-batasnya; di sebelah timur Laut Jawa, di sebelah selatan Kerajaan Dompu, di sebelah barat Kerajaan Dompu, di sebelah utara Laut Jawa. Rakyatnya pun sangat sedikit, sisa yang dapat menyelamatkan diri pada waktu gunung Tambora meletus pada bulan April 1815. Pada tahun 1847 penduduknya baru berjumlah 350 jiwa.⁸⁾ Karena wilayahnya dan penduduknya sangat sedikit maka susunan pemerintahannya pun sangat sederhana walaupun bertumpu pada pola dasar pemerintahan Kerajaan Bima. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Dalam melaksanakan pemerintahan raja didampingi oleh Jeneli yang membawahi beberapa gelarang.

7. Lalu Wacana B.A. dkk, Sejarah Nusa Tenggara Barat, hal 11 - 12, tahun 1971.

8. Lalu Wacana B.A. dkk, Sejarah Nusa Tenggara Barat, hal. 104, tahun 1977

B. SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Pada masa itu di Nusa Tenggara Barat belum ada sekolah formal baik yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pengajaran yang dijalankan dari generasi ke generasi dilakukan secara tradisional. Mereka belum mengenal didaktik dan metodik modern seperti yang dilaksanakan di dunia Barat. Memang pada masa itu dan lama sebelumnya masyarakat sudah mengenal sistem penyaluran ilmu dari generasi ke generasi baik secara individual maupun kelompok. Tetapi pelajaran yang diberikan adalah hal-hal yang praktis dan yang mengandung unsur magis, misalnya seorang anak diajar membaca Al Qur'an, atau *cakapan* oleh ibu dan bapanya. Seorang guru ngaji mengajarkan sekelompok anak mengaji di rumah, pesantren dan di Mesjid. Di samping itu anak-anak pun menerima pelajaran yang berhubungan dengan *mu'amalah*, supaya dapat melakukan ibadah dengan baik. Juga seorang ulama mengajarkan tentang ilmu fiqh, *ushul* atau tasawuf kepada sekelompok orang-orang tua dan sebagainya. Kebanyakan anak-anak pada masa itu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan pengalaman selama mereka ikut bekerja bersama-sama dengan orang tuanya atau orang alim.

Memang pada masa itu sudah ada juga orang yang sudah pandai tulis baca huruf latin, terutama penduduk di pantai, tetapi kepandaian itu diperolehnya dari orang Eropa yang berniaga di pulau Lombok dan pulau Sumbawa, atau dari petugas Gubernemen lainnya yang sebelum Belanda memerintah langsung di pulau Lombok dan pulau Sumbawa, mereka sudah di sana karena ikatan persahabatan yang ada antara kerajaan-kerajaan dengan Gubernemen.⁹). Sekolah formal baru didirikan setelah Belanda memerintah langsung di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. *Volkschool* yang pertama didirikan oleh Belanda pada tahun 1896 di Mataram (Lombok). Setelah itu disusul dengan pembukaan di Pringgabaya, Masbagik, Selong, Praya, Sumbawa besar dan Bima. Pelajaran yang diberikan berhitung, menulis,

9. Wawancara dengan Haji Hasyim, tanggal 22 - 7 - 1978.

Wawancara dengan Haji Adam, tanggal 26 - 9 - 1978.

membaca, dan bahasa Melayu. selain membaca, menulis huruf latin, juga diajarkan membaca menulis huruf Arab - Melayu, huruf daerah (*Jejawan*) di Lombok, huruf Sumbawa di Sumbawa, huruf Bima di Bima dan *Dompu*. Guru-gurunya didatangkan dari Jawa, Bali dan Sulawesi. Seorang guru untuk satu sekolah. Baru setelah abad - 20 pemerintah mengadakan *Kursus Guru Bantu* yang dibina dari tamatan *Vervolgschool*.

Anak-anak yang belajar di pesantren secara bersila mengelilingi gurunya, dan para santri menerima pelajaran agama, menulis dan membaca huruf Arab. Ilmu umum yang diperoleh mereka terbatas pada Sejarah Nabi Muhammad s.a.w. ditambah dengan ceritera para Nabi.

2. Kesenian

Pada akhir abad ke - 19 seluruh pulau Lombok dan Sumbawa (Nusa Tenggara Barat sekarang) diliputi oleh kesulitan akibat Perang Sasak (1891 - 1895) di pulau Lombok, keresahan dan kegelisahan rakyat pulau Sumbawa melihat raja mereka tidak berdaulat lagi. Meskipun di pulau Sumbawa pemerintah langsung masih ada di tangan para raja, namun tekanan-tekanan Belanda sudah mulai terasa dalam kehidupan rakyat, yaitu dalam segala usaha terikat kepada kehendak Gubernemen. Situasi yang demikian ikut mempengaruhi perkembangan kebudayaan. intern:

Seperti kesusasteraan zaman Purba, kesusasteraan zaman Ma'dya pun tidak kurang pentingnya, karena masuknya di Lombok bersama dengan kedatangan agama Islam di Lombok dari Jawa. Ditilik dari isinya dapat kita bagi atas beberapa jenis seperti : Hikayat, Babad dan Suluk.

Hikayat yang berkembang di Lombok ialah : Amir Hamzah (bahasa Sasak: *Amir Amsiyah*. Ceriteranya dipecah dalam beberapa fragmen (bahasa Sasak: *Klampan*) menurut versi Lombok seperti; Selendir, Yunan, Bangbari, Kabar Sundari, Rengganis, Jonglengga, Gendit Birayung dan lain-lain. Di samping itu berbagai riwayat Nabi-Nabi, seperti : Nabi Yusuf, Nur Muhammad, Salsah, Puspakerma, Indarjaya, Nabi Adam Balang Kesimbar. Juga dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti ceritera Ramadewa, Cilinaya dan Cupak.

Babad-babad yang terkenal ialah *Babad Lombok*, *Babad Sakra*, *Babad Praya*, *Babad Petung Bayan*, *Babad Sangupati*, *Babad Doyan Nada*, *Rereg Kediri*, *Baloq Tui*, *Rereg Karanga-*

sem yang ditulis pada abad ke- 19.

Suluk, yaitu cakepan-cakepan yang membentangkan soal-soal sufi dan sebagian merupakan saduran/salinan dari Suluk Jawa yang masuk bersama agama Islam di samping hasil ciptaan penulis lokal di Lombok yang dikarang pada abad ke- 19.

Kitab-kitab Suluk yang terkenal : *Jatiswara, Prembonan, Anak Jawak, Alim Sujiwa, Nursada, Asmaragama, Monyeh, Ladumi, Markum, dan lain-lain*. Penulis-penulis yang terkenal pada abad ke- 19 itu antara lain Jro Mihram yang menggubah *Monyeh Raden Barak* yang mengarang Babad Sakra, Den Durat yang mengarang Babad Praya, Mamiq Mustiaji dan Mamiq Nuradi, Raden Wiranom ketiga tokoh terakhir ini banyak menyadur, menyalin berbagai macam hikayat, suluk dan babad yang ada. Ke tiga jenis hasil sastra di atas disusun dalam tiga bahasa, Jawa Madya, Sasak dan Bali dan digubah dalam bentuk tembang capat. Tembang macapat yang berkembang di Lombok sampai akhir abad ke- 19 ialah: Maskumambang Sinom, Durma, Asmarandana, Pangkur dan Dangdanggula.

Mengenai seni tembang ini perkembangannya sangat pesat. Hampir tidak ada pesta pada masa itu yang tidak diramaikan dengan tembang. Menurut tradisi waktu itu di Lombok bila ada pesta atau upacara selalu diadakan pembacaan lontar yang ditembangkan dengan tembang ageng atau tembang gede. Terutama kalau selamatan potong rumput, potong gigi, atau khitanan diharuskan membaca *lontar Puspakerma* atau *Jatiswara* sebagai pembukaan acara pesta.

Di Kerajaan Sumbawa perkembangan seni *Sekeco* yang juga ditulis di atas daun lontar. Cabang seni suara lainnya seperti gamelan, *tawaq-tawaq, rebana, gong suling, kelenang, pereret, genggong, selober, serunai (kendola), silu* dan lain berkembang sangat baik di Lombok, begitu pula *langko* di Sumbawa, *mpisi* dan *nua* di Bima.

Seni tari seperti *oncer, kayaq Sando, batek baris, gambuh, arja, legong* di Lombok, *tari tanak, tari joge*, di Sumbawa, *lenggo, sere, maha, toji, dewa'a, soka, mpisi, donggo, baleba, mpa'a* di Bima dan Dompu.

Seni pewayangan pun berkembang dengan baik, Pagelaran wayang tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebaik alat dakwah bagi golongan ummat Islam dan upacara ruwatan' bagi um-

mat Hindu di Lombok Barat. Maka itu di Lombok terdapat *wayang Sasak* yang melakonkan cerita Amir Hamzah (bahasa Sasak Amir Amsyiah). Sedangkan wayang Bali melakonkan ceritera Mahabarata. Dalam menyajikan ceritera Amir Amsyiah dalam pewayangan dibagi atas lakon (bahasa Sasak *klampayan*) yang menciptakan gubahan baru menurut versi Lombok seperti Selandir, Rengganis, Jonglengga, Kabar Sundari, *Bangbari*, Yunan, Jabalkap, dan *Widara Kawitan*.

Tidak kalah pentingnya ialah seni hias yang hidup subur pada makam-makam. Sesuai dengan sifatnya sebagai tanda, batu-batu nisan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa dibentuk dan dihias sebaik-baiknya. sebagai kelanjutan dari tradisi kesenian masa sebelumnya. Terutama di daerah yang mempunyai batu padas, batu nisannya selalu dihias dengan ukiran-ukiran.

C. ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Agama yang terbanyak dianut oleh masyarakat NTB ialah Islam, kemudian menyusul Hindu, Budha dan animis. Agama Islam tersebar di seluruh pulau Lombok dan pulau Sumbawa yang tingkat kemajuannya berbeda-beda menurut lokasinya. Agama Islam di pulau Sumbawa pusat kegiatannya terpecar dari istana di mana raja sebagai khalifah sangat memperhatikan perkembangan dan kehidupan agama Islam yang dianut oleh rakyatnya. Tradisi kehidupan agama pada masa itu mencerminkan betapa teguhnya rakyat memegang dan mengamalkannya. Hampir tiap rumah dan surau anak-anak belajar mengaji yang dipimpin oleh guru ngaji atau orang tuanya. Pelaksanaan syariat selalu di bawah pengawasan raja melalui petugas-petugas mulai dari imam istana, sampai *lebe*, *khatib* dan *modin* di kampung-kampung. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan pun selalu didasarkan kepada hukum adat dan hukum agama. Terutama pada bulan Ramadhan seolah-olah sudah melembaga, di tiap surau dan mesjid orang sembahyang terawih dan tadarus sampai waktu makan sahur tiba. Hanya sedikit sekali orang yang tidak taat menjalankan ibadah, kebanyakan dari padanya berasal dari luar dan berdiam di pantai-pantai, umumnya disebut Waktu Telu.¹⁰⁾ Sultan Muhammad Jalaluddin yang berkuasa pada masa itu bertindak

10). Wawancara dengan Lalu Imbang, tanggal 1 Oktober 1978.

sangat keras kepada mereka yang kedapatan tidak mau beribadah seperti yang disyariatkan oleh agama Islam.

Demikian pula di Kerajaan Bima, Sanggar dan Dompu. Tetapi karena faktor geografis, di wilayah Bima masih terdapat daerah terisolasi dengan penduduk yang masih menganut kepercayaan animis dengan wilayah penyebarannya meliputi desa Kala dan Mbawi di Donggo Timur serta beberapa desa di Donggo Barat. Mereka itu terkenal dengan nama *orang Donggo* (orang gunung), yaitu keturunan orang Bima yang tidak mau memeluk agama Islam dan melarikan diri di sebelah timur dan barat Teluk Bima pada abad ke- 17 sampai akhir abad ke- 19 mereka masih hidup terisolasi.¹¹⁾

Di pulau Lombok kehidupan agama Islam sangat terbengkalai, karena kebanyakan di antaranya masih memeluk agama Islam yang belum sempurna yang menyerahkan urusan ibadah kepada kiyai (pemimpin agama). Setelah abad ke- 20 golongan ini memisahkan diri dari golongan Islam yang menjalankan syariat agama dengan sempurna dan menamakan dirinya *Islam waktu Telu*.

Selain percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasulNya mereka masih percaya kepada dewa dan kekuatan ghaib yang ditimbulkan oleh rokh-rokh. Dewa yang tertinggi ialah Batara Guru. Kepercayaan yang demikian disebabkan oleh karena sejak agama Islam masuk di Lombok pada abad ke- 16 hampir tidak ada pembinaan yang kontinyu. Apalagi mereka ditinggalkan oleh para mubaligh yang berasal dari Jawa dalam tingkat awal. Dan para kiyai yang ditugaskan untuk membina mereka menjadi terbengkalai oleh karena tidak mendapat dorongan dan bantuan penguasa yang beragama Hindu (dari abad ke- 17 abad ke- 19). Bahkan sebelum pertengahan abad ke- 19 Kerajaan Mataram pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambatnya pembinaan kehidupan agama Islam dan menyebabkan timbulnya penyimpangan dari ajaran seperti terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist. Keadaan itu berlanjut sampai akhir akhir abad ke- 19. Urusan ibadah menjadi kewajiban para kiyai semata-mata orang-orang yang bukan kyai tidak melakukan sembahyang dan puasa. Bagi yang bukan turunan kiyai tidak

11). Wawancara dengan H. Idris M.Ja'far, tanggal 5 Juli 1978.

belajar membaca Al Qur'an, sebab orang bersembahyang, puasa dan membaca Al Qur'an harus bersih dan suci. Orang-orang dari golongan ini yakin akan masuk syurga asal melaksanakan segala yang diperintahkan oleh kiyai mereka seperti mengadakan selamatan dan mengeluarkan sedekah bagi keluarga yang meninggal diserahkan kepada kiyai. Menurut keyakinan mereka, kiyailah yang akan menanggung dosa semua pengikutnya. Sedangkan kiyai sendiri ibadahnya pun tidak sempurna pula. Pelaksanaan ibadah bagi semua kiyai tidak sama, oleh karena mereka tidak berpegang kepada Hadist dan Al Qur'an melainkan catatan di atas daun lontar yang ditulis dengan huruf Jajawan. Sedang Al Qur'an hanya dibaca pada waktu tertentu saja, seperti dalam bulan puasa dan upacara selamatan orang yang meninggal dunia. Selanjutnya Al Qur'an dan Hadist hanya menjadi barang keramat yang disimpan di bubungan atap. Pengertian memuliakan Hadist dan Al Qur'an mereka bukanlah mengamalkan isinya tetapi menempatkannya di tempat yang paling tinggi. Sehingga karena tidak mempunyai pedoman yang sama maka cara dan waktu beribadah bagi tiap wilayah berbeda-beda pula, terutama mengenai waktu sembahyang dan waktu mulai dan mengakhiri puasa. Seperti di wilayah Bayan dan Tanjung beserta lingkungan pengaruhnya, kiyai hanya mengerjakan sholat Jum'at, sholat Mayit, sholat Ied, dan puasa mulai pada tanggal 2 Ramadhan. Di wilayah Pujut dan lingkungan pengaruhnya, kiyai sembahyang lima kali sehari semalam dan mulai puasa pada tanggal 1 Ramadhan. Selain sholat wajib mereka juga mengenal sholat sunat, sholat Ied, sholat mayit juga sembahyang jumat. Mereka mengerjakan ibadah seperti yang ditentukan oleh syariat agama Islam Waktu Telu. Di Rambitan (Lombok Tengah), Sapit (Lombok Timur) dan lingkungan pengaruhnya hanya mengenal sholat Maghrib, Isya selama bulan Ramadhan, sholat subuh pada hari raya Ied, sholat Jum'at, sholat terawih dan sholat mayit. Di Sembalun dan lingkungan pengaruhnya kiyai hanya melakukan sembahyang Ashar pada hari Kamis, sembahyang Zohor pada hari Jum'at dan sholat Subuh pada hari raya Ied. Mereka juga mengenal sholat mayit dan sholat sunat terawih. Waktu mulai puasa pada tanggal 3 Ramadhan dan mengakhiri puasanya pada tanggal 3 Syawal. Waktu Telu di Pengadangan (Lombok Timur) dan daerah lingkungan pengaruhnya kiyai hanya sembahyang lima waktu sehari semalam selama

gilirannya menjadi *merbot* (pengurus mesjid) selama seminggu. Setelah itu mereka hanya mengerjakan sholat Jum'at dan sholat-sholat sunat lainnya seperti sholat mayit dan sholat terawih selama bulan Ramadhan.

Waktu mulai puasa sama dengan di daerah Bayan, tetapi berbeda cara berbukanya. Sejak dari hari ke- 1 s/d 14 mulai berbuka setelah matahari terbenam dan hari ke- 15 s/d 21 berbuka puasa setelah matahari condong ke barat, sedangkan dari hari ke 22 s/d 30 mulai berbuka setelah teja di ufuk barat sudah tidak kelihatan lagi. Dan pada waktu upacara penguburan mayat kiyai dapat berbuka puasa ketika acara makan bersama. Beberapa orang kiyai hanya puasa pada awal puasa selama 3 (tiga) hari, pertengahan Ramadhan 3 (tiga) hari, dan akhir Ramadhan 3 (tiga) hari.

Persamaannya bagi semua kiyai Waktu Telu ialah mereka tidak melaksanakan zakat dan naik Haji. Dan mereka menghalalkan minuman keras dan membolehkan pengikut-pengikutnya meminta berkah ke kuburan, pedewaan dan *kemaliq*. Waktu Telu menganggap Gunung Rinjani tempat yang suci dan tempatnya kembali segala roh makhluk yang bernyawa. Mereka percaya kepada kekuatan roh yang baik dan jahat yang dapat membawa manfaat dan *mudharat* kepada manusia yang masih hidup. Dalam hidupnya Waktu Telu lebih mengutamakan adat dari pada agama, oleh karena adat itu dihayatinya sendiri. Mengucap dua kalimah syahadat hanyalah sekali seumur hidupnya ketika mereka menikah dan mengucapnyapun secara dituntun oleh kiyai. Dan yang diwajibkan mengucapkan syahadat hanyalah mempe-lai laki-laki saja.

Penganut Islam yang berdasarkan syariat yang lebih terkenal dengan nama Waktu Lima pada waktu itu tersebar di seluruh Lombok dan jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan penganut Islam Waktu Telu. Mereka pada umumnya keturunan dari kiyai yang keras memegang syariat agama Islam. Dari golongan mereka itulah yang pergi haji dan sepulangnya berusaha menegakkan ajaran agama yang haq di kalangan Waktu Telu. Selebihnya adalah pendatang dari luar daerah, Sulawesi Kalimantan dan Sumbawa.

Penganut agama Hindu pada umumnya keturunan orang-orang Bali yang menyeberang ke Lombok pada akhir abad ke-17. Mereka tersebar di sekitar Cakranegara, Mataram, Narmada

dan Tanjung (Lombok Utara). Pura mereka yang terbesar ialah pura Meru di Cakranegara yang dibangun pada abad ke- 18 oleh Kerajaan Karangasem Sasak. Kemudian menyusul pura Suranadi (dibangun pada abad ke- 17), pura Lingsar Timur, pura Lingsar Barat selesai abad ke -19 dan pura Narmada pada tahun 1879 merupakan bagian dari Taman Narmada yang dibangun oleh Kerajaan Mataram.

Seperti agama Hindu di Bali, mereka memuja Trimurti, dewa Brahma, dewa Wisnu dan dewa Syiwa. Di samping itu mereka mengenal bermacam-macam dewa lainnya termasuk Dewa Gunung Rinjani. Setiap tahun mereka naik ke Gunung Rinjani untuk mengadakan upacara *Pujawali* yang dipimpin oleh seorang Pedanda. Dan untuk menghormati Dewi Kesuburan yang bersemayam di Gunung Rinjani sekali setahun pada tiap bulan ke- 6 mereka mengadakan upacara *perang ketupat* di pura Linggar Barat.

Selain penganut agama Islam, Hindu, Budha juga masih terdapat menganut suatu kepercayaan yang disebut *Budha-Budhi* seperti yang terdapat di Tebango (desa Pemenang), dan jumlah mereka hanya beberapa ratus orang saja. Kekuasaan tertinggi disebut Batar Guru. Pemimpin agama mereka disebut *dukuh*. Mereka tidak mengenal pembakaran mayat, tetapi dikuburkan. Kitab suci mereka disebut *Pelukatan*.

Mereka itu adalah penduduk Lombok yang tidak bersedia memeluk agama Islam kemudian melarikan diri ke gunung-gunung dan menetap di Deliman Ireng yang kemudian lebih terkenal dengan nama Tebango.

D. KEHIDUPAN EKONOMI

Mata pencaharian penduduk di daerah NTB yang terutama ialah bercocok tanam dan sebagai mata pencaharian tambahan mereka berternak kuda, kerbau, kambing, sapi dan unggas (itik dan ayam). Di samping itu ada pula yang berburu dan meramu di hutan sebagai mata pencaharian tambahan. Hanya sebagian kecil, umumnya pendatang dari daerah Sulawesi yang berdiam didaerah pantai hidup sebagai nelayan. Sistem bercocok tanam yang dikenal pada waktu itu ialah berladang dan bersawah. Perladangan banyak dilakukan di daerah yang jarang penduduknya, seperti di Lombok Selatan, Lombok Utara, Lombok Timur bagian utara di Pulau Sumbawa. Tanah yang dipi-

lih menjadi ladang adalah tanah yang belum merupakan tanah milik dari seseorang individu. Pemilihan tanah ladang selalu di dalam batas-batas tanah yang dikuasai oleh kelompoknya, berupa desa. Batas-batas tanah yang demikian itu dalam bahasa Sasak dan Sumbawa disebut *paer*. Pada waktu ia mengerjakan tanah itu ada di bawah kekuasaannya, tetapi segera setelah ia meninggalkannya tanah itu jatuh menjadi milik kelompok lagi. Seorang peladang bebas memilih tanah hutan yang dikehendakinya untuk ladang, asal masih dalam *paernya* sendiri. Apabila si peladang telah memilih tanah hutan untuk ladangnya, maka ia mulai bekerja. Tiap peladang mengerjakan ladangnya secara tradisional menurut tingkat pekerjaan yang tetap. Sebelum peladang itu mulai merambas hutan, biasanya diadakan upacara untuk mengusir roh-rokh halus penghuni hutan, di Lombok disebut *mabangar* yang dipimpin oleh *pemangku*. Di daerah Bayan Lombok Utara, *pemangku* yang demikian disebut *jintaka*. Upacara yang serupa dilakukan juga di pulau Sumbawa di bawah pimpinan *Sanro* dan *Sandro*. Bagi penduduk yang kuat agamanya biasanya mengadakan upacara doa yang dipimpin oleh lebe. Pekerjaan menebas hutan dimulai pada awal musim kemarau biasanya pada bulan empat menurut perhitungan tahun Sasak di Lombok. Membersihkan belukar dan menebang pohon-pohon besar dilakukan oleh pria secara gotong royong dan tolong menolong (bahasa Sasak: *besiru*, bahasa Sumbawa: *basiru*). Alat-alat yang dipakai biasanya parang dan kapak. Tiga bulan kemudian, pada bulan tujuh menurut perhitungan tahun Sasak, sesudah daun-daun ranting serta batang-batang menjadi kering, si peladang mulai dengan pembakaran. Membakar ladang harus hati-hati supaya seluruh ladang terbakar dan api tidak merambat ke ladang orang lain atau hutan sekitarnya. Oleh karena itu tidak jarang pembakaran dilakukan lebih dari sekali. Sebelum ditanami, ladang dipagari dulu (bahasa Sasak : *neter*). Kalau letaknya jauh dari kampung kadang-kadang dibangun gubuk di tengahnya, tempat berteduh. Pekerjaan menanam di ladang dilakukan oleh pria dan wanita sambil bernyanyi beramai-ramai. Menanam bibit hanya dengan memakai *tugal* atau tongkat dari kayu yang diruncingi. (bahasa Sasak : *penajuk*, bahasa Sumbawa: *ngasak*). Pria mencocok lubang dengan *tugal* dan wanita menaburkan bibit dan biji ke dalam lubang kemudian menimbunnya dengan kakinya. Tanam pokok yang ditanam mereka ialah jagung dan padi ladang.

Tanaman tambahan seperti *beleleng* (sejenis sorgum), *getom* atau *getem* (sejenis gandum).

Tanaman sampingan : antara lain kacang-kacangan, wijen, mentimun, semangka, tarum, labu dan lain-lain.¹²⁾ Sejak tanaman tumbuh peladang selalu menjaganya dari gangguan tumbuhan liar dan binatang pemakan tumbuhan, ladang tersebut hanya dipakai sekali saja, apabila sudah selesai panen ladang itu ditinggalkan dan peladang membuka ladang baru dan memulai siklus aktivitas perladangan dari permulaan lagi. Sistem bercocok tanam yang terbanyak ialah bersawah, bahkan sebagian sudah dilakukan dengan sempurna. Irigasi sudah teratur dan meluku dengan bajak. Di Lombok Barat sudah mengenal *subak* dan air dialirkan dari bendungan induk ke saluran primer dan sekunder. Pengairannya teratur dan bendungan yang terkenal ialah Gebong (Lombok Barat). Di daerah yang belum mempunyai irigasi yang teratur, sangat tergantung kepada curah hujan. Biasanya petani membuat waduk (*embung*) untuk menampung air hujan. Bajak di pulau Lombok kebanyakan ditarik oleh sapi sedangkan di pulau Sumbawa bajak ditarik oleh kerbau. Di daerah tadah hujan seperti di Lombok Selatan dan di beberapa tempat (di Sumbawa Barat melumatkan tanah dengan mempergunakan kaki kerbau yang digiring atau diseret mengitari petak sawah (bahasa Sasak: *nggaro*,⁹ bahasa Sumbawa: *baru-ma* atau *baluna*).

Alat-alat lainnya yang dipakai untuk mengolah tanah yang akan ditanami juga dipakai linggis dan tembilang (dari besi dan dari kayu), yang sangat berguna untuk menyumbat pematang sawah yang bocor, dengan cara menumbuk-numbuk lubang yang bocor sampai air tidak mengalir lagi. Di samping itu dipakai pacul untuk memperbaiki pematang dan sudut-sudut sawah. Pekerjaan mengolah tanah pada umumnya dilakukan oleh pria. Menyemai bibit dapat dilakukan bersama-sama pria dan wanita. Turun bibit dilakukan orang pada awal bulan kedelapan menurut perhitungan tahun Sasak. Dalam tiap proses produksi persawahan dapat dilaksanakan secara gotong royong atau *besiru*. Jarang sekali yang memakai buruh upahan. Pada masa itu sistem upahan belum banyak dikenal oleh rakyat terutama bagi rakyat di pulau

12). Wawancara dengan Haji Adam, tanggal 26 - 9 - 1978.

Wawancara dengan Lailu Imbang, tanggal 1 - 10 - 1978.

Sumbawa dan pulau Lombok bagian Timur, Tengah dan Utara. Di Lombok terutama Lombok Barat pada waktu panen mengenal sistem upah yang disebut *bederep*, dengan perhitungan 10 : 1. Sepuluh ikat untuk pemilik padi dan seikat untuk pemotong padi, yang disebut *nyolasin*. Hasil pertanian terutama padi dan sedikit palawija. Sehabis potong padi kebanyakan tanah dibiarkan kosong. Pada masa itu pengolahan sawah belum dapat dikatakan intensif, sebab besar sawah tidak disiangi. Dan waktu persiapannya untuk ditanami setelah digaro rumputnya cukup ditebas dengan parang. Sehingga kalau hujan kurang, tumbuhan padi menjadi kerdil terjepit oleh rumput-rumput.

Akibatnya produksi sangat rendah, lebih-lebih kalau ada hama, pantang benar dibasmi, tetapi pengusirannya secara magis yang kadang-kadang tidak berhasil bahkan menimbulkan kerugian pada pihak petani. Sistem peternakan bebas juga sangat mengganggu dan menghambat kemajuan pertanian. Oleh karena itu agar tanaman tidak dimakan ternak dan binatang liar sawah harus dipagari.

Hasil padi di pulau Sumbawa hanya cukup untuk konsumsi sendiri, yang dapat diekspor hanya jagung dan kacang-kacangan melalui pelabuhan Sumbawa, Kempo, Bima dan Sape. Padi di Lombok banyak diekspor ke pulau Bali dan luar negeri melalui pelabuhan Ampenan di Lombok Barat.

Padi diangkut dari pedalaman ke pelabuhan dengan kuda atau dipikul karena jalur komunikasi masih sulit. Jalan raya dan jembatan belum ada. Dari satu tempat ke tempat lain dilakukan orang dengan jalan kaki atau berkuda. Pemberitaan yang penting dilakukan dengan melalui utusan atau surat. Dalam jarak dekat dilakukan dengan kode bunyi-bunyian seperti beduk dan tong-tong (bahasa Sasak : *Kul-kul*). Hubungan antara pulau atau tempat-tempat yang ditempuh melalui air dilakukan orang dengan sampan atau perahu. Hal itu semua sangat menghambat perkembangan ekonomi penduduk masa itu.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 – 1928

A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI DI DAERAH.

Dengan kemenangan golongan Liberal sejak tahun 1848 di negeri Belanda, maka haluan politik kolonial Belanda mulai berasaskan liberalisme. Keadaan di Indonesia yang tidak sesuai dengan zamannya mendapat celaan, baik di dalam maupun di luar Parlemen Belanda. ¹²⁾, dan menimbulkan politik kolonial baru yang secara resmi untuk pertama kali diucapkan oleh van Dedem pada tahun 1891. Dia mengemukakan bahwa keuangan Indonesia harus dipisahkan dari keuangan negeri Belanda, dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sistem desentralisasi dilaksanakan dan ekspansi menuju ke suatu politik yang konstruktif. Ahli politik seperti van Kol, van Deventer terkenal dengan triloginya: irigasi, emigrasi dan edukasi. Perjuangan politikus tersebut telah memberi pengaruh yang luas seperti tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901 yang menyatakan, bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Indonesia. ¹³⁾ Pulau Lombok yang berdasarkan Stb. No. 248 dan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 27 Agustus 1898 No. 19, merupakan afdeeling dari Keresidenan Bali dan Lombok tetap dibagi atas 3 (tiga) onderafdeeling: Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tiap onderafdeeling dibagi atas Kedistrikan dan tiap Kedistrikan dibagi pula atas desa-desa. Desa merupakan kesatuan administratif terkecil yang tidak berubah struktur dan organisasinya. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh *Krama Desa* (dewan orang tua desa) dan ditetapkan (dikukuhkan) oleh Kontrolur. Jabatan

12). Drs. Sutjipto Wiryosuparto, *Dari Lima Zaman Penjajahan Menuju Zaman Kemerdekaan*, hal. 98 Tahun 1956.

13). Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, hal 35, Tahun 1975.

Kepala Desa dipilih berdasarkan hak turun-temurun. Tiap suku pendatang seperti Jawa, Melayu dan Bugis diperintah oleh seorang kepala yang setingkat dengan Kepala Desa tetapi langsung di bawah Kontrolur. Demikian juga Kepala Distrik ditentukan oleh Kontrolur berdasarkan keturunan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Residen.

Di pulau Sumbawa bentuk pemerintahan swapraja masih terus diizinkan berdiri tetapi Kepala Swapraja (Sultan) menjadi bawahan Asisten Residen dan melakukan tugasnya berdasarkan persetujuan serta kerjasama dengan Kontrolur. Kecuali desa, struktur dan organisasi pemerintahan diubah. Setiap kerajaan yang ada di Sumbawa; yaitu: Sumbawa, Dompu dan Bima dijadikan onderafdeeling. Onderafdeeling Bima dan Dompu sebelum tahun 1907 masuk Keresidenan Timor dan onderafdeeling Sumbawa masuk Keresidenan Makassar. Tetapi sejak tahun 1907 Sumbawa masuk Keresidenan Timor. Bentuk *Kedemungan* di Swapraja Sumbawa serta *Kejenelian* Dompu dan Bima diteruskan, tetapi dari tahun 1920 - 1924 tiap Swapraja di pulau Sumbawa dibagi atas Kedistrikan. Di swapraja Sumbawa Kedistrikan meliputi beberapa daerah Kedemungan dan dengan demikian Kedemungan berubah statusnya menjadi onderdistrik. Di Swapraja Dompu dan Swapraja Bima Kedistrikan meliputi wilayah Kejenelian, maka struktur/organisatoris Kejenelian tidak berubah. Sedangkan Kerajaan Sanggar karena terlalu kecil dijadikan Kedistrikan di dalam wilayah onderafdeeling Bima. Sejak itu Sultan, Jeneli, Demung mendapat gaji di samping tanah adat yang dipegangnya sejak sebelum Pemerintahan Belanda. Juga yang penting dalam perubahan pemerintahan ini Badan-badan pemerintahan yang ada pada zaman kesultanan seperti Badan Hukum dan Badan Hukum Syara' yang terdapat di Bima, Dompu dan Sumbawa pada zaman Belanda tidak lagi menjadi aparat yang menjalankan pemerintahan. Untuk menjalankan tugas yudikatif, Belanda membentuk Badan Pengadilan di Lombok: *Raad Sasak* untuk orang *Sasak* dan *Raad Kerta* untuk orang Bali dan Pengadilan tingkat Kedistrikan yang memutuskan perkara yang tidak termasuk wewenang Raad Sasak dan Raad Kerta seperti mengadakan perdamaian sengketa yang timbul di antara rakyat, hukum kurungan di bawah 12 hari dan hukuman denda di bawah f 200, untuk suku pendatang diadakan *Land raad*.

Di pulau Sumbawa sejak tahun 1924 berdasarkan *Timor Rechtsreglement* terdapat 3 (tiga) jenis pengadilan;

1. *Raad van Landshoofden* (Rapat Adat Besar) memutuskan perkara-perkara kaula *Zelfbestuur*. Pengadilan ini dipimpin oleh *Zelfbestuur*. Pengadilan ini dipimpin atau bila berhalangan, maka salah seorang anggota *Zelfbestuur* yang ditunjuk oleh *Zelfbestuurder* (Sultan) sebagai ketua (*Voorzitter*). Anggota-anggotanya terdiri dari *leden zelfbestuur* dibantu oleh *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* sebagai *leider* dan *Qandi* (Penghulu) sebagai penasehat yang memberi pertimbangan dari segi hukum agama. Pelaksanaan administrasi dilakukan oleh staf Kantor Pengadilan di bawah *Griffier*. Pengadilan ini memutuskan perkara-perkara pidana dan perdata. Vonis yang dikeluarkan dilakukan oleh Residen Timor dan daerah takluknya.
2. *Zelfbestuursgerecht* (Rapat Adat Kecil) merupakan pengadilan tunggal dan hakimnya ialah anggota *Zelfbestuur*. Pengadilan ini memutuskan perkara kejahatan dengan hukuman badan di bawah tiga bulan dan hukuman denda Rp. 500,- ke bawah dan perkara-perkara pelanggaran. Vonisnya dikukuhkan oleh *Raad van Landschoofden*.
3. *Gemeentegerecht* yang dihakimi oleh Kepala *Gemeente*, memutuskan perkara-perkara pelanggaran yang tidak termasuk wewenang *Zelfbestuursgerecht*, seperti kawin lari, kerusakan pagar tanaman mengadakan perdamaian sengketa yang timbul di antara kaula *gemeente*, hukuman kurungan di bawah 12 hari dan hukuman denda di bawah f 200,- Vonisnya dilakukan oleh *Zelfbestuursgerecht*.
14)

Pada waktu Undang-undang Desentralisasi mulai dilaksanakan di Indonesia, Pemerintah Belanda baru beberapa tahun menguasai secara langsung pulau Lombok (1895) bahkan pulau Sumbawa baru pada tahun 1905 sedang Bima dan Dompu pada tahun 1907. Pemerintah Belanda tidak masuk begitu saja, tidak cukup hanya dengan diplomasi, tetapi melalui peperang-

14). Abdurrahim SH dkk, Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, hal. 771 tahun 1975.

an yang mahal biayanya. Di Lombok saja Belanda harus membayar dengan harta benda, biaya dan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam perang Lombok Belanda menderita korban dengan jumlah yang tewas: 15 perwira (termasuk seorang Jenderal), 96 orang Eropa, 64 orang pribumi, dan jumlah yang luka: 30 orang perwira, 238 orang Eropa dan 235 orang pribumi. 15). Belum lagi prajurit-prajurit yang luka pada Perang Lombok sembuh, timbul pula Pemberontakan Gandor (Lombok Timur).

Sedangkan di pulau Sumbawa walaupun berhasil masuk melalui diplomasi dengan ditanda-tanganinya kontrak panjang pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin III (1883 – 1931), dan ditanda-tanganinya kontrak panjang oleh Sultan Muhammad Sirajuddin dari Dompu pada tahun 1886, Sultan Ibrahim dari Bima pada tahun 1905, tetapi untuk menjalankan pemerintahan dan kehendak politiknya melalui Sultan. Sebagian besar rakyat menyatakan penolakannya, tetapi karena dapat seolah-olah rakyat melawan kepada Sultan dan Belanda bertindak sebagai pahlawan membela Sultan dari kehancuran. Maka selain rakyat menderita kerugian jiwa dan harta benda juga mereka pecah belah antara sesamanya dan hubungan dengan raja mereka yang sejak berabad-abad terpadu dan seperti air dengan ikan, dengan peperangan itu menjadi rusak. Demikianlah perlawanan demi perlawanan timbul karena rakyat tidak suka kepada Belanda, mulai dari Lombok:

- 1). Perang Gandor (Kedistrikan Rarang, Lombok Timur) tahun 1898.
- 2). Perang Mamelaq (Kedistrikan Praya, Lombok Tengah) tahun 1898.
- 3). Pemberontakan Pringgabaya I (Kedistrikan Pringgabaya, Lombok Timur) tahun 1911.
- 4). Pemberontakan Pringgabaya II (Kedistrikan Pringgabaya, Lombok Timur) tahun 1913.
- 5). Pemberontakan Tuban (Kedistrikan Jonggat, Lombok Tengah) tahun 1913.
- 6). Pemberontakan Sesela (Kedistrikan Ampenan, Lombok Barat.

15). Lalu Wacana B.A. dkk., Sejarah Nusa Tenggara Barat, hal. 99 Tahun 1977.

7). Pemberontakan Batu Geranting (Kedistrikan Bayan, Lombok Barat).

Sementara itu di Sumbawa juga timbul perlawanan rakyat, seperti:

- 1). Perang Undru (Kedemungan Taliwang, Sumbawa) tahun 1906.
- 2). Perang Baham (Kedemungan Lunyuk, Sumbawa) tahun 1906 - 1907.
- 3). Perang Ngali (Kecamatan Belo, Bima) tahun 1908-1909.
- 4). Perang Dena (Kejenelian Bolo, Bima) tahun 1910.
- 5). Perang Donggo (Kejenelian Donggo, Bima) tahun 1910.

1. Pemberontakan Pringgabaya I tahun 1911

Pemberontakan ini diawali oleh terhukumnya Bapak Darwasih salah seorang pemuka masyarakat di Pringgabaya (Lombok Timur). Beliau dihukum 2 (dua) bulan penjara karena dipersalahkan berjudi mengadu ayam tanpa izin. Hukuman yang demikian dianggapnya sebagai penghinaan dan telah memilih mati dari pada hidup berputih mata. Beliau meloloskan diri dari penjara Selong dan pulang menghasut pengikut-pengikutnya yang enggan membayar pajak. Perlawanannya dapat dipatahkan dan beliau sendiri tewas ditembus peluru prajurit Belanda.

2. Pemberontakan Pringgabaya II tahun 1913.

Dua tahun berselang, pada tahun 1913 timbul pula pemberontakan Pringgabaya II dipimpin oleh Penganten Ratnayu. Pemberontakan ini disebabkan oleh karena Penganten Ratnayu menuntut balas atas dipenjaranya Guru Kepaq seorang ulama yang mempunyai pengaruh dan banyak murid di Pringgabaya. Guru Kepaq didakwa Pemerintah Belanda mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya menjadi raja. Dan karena itu hanyalah fitnah belaka yang bersumber dari laporan yang diberikan Lalu Ayup Kepala Distrik Pringgabaya, maka tindakan Belanda menghukum Guru Kepaq tanpa bukti, dianggap rakyat sangat sewenang-wenang dan sangat menyengung perasaan pengikut Guru Kepaq.

Dengan bantuan Mamiq Purwata seorang bangsawan dari Tuban, Lombok Tengah mereka mengangkat senjata kepada Kepala Distrik yang dibantu oleh prajurit Pemerintah Belanda. Reaksi murid-murid Keping yang dipimpin oleh Penganten Ratnayu menambah keyakinan Belanda bahwa apa yang dilaporkan oleh Kepala Distrik itu benar. Padahal laporan yang disampaikan oleh Kepala Distrik Pringgabaya hanya fitnah karena ia tidak senang kepada Guru Keping yang semakin berpengaruh di kalangan rakyat. Maka reaksi pengikut Guru Keping itu sebagai manifestasi ketidak-senangan dan untuk menuntut keadilan berdasarkan kebenaran.

Banyak rakyat yang bersimpati kepada Guru Keping berdatangan dari berbagai desa memberikan bantuan kepada Penganten Ratnayu. Mamiq Purwata dari Tuban Lombok Tengah, Penganten Medaq dari Suradadi, Penganten Ali dari Batu Mara, Mamiq Ocet Satraji, Penganten Nuria dan seluruh rakyat desa Bukit dan Limbungan, sebagian dari *Poh gading* dan Apitaiq berkumpul di Jejangka Pringgabaya memperkuat pasukan rakyat yang akan menyerang Kepala Distrik Pringgabaya. Pada hari pertempuran pertama jatuh beberapa orang korban termasuk Lalu Ayup, Kepala Distrik Pringgabaya luka pada pahanya. Bala bantuan dari pemerintah, baru tiba di Pringgabaya dua hari setelah pertempuran pertama. Sebelumnya Jejangka telah dikosongkan. Penganten Ratnayu dan pengikut-pengikutnya melarikan diri dan memperkuat pertahanan di Bukit dan Limbungan. Sekarang perlawanan tertuju kepada Pemerintah Belanda. Tetapi karna senjatanya yang serba tradisional pemberontakan itu dapat dipadamkan dengan segera. Penganten Ratnayu dan pengikutnya dapat ditangkap dan setelah diadili mereka dibuang ke pulau Jawa, Sumatera, dan Timor. Guru Keping sendiri dihukum seumur hidup dan dibuang ke pulau Jawa.

3. Pemberontakan Tuban Lombok Tengah.

Pada waktu penghancuran Bukit dan Limbungan, Mamiq Purwata dapat meloloskan diri kembali ke Tuban dan bersama-sama Lalu Pujut misannya mengumpulkan rakyat yang setia kepadanya untuk mempersiapkan perlawanan, tetapi sebelum mereka sempat memberikan perlawanan prajurit Belanda telah menyerang lebih dahulu. Lalu Pujut dan semua ke-

luarga Mamiq Purwata dapat ditawan dan dibawa ke Praya. Sejak itu para pemberontak terpencar-pencar karena prajurit Belanda terus mengejar mereka sehingga tidak sempat mengkonsolidasi diri. Mamiq Purwata sendiri mengembara dan bersembunyi dari kampung ke Kampung di desa Pujut.

Teman-temannya satu per satu tertangkap dan ada pula yang tewas dalam pertempuran antara lain: Lalu Badeng, tertangkap dalam pertempuran di Bagekpolak. Mamiq Migarsih tewas di Panarukan. Mereka yang tertangkap setelah diadili secara kilat dibuang ke luar daerah.

Lalu Pujut, Lalu Pama alias Mamiq Padma, Mamiq Ulan, dari Batujai, Papuq Ayu, Sirawi, Lalu Anting dan Syukur dibuang ke pulau Timor dan sebagian dibuang ke Deli (Sumatera), Guru Saleh dibuang ke Jambi.

Empat tahun kemudian setelah semua teman-temannya dibuang ke luar daerah Mamiq Purwata mulai bimbang memikirkan kepentingan keluarganya yang tertawan dan kehormatan dirinya. Beliau bimbang antara menyerah atau mati syahid. Berbagai janji yang diberikan oleh Belanda bagi siapa yang dapat menangkap beliau hidup atau mati tak seorang pun tertarik mencobanya. Akhirnya demi keselamatan keluarganya Mamiq Purwata memilih mati syahid dan dimakamkan di makam Sanggeng.¹⁶⁾

4. Pemberontakan Undru (1906 - 1907).

Kehadiran Pemerintah Belanda di pulau Sumbawa diterima dengan perasaan kesal oleh rakyat. Ketika untuk pertama kalinya pada tahun 1906 Pemerintah Belanda hendak menjalankan pemungutan pajak dan kerja rodi, secara terang-terangan rakyat menolaknya. Rakyat menganggap haram tunduk kepada Pemerintah Belanda yang kafir. Reaksi rakyat yang demikian itu menimbulkan kesulitan pada diri tiap-tiap Sultan yang dijadikan alat oleh Belanda untuk memaksakan kehendaknya. Ketika perundingan antara Sultan dengan pemimpin-pemimpin rakyat yang menentang kehadiran Belanda tidak mencapai hasil, maka Belanda pun memutuskan hendak melaksanakan kehendaknya melalui peperangan. Pertama kali perlawanan rak-

16). Lalu Wacana B.A. dkk., Sejarah Nusa Tenggara Barat, hal. 136, tahun 1977.

yat di Taliwang di bawah pimpinan Undru Dea Manurung yang dibantu oleh Datu Busing. Pusat pertahanan yang terkuat di Sapugara.

Sultan Muhammad Jalaluddin III yang sangat sayang kepada Undru mencoba melunakkan hatinya supaya menerima Belanda tetapi tidak berhasil. Akhirnya karena hasutan Belanda Sultan hilang kesabarannya. Bala bantuan segera dikerahkan dari setiap Kedemungan yang dipimpin oleh Demung masing-masing.

Taliwang diserang dari darat dan laut. Serangan dari darat dipimpin oleh Sultan Muhammad Jalaluddin III dan dari laut oleh Jenderal Swart. Pasukan Belanda yang mengira Undru dan pasukannya telah melarikan diri, sesampainya di Benteng Brangpoto menjumpai peperangan yang dahsyat. Dari kedua belah pihak menderita kerugian yang besar. Pada waktu Sapugara diserang Belanda, Datu Busing gugur dan Unru mengundurkan diri ke Gunung Ringis, dan dari sana terus mengundurkan diri ke Rarak.

Sejak anak istrinya dan pembantu-pembantunya yang setia ditawan musuh, Undru terus mengembara sampai akhirnya ia dapat ditawan di Bangkatmonte Taliwang. Dari Taliwang ia dibawa ke Makasar dan setelah dipersatukan dengan anak istrinya Undru dibuang ke Cirebon sampai meninggal dunia tahun 1921.

5. Pemberontakan Baham

Sementara Perang Undru sedang berkobar di Taliwang, Kedemungan Lunyuk pecah pula perang yang dipimpin oleh Bahan yang enggan membayar pajak kepada Belanda. Karena jumlahnya yang sangat sedikit dan senjatanya yang serba tradisional perlawanan itu dapat dipatahkan. Bahan dapat ditawan dan dibuang ke luar daerah. Setelah ia kembali dari pembuangan pada tahun 1923 ia mengangkat senjata lagi dengan pusat perlawanan di Gunung Kecamatan Lunyuk. Pembantu-pembantu utamanya antara lain: Sembang, Balum, Gunung dan Senin. Perlawanan Baham yang kedua ini meluas sampai ke Raboran di bawah pimpinan Acen. Perlawanan Baham yang kedua ini bermotif tidak mau membayar pajak. Dalam usaha memadamkan pemberontakan ini, Baham beserta pembantu-pembantunya dapat ditewaskan. Acen juga dapat ditawan dan di-

buang ke Kupang Timor sedangkan di pihak Belanda beberapa orang prajuritnya tewas. 17).

Di ujung Timur pulau Sumbawa kedatangan Belanda di Bima pada tahun 1905 diterima baik oleh Sultan Ibrahim. Walaupun pembaharuan perjanjian dengan Belanda yang berisi 16 pasal ditolak oleh beberapa anggota *Dewan Parugasuba* namun perjanjian ditanda-tangani juga pada tahun 1908. Isi perjanjian itu pada garis besarnya, Sultan Ibrahim mengakui kedaulatan Belanda di atas wilayahnya dan berjanji untuk tidak akan bekerjasama dengan orangkulit putih lainnya dan akan memberikan bala bantuan kepada Belanda bila diperlukan serta tidak akan menyerahkan wilayah kesultanan Bima kepada orang kulit putih lainnya. Sedangkan sesuai dengan pasal 11 Surat Perjanjian tersebut Pemerintah Belanda akan tetap menghormati adat-istiadat yang berhubungan dengan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan Maulud yang berlaku di Kesultanan Bima. Perjanjian ini disahkan oleh 'Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 6 Pebruari 1908 di Batavia. Orang-orang bangsawan yang tidak menyetujui perjanjian itu keluar dari Bima dan menyebar di Kejenelien Bolo, Donggo, Belo, dan Sape. Ketika Pemerintah Belanda melaksanakan penarikan pajak dan mengenakan kerja rodi bagi rakyat maka rakyat Bima pun mulai gelisah. Berbagai jenis pajak seperti pajak hewan, pajak tanah dan pajak kepala dirasakan oleh setiap rakyat terlalu berat. Perampasan tanah dan hewan yang dikenakan kepada setiap orang yang tidak dapat membayar pajak telah menyinggung perasaan rakyat dan mencurigai iktikad Sultan. Selain itu juga beberapa hukum adat dan hukum agama tidak dilaksanakan dengan murni. Semua yang berhubungan dengan perundangan-undangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Hindia Belanda.

Rakyat Bima yang secara turun-temurun mengikuti perundangan-undangan berdasarkan hukum Islam, tidak mau menerima perundang-undangan baru yang didasarkan perundang-undangan hukum Hindia Belanda, maka golongan bangsawan yang tidak senang kepada Belanda bersama-sama rakyat meminta pertanggungjawaban Sultan Ibrahim. Terutama Kejenelien Belo, Kae, Donggo dan Monte menentang keputusan Sultan Ibrahim

17). Lalu Wacana B.A., dkk., Sejarah Nusa Tenggara Barat, hal. 140-141, tahun 1977.

yang mengharuskan rakyat tunduk kepada Pemerintah Belanda. Sultan Ibrahim mencoba melemahkan pendirian kelima Kejenelian itu dengan mengadakan rapat di Palibeli tetapi tidak berhasil. Bahkan para Jeneli dan Gelarang dari kelima Kejenelian itu mengancam akan mengangkat senjata bila Sultan bermaksud hendak memaksakan perundang-undangan Hindia Belanda atas mereka. Situasi di Kesultanan Bima dilaporkan oleh Sultan Ibrahim kepada Pemerintah Belanda di Jakarta yang segera mengirim bala bantuan ke Bima sehingga Perang Ngali tidak dapat dihindari lagi.

6. Perang Ngali (1908 - 1909).

Hubungan yang runcing antara rakyat Ngali dengan Sultan Ibrahim telah mendorong Gelarang Ngali *Selasa Ompo Kapa* untuk menghimpun kekuatan bersama-sama kaum bangsawan yang dipimpin oleh Abbas Daeng Manasa dan golongan alim ulama Haji Yasin, Haji Said dan Syeky Abdul Karim al Pogodadi. Mereka bersama-sama menghimpun massa, bukan saja dari desa Ngali tetapi juga dari desa-desa lainnya di Kejenelian Belo. Selama tiga hari tiga malam mereka melakukan takbir keliling desa tanda dimulainya perang sabil melawan Pemerintah Belanda. Takbir dan Tahlil inilah yang mereka pakai untuk mengobarkan semangat rakyat yang sudah meluap-luap menanti kedatangan serangan Belanda. Mereka semua berteakat untuk mati syahid di jalan Allah.

Setelah Sultan Ibrahim dua kali mengirim utusan tidak berhasil mengurungkan maksud mereka untuk mengangkat senjata kepada Belanda, maka Ngalipun diserang dari darat dan laut dengan pasukan yang berkekuatan 10000 orang. Kontak senjata yang pertama kali terjadi di Talabiu. Tentara Belanda membuat kubu pertahanan di Kalate Tente.

Dari tempat ini tentara Belanda dapat mengawasi desa Ngali lewat alat teropong. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak menderita kerugian beratus-ratus orang tewas termasuk Letnan Kolonel Vasteneur, panglima tentara Belanda. Dari pihak rakyat gugur Salasa Ompo Kapa'a pemimpin rakyat Ngali dan Sulaiman Amna Jawa, maka pimpinan perlawanan rakyat di ambil alih oleh Haji Yasin. Sementara desa Ngali dikosongkan, mereka mengungsi ke gunung-gunung antara lain ke gunung Sambori. Pada bulan Nopember 1908 Belanda meninggalkan

Kalate Tente dan memusatkan pertahanannya di pantai Bima. Pada tanggal 6 Desember 1908 pada malam hari rakyat Ngali mendapat bantuan dari Kejenelian Bolo, Donggo, dan Kae menyerang perkemahan Belanda itu. Karena kekalahan ini Residen Michael di Makasar mengirim tiga kapal perang dengan 1800 orang serdadu ke Bima dan baru tiba di Bima tanggal 7 Januari 1909. Setelah tentara itu diperkuat dengan 300 orang pasukan dari Sultan dan sejumlah perbekalan, mereka berangkat menyerang Ngali di bawah pimpinan Letnan Kolonel de Brouw. Desa Ngali diserang dari timur dan utara. Rakyat Ngali mengadakan perlawanan dengan gigih di antara rumah-rumah yang terbakar. Dibawah pimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Said Abu Tolu dan Haji Kasim Abu Iye. Karena kekuatan yang tidak seimbang akhirnya rakyat Ngali menyerah, Haji Muhammad Said Abu Tolu dan Haji Yasin, Abu Iye ditangkap dan dihadapkan kepada Sultan. Kepada kedua mereka itu masing-masing dihukum membayar denda 70 ekor kerbau jantan.

7. Perang Dena 1910.

Walaupun Perang Ngali telah berakhir dan menimbulkan korban jiwa serta harta benda yang tidak sedikit, tetapi tokoh-tokoh rakyat Dena di Kejenelian Bolo dan tokoh-tokoh masyarakat Kala di Kejenelian Donggo tetap mempertahankan pendiriannya untuk tidak menerima kedatangan Belanda karena segan melakukan rodi, sehingga Perang Dena tidak dapat dihindari lagi. Di bawah pimpinan Haji Abdurrahim Abu Syara, Haji Usman Abu Beda dan Haji Abdul Azis, rakyat Ngali memaklumkan perang kepada Belanda pada bulan Maret 1910.

Tentara Belanda segera didatangkan dari Makasar sejumlah 1000 orang dengan dua kapal perang, di bawah pimpinan Letnan Kolonel G.P. King.

Ekspedisi Belanda itu mendarat di pelabuhan Bima pada tanggal 2 April 1910 dan langsung menuju ke Dena. Pertempuran sengit segera terjadi di Karia Hua. Dari pihak rakyat Dena menderita korban meninggal tokoh-tokoh mereka yaitu: Haji Usman Abu Besa, Haji Abdurrahim Abu syara dan Lede Hamai-bu. Desa Dena dibakar, tetapi sebelumnya rakyat telah menyingkir ke Uibulu. Dengan petunjuk rakyat Dena yang sudah ditawan pasukan Belanda dapat menemukan markas rakyat yang dipimpin oleh Haji Abdul Azis. Karena sergapan yang menda-

dak itu tokoh-tokoh rakyat Dena, Haji Abdul Azis, Abu La Saeah, Haji Mustafa, Abu La Hawa dan Muhammad Amajena dapat ditawan pasukan Belanda.

Kepada mereka yang ditawan baru dilepaskan kembali setelah menandatangani Surat Perjanjian yang berisi:

- 1). Rakyat Dena harus mengakui kekuasaan Belanda dan tidak akan melakukan perlawanan yang kedua kalinya;
- b). Tokoh-tokoh Perang Dena masing-masing harus membayar ganti rugi sebesar 100 ringgit.

Surat Perjanjian ini ditandatangani di *Wadu - bera* 3 km dari Dena.

8. Perang Kala 1910.

Seperti rakyat Ngali dan rakyat Dena rakyat Kala di Kejenelian Donggo juga tidak bersedia membayar pajak dan kerja rodi. Di bawah pimpinan Ntehi Ama Ntihi dan Ncahu Samiu seorang wanita rakyat Kala menolak setiap perintah Sultan. Karena pembangkangan ini dengan 200 orang pasukan berkuda yang diperkuat oleh beberapa ratus tentara Belanda Sultan Ibrahim langsung memimpin penyerangan ke Kala, dan setelah pertempuran di gunung-gunung yang memakan korban ratusan jiwa dari kedua belah pihak, akhirnya Ntehi Ama Ntihi dapat ditawan kemudian dibuang ke Makasar.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN ATAU PUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI PROSES ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH.

Setelah Pemerintah Hindia Belanda selesai menyusun pemerintahan, maka sambil memadamkan dan menghancurkan perlawanan rakyat yang menghalangi usahanya, Pemerintah Belanda memperluas pelaksanaan politik etikanya dengan usaha kesejahteraan bagi rakyat banyak. Usahanya yang diutamakan sekali kebersihan, keamanan, kesusilaan, kemakmuran dan kecerdasan. Semua pejabat pemerintah, Kepala Swapraja dan Kepala Distrik diperintahkan supaya selalu mengatur kebersihan kampung, pasar, dan jalan agar penyakit tidak berjangkit. Setiap orang tidak lagi bebas pindah dan berkelana tanpa tujuan tertentu. Rakyat dilarang menyelenggarakan perjudian

dan mengisap candu, kecuali bagi yang sudah kecanduan. Setiap orang tidak bebas berdakwah, kecuali dengan izin Kepala Distrik. Pengemis dan penganggur harus diurus dan ditampung serta diusahakan pekerjaan oleh Kepala-kepala Distrik.

Jaringan irigasi, jaringan jalan, jembatan dan pasar dibangun di seluruh wilayah yang memudahkan orang bepergian dari desa ke kota atau sebaliknya. Hal ini menimbulkan beberapa jenis mobilitas kehidupan masyarakat, baik secara geografis maupun sosiologis. Untuk melindungi rakyat dari rentenir, Pemerintah Belanda membuka Rumah Gada di Ampenan dan Kantor Bank di Mataram, Sumbawa besar dan Bima. Bank-bank yang beroperasi di ketiga kota tersebut di atas yaitu *Volkscrediet Bank*, *Handelsbank* dan *Balische Volkscredietbank*.

Akibatnya selain peningkatan produksi hasil pertanian juga telah memudahkan arus perdagangan dan bertambah banyaknya kontak dengan orang luar, memberi pengaruh juga bagi pertumbuhan kebudayaan di daerah. Mobilitas geografis telah ikut menyebarkan unsur-unsur kebudayaan luar yang mewarnai kebudayaan tradisional. Proses akulturasi dipercepat dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak untuk memasuki sekolah sistem Belanda. Dari mereka inilah muncul golongan yang mulai meragukan keunggulan sistem masyarakat tradisional dalam mencapai kesejahteraan hidup yang dikehendaki. Melalui pelajaran sosial dan ceritera di sekolah yang diterimanya dari guru-guru yang berasal dari luar lingkungan kebudayaan ibunya, mereka mendapat pandangan baru yang membina dan membentuk jiwa mereka yang berbeda dengan yang diinginkan oleh golongan tua. Sehingga sebahagian dari mereka terlibat dalam konflik dengan orang tua. Mereka yang beruntung mendapat tempat di Kantor dan Perusahaan, dapat meningkatkan status sosialnya setingkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal ini memberi dorongan kepada orang tua untuk memasukkan sekolah anaknya untuk mengejar status yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Lebih-lebih setelah mereka melihat bahwa pengangkatan pegawai di Kantor-kantor tidak didasarkan kepada keturunan tetapi kepandaian-kepandaian ilmu dan pengalaman yang mereka miliki, telah meningkatkan kesadaran masyarakat.

Keadaan yang sama juga dialami oleh para ulama dan pemimpin agama. Bukanlah keturunan yang dipentingkan wa-

laupun sering juga kejadian anak seorang ulama menjadi ulama pula, tetapi keunggulan dalam ilmu agama atau ketinggian mistik. Dalam proses pengadaptasian agama ke dalam struktur sosial dan politik tradisional keunggulan dalam ilmu agama ini pada beberapa masyarakat di tanah air kita juga dilembagakan. 18).

Di pulau Lombok dan Sumbawa tokoh Tuan Guru mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan masyarakat. Pengaruhnya sangat besar melebihi pengaruh pejabat sekuler. Ajaran dan fatwanya selalu dijadikan pedoman oleh pengikutnya dalam berbuat, baik yang menyangkut agama maupun duniawi. Melalui pengajian yang mereka selenggarakan dalam bentuk pesantren telah memperluas dan mempercepat jaringan pengaruhnya sampai jauh ke luar desanya. Dari padanya muncul tokoh-tokoh muda yang fanatik yang tidak mengenal kompromi dengan kebudayaan lama, sehingga cenderung tumbuh dan berkembang dilandasi oleh pandangan Islam. Hal ini memberi kesadaran kepada masyarakat untuk menyempurnakan agamanya dalam segala bidang. Transportasi yang semakin lancar menyebabkan rakyat lebih banyak ke luar, terutama bagi mereka dapat lebih mudah pergi ke Mekkah menunaikan Haji dan bermukim disana bertahun-tahun lamanya. Sekembalinya dari Mekkah mereka membuka pesantren di kampungnya. Dan karena murid-muridnya berdatangan dari segala desa, maka daerah jangkauan pengaruhnya sampai ke luar desa. Hubungan guru dan murid berlanjut terus. Seseorang murid merasa mempunyai kewajiban moral untuk melanjutkan hubungan dengan gurunya serta selalu memelihara hubungan persaudaraan dengan sesama murid.

Demikianlah pesantren merupakan sumber kekuatan yang mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi yang sewaktu-waktu bila tersinggung dapat menimbulkan ancaman bagi kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda seperti pada Pemberontakan Pringgabaya II, Perang Ngali dan Perang Dena. Oleh karena itu di Nusa Tenggara Barat, ulama selalu dijauhi oleh Pemerintah Belanda. Sejak awal sampai akhir pemerintahan Belanda para ulama tidak pernah bekerja sama dengan Belanda. Pemerintah Belanda malah mendekati golongan adat untuk melindungi dirinya

18). Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid V, hal. 176 tahun 1975.

dari kekuatan agama. Golongan adat yang merasa pengaruh dan kepentingannya terancam menjauhkan dirinya dari para ulama. Memang para ulama selalu menganjurkan persamaan dan persaudaraan tanpa membedakan harta dan keturunan. Menurut ajaran mereka harkat dan martabat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya. Ajaran mana sangat menyinggung dan merugikan golongan adat dan penjajah Belanda.

C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI.

1. Politik

Pada awal sampai dengan dua windu abad ke-10 penduduk Nusa Tenggara Barat masih buta politik. Baru kira-kira pada tahun 1916, untuk pertama kali Sarekat Islam masuk di Lombok yang diantar langsung oleh H.O.S. Cokroaminoto pada tahun 1916.¹⁹⁾ Pengikutnya kebanyakan dari rakyat tadi. Penyebarannya cepat sekali dan masuk sampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil. Tetapi bentuknya tidak terorganisasi, hanya merupakan anggota tersiar. Di pulau Sumbawa, Sarekat Islam masuk pada tahun 1918, dan di Bima organisasi ini dibawa oleh Syekh Muhammad.

Karena pengawasan yang keras dari Pemerintah Belanda, Sarekat Islam tidak dapat berkembang dan kegiatannya terbatas pada bidang sosial seperti kematian dan lain-lain. Tokoh Sarekat Islam yang terkenal di Lombok dan yang berjasa menarik simpati rakyat terhadap Sarekat Islam ialah Raden Gde Hukum, Mamiq Wiranata dan Raden Gde Nuraksa. Tokoh Sarekat Islam Nusa Tenggara Barat yang terakhir ini sempat menghimpun potensi rakyat yang berpusat di Pancor. Oleh karena solidaritas antara teman seperjuangan pada zaman itu disebut *Zaman Saudara*.

2. Sosial

Dua tahun setelah Sarekat Islam, pada tahun 1918 masuk pula Muhammadiyah ke Lombok, yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Sumatera. Karena fahamnya yang moderat Mu-

19). Wawancara dengan Lalu Wirantanus, tanggal 22 - 7 - 1978.

hammadiyah lebih terkenal dengan nama *Kaum Muda*. Dengan ajarannya yang baru bagi masyarakat awam, Muhammadiyah tampil untuk membersihkan agama dari segala unsur yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist.

Muhammadiyah berusaha menghapus taqlid dan menganjurkan ummat Islam agar mempelajari agama secara rasional. Seperti halnya di Lombok, di Sumbawa Muhammadiyah semula kurang mendapat sambutan dari masyarakat tetapi berkembang pesat setelah tahun 1937. Muhammadiyah kurang mendapat sambutan, karena sebagian besar masyarakat menganggap Muhammadiyah bertentangan dengan ajaran Islam yang selama ini mereka kenal. Anggota Muhammadiyah hanya terdapat di kota-kota tertentu saja seperti di Ampenan, Tanjung, Pohgading dan jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Penerimaan masyarakat tidak secepat Sarekat Islam.

3. Wanita

Sebelum dasawarsa ketiga abad ke-20 wanita di Nusa Tenggara Barat masih hidup dalam pingitan. Memang ada juga yang bersekolah, tetapi kebanyakan tamat kelas III, kadang-kadang diberhentikan orang tuanya sebelum tamat. Kalau ada yang disekolahkan di HIS seperti puteri sulung Sultan Bima, langsung masuk pingitan, setelah tamat. Pemerintah Belanda juga berusaha hendak melonggarkan tradisi ini dengan mendirikan *Meisjesschool* pada tahun 1921 di Bima, tetapi juga hasilnya sedikit sekali. Wanita-wanita pada saat itu belum mampu mendo-brak tradisi lama. Sebagian besar masyarakat pada masa itu memandang aib, jika wanita yang tampil di muka umum tanpa di-dampingi orang tua atau suaminya. Maka berkat bimbingan dr. R. Sujono atas istrinya Baiq Rumita, puteri Kepala Distrik Rarang yang buta huruf telah memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa asal diberi kesempatan wanita pun dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam masyarakat. Sebagai istri seorang dokter, beliau telah memulai segala-galanya dari buta huruf. Dari suaminya beliau mempelajari bahasa Belanda sehari-hari dan belajar tulis baca. Dalam tempo yang singkat beliau dapat membaca dan menulis serta mempergunakan bahasa Belanda dengan baik. Pergaulannya pun mulai meningkat sewaktu dr. R. Sujono dipindahkan ke Madiun karena memimpin golongan *Sapuq Puteq*. Di Jawa, Baiq Rumita mem-

perluas pergaulannya dengan para istri priyayi dan ambtenar Belanda. Beliau mempelajari renang dan senam dan berhasil mencapai juara I renang yang diselenggarakan untuk seluruh Jawa pada tahun 1937. Karena sukses yang dicapainya ini memberi kesadaran kepada masyarakat di Lombok, bahwa wanita pun bila diberi kesempatan dapat menyamai laki-laki di dalam segala bidang. Sekembalinya dari Jawa banyak sekali anak-anak wanita yang beliau kumpulkan dan sekolahkan serta berhasil di dalam pendidikan. Mereka itu merupakan pelopor pergerakan wanita pada hari dewasanya, antara lain Nyonya Salamah Sahak dan Nyonya Salamah Suyatim, yang terakhir ini merupakan tokoh Aisyiah sampai sekarang.

Setelah dr. R. Sujono meninggal dunia, Baiq Rumita menetap di Tetebatu, suatu pesanggrahan yang dibuat bersama suaminya, sepulangnya dari Jawa. Beliau meninggal tahun 1969 dan dimakamkan di halaman Mesjid Embungpapak - Selong di lingkungan kubur keluarganya.

4. Agama.

Penduduk pulau Lombok dan Sumbawa kebanyakan beragama Islam. Hanya sebagian kecil saja yang beragama Hindu, Budha dan animis (fetis). Sebelum agama Islam masuk di Lombok penduduk menganut agama Hindu dan Budha sedangkan di pulau Sumbawa kebanyakan agama fetis dan selebihnya Hindu. Agama Islam masuk di Lombok pada awal abad ke-16 yang dibawa oleh Sunan Prapen putera Sunan Giri. Setelah mengadakan perjalanan ke Lombok beliau meneruskan tugasnya ke pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa selain mendapat pengaruh agama Islam dari Jawa juga dari Sulawesi pada awal abad ke-17.

Penduduk pulau Lombok yang tidak mau memeluk agama Islam menyingkir ke gunung-gunung dan daerah yang terisolasi seperti Tebango, Pengantap, Ganjar, Tendaun dan Pejaraakan Ampenan. Mereka kebanyakan menganut agama Budha dan selebihnya Hindu. Penduduk pulau Sumbawa yang tidak mau memeluk agama Islam menyingkir ke gunung-gunung yang kemudian lebih terkenal dengan nama orang Donggo. Mereka hanya percaya kepada banyak rokh, rokh baik dan rokh jahat yang berdiam di gunung, pohon, batu, matahari, laut dan sebagainya, yang disebut *Dewa*. Mereka memanggil rokh-rokh itu kalau mereka memerlukan pertolongan. Tiap tahun pada bulan

baru yang pertama, setelah panen, orang Donggo mengadakan pesta besar yang disebut *Raju*. Upacara ini diawali dengan mengarak keliling kampung seekor anjing hitam yang disebut *Raju*, asal dari nama pesta itu sambil dipukul dengan rotan. Kemudian semua orang tua, muda, laki, perempuan pergi berburu ke gunung yang jauh. Setelah 3 (tiga) hari mereka kembali ke kampung dan turun ke laut pada hari ke empat. Sisa-sisa dari makanan di gunung dibawa serta dan dibuang ke laut.

Penganut Islam di Lombok terbagi dalam dua golongan yang disebut *Islam Waktu Telu* dan *Islam Waktu Lima*. Keduanya mempunyai perbedaan yang prinsipial. Menurut ajaran Islam Waktu Telu ini, bahwa yang bukan kiyai tidak boleh sembahyang.

Jadi yang wajib melakukan sembahyang hanyalah kiyai dan penghulu. Mereka hanya mengakui tiga rukun saja dari kalima rukun Islam, yaitu syahadat, sholat dan puasa, dan tidak mengharamkan minuman keras. Sehingga tidak mengherankan sejak awal abad ke-20 m mereka mendapat serangan yang sengit dari golongan Islam Waktu Lima, mereka membentuk suatu persatuan yang disebut *Gerakan Dewi Anjani*. Pada dasawarsa kedua abad ke-20 golongan ini juga melancarkan pembangkangan terhadap Pemerintah Belanda, yaitu enggan melakukan kerja rodi dan membayar pajak. Golongan Islam Waktu Telu ini juga terkenal dengan nama *Islam Sapuq Puteq*, karena memakai sapuq puteq (ikat kepala putih) sebagai identitas mereka. Golongan Islam Waktu Telu atau Sapuq Puteq ini sangat terkenal jujur dan taat kepada pimpinan. Sekitar tahun 1927 tokoh-tokoh Sapuq Puteq yang terkenal seperti dr. R. Sujono dan Mamiq Fadelah. Karena pengaruhnya yang membahayakan Pemerintah Belanda, dr. R. Sujono dipindahkan ke Madiun Jawa Timur. Dan Mamiq Fadelah diangkat kembali menjadi Kepala Desa Dasan Lekong.²⁰⁾

Karena kegigihan para Tuan Guru yang tidak kenal putus asa untuk mengembalikan ajaran agama yang benar seperti tuan Guru Haji Umar Kelayu, Tuan Guru Haji Badarul Islam Pancor, Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Saleh Hambali bengkel, Tuan Guru Haji Abdulkarim Kediri, dan lain-lain maka jumlah pengikut Waktu Telu semakin susut.

20). Wawancara dengan Mamiq Fadelah, tanggal.

Di pulau Sumbawa sampai pada akhir dasawarsa ketiga abad ke-20 agama Islam masih belum maju. Penganut-penganutnya memang fanatik tetapi sebagian kurang memberatkan syariat agama. Hanya karena kegigihan para Sultan dan imam istana syiar Islam tetap dapat dipertahankan.

Agama kedua terbesar penganutnya setelah Islam ialah agama Hindu yang dipeluk oleh orang Bali yang berdiam di Lombok Barat. Mereka datang ke Lombok secara berangsur sejak tahun 1694. Dari khir abad ke-17 sampai akhir abad ke-19 kekuasaan di Lombok dipegang oleh raja-raja Bali yang beragama Hindu yang memungkinkan agama Hindu berkembang terus. Selebihnya adalah agama Budha yang terdapat di Tebango, Tendaun, Ganjar, Pengantap dan Taqun; semuanya di Lombok Barat. Agama Kristen dan Roma Katolik juga ada, dan penganutnya kebanyakan pendatang baru yang bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Di Lombok karena kefanatikan adat dan agama di pulau Sumbawa selain kefanatikan rakyat juga karena Sultan melarang penyebaran agama Kristen dikalangan rakyat yang sudah beragama Islam maka agama Kristen tidak berkembang di kedua pulau tersebut. Tetapi Pemerintah Belanda berhasil mengkristenkan sebagian orang Donggo di desa Mba-wa yang beragama fetis.

Kebudayaan di Lombok kebanyakan dipengaruhi oleh unsur animisme, Budha dan Hindu dari pada Islam. Hal ini tampak benar pada adat-istiadat, kesenian, lingkaran hidup (*life cycle*) dan perkawinan mereka. Setiap peralihan waktu para individu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat lain, biasanya diadakan selamatan atau upacara yang merayakan saat peralihan itu. *Crisis-rites* (upacara waktu kritis) atau *rites de passage* (upacara peralihan) seperti upacara masa hamil, upacara kelahiran, upacara turun tanah, upacara pemberian nama, upacara pemotongan rambut pertama kali, upacara memasah gigi, upacara khitanan yang bermaksud menolak bahaya gaib yang mengancam individu dan lingkungannya masih tetap dijalankan. Demikian pula upacara minta hujan, upacara minta keselamatan di tempat pemujaan pra Islam masih tetap dilaksanakan, terutama oleh golongan ummat Islam Waktu Telu di Lombok.

Maka sejak kebangkitan Islam kembali di Lombok pada abad ke-20 yang dipelopori oleh para Haji dan alim ulama

selain meningkatkan tauhid dan menegakkan syariat agama Islam juga di kecarnya adat-istiadat dan kesenian, terutama yang berhubungan dengan seni tari dan seni musik *perkusi* dan tiup yang instrumennya terbuat dari perunggu dan suling. Dan sebagai gantinya ialah dikembangkan rebana yang instrumennya terbuat dari kayu dan *jangat*. Juga seni *rudat* dikembangkan untuk pertama kali pada tahun 1920 oleh Haji Lalu Moh. Said di Kopang (Lombok Tengah) sekembalinya dari Mekkah.

Sebaliknya di pulau Sumbawa pemerintahan sebelum abad ke-20 didasarkan kepada hukum adat dan hukum syara', maka kebudayaannya diwarnai oleh agama Islam, kecuali masyarakat Donggo yang tetap menganut agama fetis. Pengaruh agama Islam sangat besar dan meluas dalam hidup dan alam pikiran rakyat di pulau Sumbawa. Dan ketika kontak dengan dunia luar semakin lancar terutama antara Mekkah dan Indonesia maka banyaklah orang Sumbawa yang pergi Haji yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kebudayaan yang dipengaruhi Islam.

5. Pendidikan.

Sebelum akhir abad ke-19 di pulau Lombok dan Sumbawa tidak ada sekolah atau lembaga pendidikan formal. Baru lah setelah Belanda berkuasa di sana sekolah-sekolah mulai didirikan. Pertama kali Belanda mendirikan *Volkschool* di tiap ibukota *Onderafdeeling* dan di beberapa ibukota Kedistrikan. Pada tahun 1918 *Volkschool* yang terdapat di ibukota *Onderafdeeling* diubah dan disempurnakan menjadi *Vervolgschool*. Murid-murid yang tamat *Vervolegschool* dapat melanjutkan ke *Normaalschool* di Makasar. Untuk anak-anak orang terkemuka HIS didirikan di Bima pada tahun 1919 dan di Mataram pada tahun 1923. Anak-anak tamatan HIS yang melanjutkan ke Mulo harus ke Jawa atau Makasar. Anak-anak yang akan masuk HIS diseleksi oleh Asisten Residen. Khusus bagi gadis-gadis Belanda mendirikan *Meisjesschool* di Bima tahun 1921. Karena kesulitan tenaga guru, maka untuk memenuhi kebutuhan guru didirikan pula *Cursus Voor Onderwijzers* (CVO) di Mataram, Sumbawabesar dan Bima.

Sementara itu lembaga pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh para ulama Islam berupa pesantren seperti yang terdapat di Pancor, Kelayu, Tanjung, Kopang, Praya, Kediri,

Bengkel dan Pagutan. Pesantren itu didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi anak-anak Islam dalam rangka usaha menegakkan dan meninggikan mutu agama Islam. Pelajaran yang diberikan selain membaca dan menulis huruf arab, juga diajarkan *aqidah*, *tauhid*, *ushul* dan *fiqh*, ilmu nahu dan syaraf. Pondok pesantren yang tertua antara lain yang terdapat di Pagutan, Kopang pada tahun 1919 yang didirikan oleh Sayid Alwi dan di Kediri didirikan oleh Tuan Guru Haji Abdulkarim tahun 1924. Di Raba Bima didirikan pula oleh Sultan Bima pesantren *Darul Tarbiyah*. Gurunya di-datangkan dari Makasar dengan jumlah murid untuk pertama kali 20 orang. 21). Pelajaran yang diberikan antara lain ilmu agama dan Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum tahun 1930 Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat belum ada aktivitasnya. Begitu juga Taman Siswa tidak pernah ada usahanya untuk mendirikan sekolah di Nusa Tenggara Barat. Misi dan Zending pun belum pernah berusaha untuk mendirikan sekolah, karena disadari benar bahwa sulit akan mendapat sambutan dari masyarakat. Pada masa itu jangankan badan yang terang-terangan menyebarkan agama Nasrani akan mendapat sambutan masyarakat, sekolah yang didirikan oleh pemerintah saja sulit mendapat murid. Sebahagian masyarakat pada waktu itu masih menganggap sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda adalah sekolah kafir dan beberapa di antaranya menarik anaknya dari sekolah. Maka supaya sekolah terselenggara dengan baik, di Sumbawabesar Pemerintah Belanda menunjuk beberapa orang menjadi mandor sekolah yang bertugas mengurus anak-anak yang absen. 22).

6. Kesenian

Setelah aktivitasnya terganggu sebentar pada tahun-tahun akhir abad ke-19 dan tahun-tahun pertama awal abad ke-20 akibat timbulnya perang yang silih berganti, maka setelah pertengahan dasawarsa abad ke-20 aktivitas kesenian mulai timbul kembali. Selain sifat meneruskan kesenian masa sebe-

21). Wawancara dengan M. Saleh Ntobu, tgl. 22 s/d 25 Nopember 1978

Wawancara dengan A.D. Talu, tgl. 22 s/d 25 Nopember 1978.

Wawancara dengan H.M. Thayeb Abdullah, tgl. 22 s/d 25 Nopember 1978

22). Wawancara dengan L. Mala Abd. Majid, tanggal 30 - 9 - 1978

lumnya juga timbul kreasi-kreasi baru akibat adanya akulturasi dengan kebudayaan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini terlihat pada hasil seni bangunan yang semakin lama meninggalkan langgam bangunan tradisional.

Bangunan mesjid yang sebelumnya hanya merupakan sebuah bangunan ruangan bujur sangkar tanpa serambi, atapnya ditunjang oleh empat buah tiang utama yang disebut soko guru. Di tengah-tengah sisi barat dari ruangan bujur sangkar terdapat sebuah ceruk yang disebut *mihrab* tempat yang disediakan untuk imam (pemimpin sholat). Di sebelah kanan mihrab disediakan mimbar yang terbuat dari kayu tempat khatib berkhotbah sebelum sholat Jum'at. Akibat pengaruh arsitektur Eropa banyak mesjid-mesjid lama yang dirombak dan dibangun permanen menurut gaya Islam dan India dengan mendirikan menara di samping kanan muka mesjid tempat bilal menyerukan azan setiap waktu sholat tiba. Namun beduk tetap dipergunakan yang dipukul setiap tiba waktu sholat dan tiap kali dipukul sebanyak rokaat sholat yang bersangkutan.

Pagar halaman yang semula hanyalah pagar bambu atau pagar hidup kemudian diubah dengan pagar tembok yang memakai pintu gerbang langgam lama. Yang menarik ialah letak mesjid selalu di tempat mesjid lama dan dibangun selalu lebih besar lebih indah daripada rumah penduduk. Di mihrab atau mimbar diberi hiasan kaligrafi yang diukir indah di atas sepotong kayu atau papan.

Mengenai bangunan tempat tinggal selain meneruskan arsitektur tradisional, bagi rakyat yang mampu mulai membangun rumahnya menurut pola dan gaya Eropa. Menurut rumah tradisional di Lombok dibangun di atas fondasi yang tinggi, atapnya terbuat dari alang-alang dan berbentuk rumah kampung yang rendah menutup bedek dari pandangan ditunjang oleh tiang-tiang kayu gelondong yang tertawan dalam di bawah fondasi yang tinggi akibatnya ruangan menjadi gelap karena tanpa jendela. Serambinya merupakan *ampilan* yang ditambah pada bangunan induk dan tidak diberi dinding. Demikian pula bangunan rumah tradisional di Sumbawa berbentuk rumah panggung dengan lantai papan atau bambu berlangsung terus, kecuali atap sejak awal abad ke-20 sudah ada yang mengubahnya dengan genteng atau seng.

Mengenai seni-rupa, sejak penduduk Pulau Lombok dan Sumbawa masuk Islam tidak membolehkan membuat lukisan mahluk

hidup, terlebih lukisan manusia. Menurut kepercayaan mereka, rumah yang ada patung di dalamnya tidak akan dimasuki Malaikat. Dengan demikian seni patung hanya terdapat di Lombok Barat saja karena sebagian besar penduduknya beragama Hindu. Di kalangan penduduk yang beragama Islam ada kalanya menghasilkan seni patung yang berbentuk binatang dalam ukuran kecil biasanya dipergunakan untuk hulu pisau. Kepandaian pahat memahat yang diwariskan oleh nenek-moyang, sejak Islam menjadi terbatas pada kegiatan seni ukir hias saja dan kebanyakan untuk hiasan batu nisan. Sedangkan untuk mesjid hanya mimbar atau tiangnya saja. Untuk seni hias terdiri atas pola daun-daunan, bunga-bunga, sulur dan kaligrafi. Tradisi menghias batu nisan ini berlangsung terus terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai sumber batu padas.

Aktivitas seni tari pun bangkit kembali setelah menghilang beberapa tahun lamanya. Di samping sebagai perkembangan seni tari masa lampau juga merupakan kreasi baru. Seni tari seperti di Lombok: *legong*, *arja*, *pakon*, *tandak geroq*, *oncer*, *gandrung*, *rudat*, *kayaq* dan *barong tengkok*, di Sumbawa *tari tanak*, *sampa*, *toja*, *lenggo*, *mpa-a*, *kanya*, *sere soka*, *jarasara-u*, *mpa-a lepi wei*, *manca*, *silu*, *kantao*, *weha*, *ani*, *mpisi donggo*, dan *ncala*. Kreasi baru di Lombok: *telek*, *cupak*, *batok baris*, *kayaq*, dan di Sumbawa *Kadra*. Kehidupan kesenian berkaitan sangat erat dengan kehidupan adat dan khusus bagi penduduk yang beragama Hindu tidak ada upacara adat dan agama yang dapat berlangsung tanpa kesenian. Perkembangan seni tari dan seni gamelan di Lombok berjalan sejajar, sehingga pada tiap malam Senin dan Jum'at suara gamelan yang berlatih terdengar hampir di setiap desa. Latihan malam Jum'at sering mengganggu dan sangat menyinggung perasaan ulama, santri dan rakyat yang taat beribadah, karena bagi mereka malam Jum'at adalah malam kudus yang harus banyak diisi dengan sholat sunat dan bacaan-bacaan serta doa kepada Allah. Kejengkelan mana akhirnya berakibat ulama anti kepada kesenian tradisional.

Di Pulau Sumbawa khususnya di Bima, orang-orang yang menyelenggarakan kesenian dimasukkan ke dalam pejabat adat dan memperoleh sawah adat sebagai sumber penghasilannya. Oleh karena itu perkembangan seni-tari di Pulau Lombok dan Sumbawa sangat baik. Selain seni-tari, seni-suara vokal ataupun instrumental berkembang juga, baik yang lama maupun yang baru, di antara-

nya seperti: *tawaq, gong beleq, gong suling, cungklik, klenang, pereret, suling puput, genggong selober, sekeco, lawas, rebana, mu-a, kalero*, dan lain-lain. Seni pedalangan pun berkembang dengan baik berhubung dengan fungsinya yang sangat penting bagi agama. Wayang Sasak pada awal perkembangannya selain sebagai hiburan juga sebagai alat dakwah. Begitu juga wayang Bali penting sekali untuk upacara ruwatan. Beda kedua wayang selain dari bentuk, instrumen pengiringnya dan bahasanya juga lakonnya. Wayang Sasak melakonkan cerita Amir Hamzah dalam bahasa Jawa Madya dan Sasak, wayang Bali melakonkan Ramayana atau Mahabarata dengan bahasa Jawa Kuno dan Bali. Bersama dengan seni pedalangan berkembang pula seni tembang. Di Lombok seni tembang merupakan perkembangan lebih lanjut dari seni tembang sebelumnya yang masuk dari Jawa seperti: Maskumambang, Sinom, Durma Asmarandana, Dangdang, dan Pangkur. Dari Bali selain tembang macapat juga masuk tembang gde yang selalu dibina dan dikembangkan oleh penduduk Lombok keturunan Bali yang masuk ke Lombok pada akhir abad ke-17.

Seni kriya yang terus berkembang sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya ialah anyam-anyaman dari bambu, pandan, lontar, dan rotan yang menghasilkan alat rumah-tangga dan alat dapur. Kerajinan keramik juga terus bertahan dalam arus barang porselin produksi luar negeri, terutama alat dapur berupa periuk, belanga, pasu, kendi, tungku, kukusan, dan lain-lain. Perkembangannya didukung oleh daya beli rakyat yang masih rendah terhadap barang produksi luar negeri dan karena beberapa barang keramik masih mempunyai nilai magis dalam penggunaannya di waktu kelahiran dan kematian, seperti untuk wadah tembuni dan ari-ari, wadah air obat dan air suci, alat untuk memandikan mayat, wadah air bekal kubur dan lain-lain. Seni kerajinan emas dan perak belangsung terus, selain menghasilkan alat rumah-tangga juga perhiasan konsumsi lokal. Kerajinan tanduk menghasilkan sisir, hulu pisau, dan hulu pedang. Kerajinan kayu selain menghasilkan alat rumah-tangga seperti dulang, penumbuk padi tempat sirih juga menghasilkan hulu keris, pedang, dan tombak. Di samping itu perkembangan seni tenun yang semakin pesat, karena ditunjang oleh tersedianya bahan baku, seperti benang sutera dan benang katun di toko-toko dengan harga yang terbeli oleh rakyat. Pada waktu itu seorang gadis dianggap memenuhi syarat untuk menikah bila sudah pandai menenun dan mempunyai koleksi minimal empat

puluh lembar kain.

Sedangkan seni sastra lisan maupun tulisan berkembang seiring dengan perkembangan seni tembang dan seni pedalangan untuk di Lombok. Sedangkan sastra purba yang dibina dan dikembangkan oleh penduduk yang beragama Hindu di Lombok Barat yang berkaitan erat dengan kepentingan agama Hindu. Di kalangan penduduk Lombok yang beragama Islam hasil sastra berfokus pada cerita Amir Hamzah dan kisah Ambiya' yang masuk ke Lombok bersamaan dengan masuknya agama Islam. Bahasanya Jawa Madya dan disadur ke dalam berbagai fragmen yang terkenal antara lain: Rengganis, Selandir, Yunan, Jabalkaf, Jonglengga, dan sebagainya. Selain itu ada pula lontar Suluk dan cerita biasa atau saduran dari cerita Panji. Di Pulau Sumbawa berkembang pula sastra lisan dan tulisan yang ditulis di atas daun lontar dengan huruf Bima dan Sumbawa. Kedua huruf itu berasal dari huruf Bugis.

7. Kepemudaan dan kependuan

Pendidikan yang didasarkan untuk memperoleh tenaga pegawai yang murah, menimbulkan akibat pemuda-pemuda tamatan *Volkschool* maupun *Tweede Inlandschee School* atau (Sekolah Dasar empat tahun) jumlahnya sangat sedikit dan tidak mempunyai inisiatif. Para pemuda yang kebetulan sudah dapat mengecap pendidikan dasar merasa bangga dan mengharap akan dapat mencari pekerjaan di kantor-kantor pemerintah maupun kantor desa. Dan memang hampir semua tamatan VS dan TIES terserap dengan cepat. Apabila tamatan HIS atau sebelum tahun 1928 di Lombok belum ada tamatan HIS langsung terserap di Kantor Gubernur dan Kantor Swapraja. Sedangkan masuk jadi pegawai atau magang di kantor berarti harus tunduk kepada disiplin yang tidak mungkin ada inisiatif lain selain daripada mengabdikan diri kepada profesinya. Di samping tenaganya terserap untuk di kantor juga untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga guru bantu yang dididik pada Sekolah Guru Bantu satu tahun yang dibuka pada tahun 1922 di Mataram.

Sebelum Muhammadiyah dan NU mengembangkan aktivitasnya, di Nusa Tenggara Barat belum ada kependuan. Guru-guru yang ada belum ada minatnya dan keberaniannya untuk mengorganisasi kegiatan anak-anak di luar sekolah. Hal itu disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat yang masih fanatik terhadap adat-istiadat lama. Mereka tidak senang kalau anak-anak-

nya disuruh memakai celana pendek atau bertingkah-laku yang dianggapnya tidak bermanfaat.²³⁾ Di samping itu pengawasan pemerintah sangat keras untuk mencegah setiap aktivitas masyarakat yang dapat menjurus kepada kesadaran nasional.

8. P e r s

Keadaan masyarakat yang masih serba mundur baik bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, sampai tahun 1928 di Nusa Tenggara Barat belum ada usaha perorangan maupun organisasi untuk menerbitkan surat kabar. Bagi mereka yang sudah bersekolah, minat bacanya sangat kurang. Dari beberapa surat kabar di Jawa yang mencari langganan di Nusa Tenggara Barat hanya sedikit yang memperoleh langganan. Sebab sebagian dari guru dan pegawai takut diketahui berlangganan oleh pemerintah, terutama pegawai negeri memang dilarang berlangganan surat kabar. Lagi pula uang langganan sangat tinggi menurut ukuran waktu itu, sebulan f.4,50. Surat kabar dan majalah yang masuk ke Nusa Tenggara Barat pada waktu itu ialah *Bintang Timur*, *Cahaya Timur*, *Utusan Indonesia*, *Pewartar Timur*, *Nasionale Commentaren*, *Al Mansur*, *Al Muslimin*, *JavascheBlad*, *Cinta Kebenaran*, *Matahari*, *Pemandangan*, *Utusan Hindia*, *Dagblad*, *Shinpo*, dan *Api*. Sedang yang berlangganan guru, pegawai, kepala desa, tokoh masyarakat, dan alim ulama.

Masuknya surat kabar dari luar daerah, selain memberi pengaruh kepada pembacanya, juga kepada rakyat biasa yang memperolehnya secara lisan dari para langganan. Apa lagi kalau yang berlangganan itu adalah seorang pemimpin masyarakat maka segala pengetahuannya yang didapat dari membaca surat kabar itu akan disampaikan sebanyak-banyaknya kepada sahabat dan kenalannya yang terdekat dan sering menjadi bahan pembicaraan yang serius.

Di antara tokoh-tokoh masyarakat yang berlangganan waktu itu antara lain: H. Idris M Jafar, A.D. Talu, Abdulhamid, Yusuf Sulaeman, Moh. Umar, Abdullah Ahmad, L.M. Abdulmajid, L. Mala, L. Imbang, Mamiq Dadelah, Raden Gde Nuraksa, dr. Raden Sujono, M. Samingan, dan lain-lain. Untuk anak-anak sekolah hampir semua *Vervolgschool* berlangganan *Suluh Pelajar* dan ma-

23). Wawancara dengan: Lalu Mala, tanggal 30-9-1978

Wawancara dengan: Lalu Imbang, tanggal 1-10-1978

Wawancara dengan: Mas Samingan, tanggal 28-12-1978.

jalah *Panji Pustaka*.²⁴⁾.

9. Koperasi

Perkembangan ekonomi uang yang semakin menguasai kehidupan rakyat banyak, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit telah menimbulkan gagasan untuk membina kerjasama dalam bentuk koperasi. Pada tahun 1920 di bawah pimpinan Abdulhamid Raja Bicara bersama beberapa orang Bima mendirikan Koperasi Konsumsi yang diberi nama "*Satya Usaha*." Pengurusnya terdiri dari Bachtiar Juliansche Tuan Ismail Samocle, dan Haji Abdullah Rabangodu. Koperasi Satya Usaha berusaha memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Tetapi karena tidak mampu menggendalikannya tidak lama setelah berdiri, koperasi ini mulai pudar dan bubar.²⁵⁾

Di samping Satya Usaha, di Pancor (Lombok Timur) atas inisiatif rakyat yang tergabung di dalam organisasi Sarekat Islam di bawah pimpinan R. Gde Nuraksa (Kepala Distrik Rarang) didirikan pula suatu koperasi produksi. Ketuanya: Raden Gde Nuraksa, penulis Amaq Kalsum dan bendaharawan Haji Toba. Usahanya bergerak di bidang produksi antara lain bata dan hasil bumi. Semua anggotanya dilarang menjual batu bata kepada orang asing. Anggotanya hampir tersebar di seluruh desa dan di luar desa Pancor di lingkungan Kedistrikan Rarang. Tetapi karena usahanya dapat mengancam kepentingan orang asing, akhirnya koperasi tersebut dilarang oleh Pemerintah Belanda.²⁶⁾

10. Organisasi profesional

Organisasi profesi lahir setelah partai-partai politik masuk di Nusa Tenggara Barat. Terutama setelah Partai Nasional Indonesia masuk di Bima berdiri *PETANI (Persatuan Tani Indonesia)*. Pendirinya ialah Hasan Muhammad. Kegiatannya adalah menggalang kaum tani untuk bersama-sama sewaktu-waktu mengusir Pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat aktif membina anggota-anggota-

- 24). Wawancara dengan: L. Mala, tanggal 30-9-1978.
Wawancara dengan: L. Imbang, tanggal 1-10-1978.
Wawancara dengan: Mamiq Fadelah, tanggal 15-10-1978.
Wawancara dengan: M. Saleh Ntabu, tanggal 22-11-1978.
Wawancara dengan: A.D. Talu, tanggal 24-11-1978.
Wawancara dengan: M. Samingan, tanggal 28-12-1978.
- 25). Wawancara dengan: M. Saleh Ntabu, A.D. Talu dan H.M. Thayeb Abdullah, tanggal 22 sampai dengan 25 Nopember 1978.
- 26). Wawancara dengan: Mamiq Ripaah, tanggal 11 Agustus 1978.

nya, sehingga kegiatannya tercium oleh pemerintah. Dan karena dipandang berbahaya akhirnya pemerintah membubarkannya.

Di samping PETANI ada juga organisasi buruh Pelabuhan Bima. Mereka adalah buruh di Perusahaan Perkapalan Belanda (KPM). Perkumpulan ini bertujuan untuk membina solidaritas antara sesama anggota dan saling membantu di dalam kesulitan. Tujuan perkumpulan hanya semata-mata bersifat sosial, dan tidak berafiliasi pada suatu partai, juga tidak merupakan bagian dari sesuatu organisasi buruh yang ada di Jawa atau tempat lain.²⁷⁾

D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 – 1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD

Sejak berakhirnya pemberontakan rakyat Pringgabaya pada tahun 1913, keadaan di seluruh Nusa Tenggara Barat sangat aman. Hubungan antara rakyat dengan pemerintah baik. Semua pejabat pemerintah bekerja tekun dan giat. Pecahnya Perang Dunia Pertama (1914 – 1918) yang menimbulkan kegelisahan Pemerintah Belanda dan sebagian besar rakyat di Indonesia disebabkan keadaan ekonomi yang semakin buruk, hampir tidak terasakan di Nusa Tenggara Barat. Rakyat tidak menyadari keadaan yang sebenarnya di balik sikap Pemerintah Belanda yang selalu tenang. Pada waktu itu di Nusa Tenggara Barat belum ada partai politik yang dapat menyadarkan rakyat tentang kejadian di luar negeri. Hanya secara samar-samar mereka mengetahui dari mulut ke mulut, bahwa di dunia Barat sedang terjadi perang besar, tetapi tidak mengetahui bahwa Pemerintah Belanda di Nederland terpaksa mengeluarkan janji Nopember atau *November Delofte* yang diucapkan oleh Ratu Wilhelmina supaya rakyat Indonesia mau membantunya ke luar dari kesulitan yang dihadapinya.

Pejabat-pejabat Pemerintah Belanda di Nusa Tenggara Barat berhasil melokalisasi keadaan, sehingga rakyat tidak ikut terpengaruh oleh kegiatan politik di Pulau Jawa. Sehingga keinginan Pemerintah Belanda yang menghendaki keamanan di Indonesia dapat tercapai di Nusa Tenggara Barat. Sukses yang dicapai oleh Pemerintah Belanda itu disebabkan oleh karena rakyat pada masa itu masih buta politik dan serba takut karena kurang pengetahuan. Mereka masih taat kepada Kepala Desa dan Kepala Distrik. Se-

27). Wawancara dengan: M. Saleh Ntobu, A.D. Talu, dan HM. Thayeb Abdullah, tanggal 22 sampai dengan 25 Nopember 1978.

dangkan Kepala Desa dan Kepala Distrik pada waktu itu sangat setia menjalankan perintah atasan. Sebagai pegawai yang setia mereka tidak pernah tahu atau mencoba mengetahui tentang politik. Mereka hanya melaksanakan apa yang digariskan oleh Pemerintah Belanda saja. Tentang pembentukan *Volksraad* pada tahun 1917 dianggap sebagai peristiwa biasa dan Pemerintah Belanda juga tidak pernah menawarkan calon yang akan didudukkan dari daerah Nusa Tenggara Barat. Lebih-lebih setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, di Nusa Tenggara Barat berjangkit penyakit panas (bahasa Sasak: *Gerubuk*, Latin: *Spaanshegrip*) yang menimbulkan banyak korban di kalangan rakyat. Bencana ini meminta tenaga dan pikiran mereka yang menjadi pemimpin masyarakat dan pemerintahan sehingga tidak sempat memikirkan soal lain. Fasilitas pengobatan dan tenaga dokter sangat kurang. Waktu itu di Lombok hanya ada dua orang dokter. Pimpinan Rumah Sakit di Lombok Tengah dan Lombok Timur dirangkap oleh dr. Raden Sujono. Sebab lain ialah karena belum ada partai yang mempersatukan mereka dan yang meningkatkan pola berpikir secara nasional, sehingga yang dipikirkan hanyalah daerahnya sendiri. Tiap tokoh pemerintahan dan masyarakat hanya mengenal dan mementingkan lingkungannya saja. Sehingga ketika Belanda mengkhianati janji Nopember, rakyat di Nusa Tenggara Barat bersikap acuh tak acuh saja. Pada waktu itu tingkatan kesadaran nasionalnya masih minim sekali. Meskipun pada waktu itu sudah ada SI (Sarekat Islam) tetapi anggotanya masih tersiar dan semu. Dan kalau di kalangan anggota-anggotanya terdapat kesadaran dan solidaritas bentuknya barulah solidaritas antar pemeluk agama Islam saja. Apa lagi dalam tindakan politiknya Belanda berusaha untuk tetap memelihara dualisme dari masyarakat Indonesia. Hal itu nampak pada perubahan-perubahan yang diadakannya selalu didasarkan pada prinsip diskriminasi. Sehingga karena itu usaha Belanda untuk memberikan otonomi kepada Hindia Belanda hampir tidak ada kemajuannya.²⁸⁾ Akibatnya kemajuan rakyat tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu juga terlihat di dalam pelaksanaan Undang-undang Pembaharuan Pemerintah (Undang-Undang Desentralisasi). Di Nusa Tenggara Barat baru ditetapkan pada tahun 1924. Afdeeling

28). Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia jilid V, halaman 36, Tahun 1974.

Lombok tetap merupakan bagian dari Keresidenan Bali, dan Lombok dikepalai oleh Asisten Residen dengan bawahan seorang komis (Belanda) dan dua orang *klerek* (bumi-putra). Asisten Residen diberi wewenang untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan *Volkschool*. Keuangannya diatur sebagian dari pungutan pajak khusus untuk *School en Sepolong fonds* (dana sekolah dan rehabilitasi lepra di Sepolong Lombok Timur). Struktur organisasi pemerintahan dari onderafdeeling sampai kedistrikan tetap tidak berubah.

Begitu pula Pulau Sumbawa tetap merupakan afdeeling dari Keresidenan Timor dan daerah takluknya. Kekuasaan tertinggi adalah Asisten Residen yang berkedudukan di Raba Bima. Struktur organisasi pemerintahan tetap, kecuali onderafdeeling Sumbawa. Sebelum tahun 1924 Swapraja Sumbawa dibagi atas empat buah kedistrikan dengan delapan belas buah onderdistrik. Pada tahun 1924 kedistrikan dihapus dan onder-distrik berubah menjadi kademungan yang diperintah oleh Demung. Kemudian berdasarkan Gemeenteregeling kademungan mendapat status *gemeente* dan demung sebagai *gemeente-hoofd*. Kedemungan berubah dari daerah administratif menjadi daerah otonom yang mempunyai hak mengatur rumah-tangga sendiri dan turut membuat anggaran belanja dan pendapatan gemeente. Pemungutan keuangannya terdiri dari; uang *gemeente*, uang sekolah, uang *gemeente dienst*, uang denda *merariq* dan denda-denda pelanggaran kecil. Pengeluarannya ialah pembayaran gaji pegawai-pegawai *gemeente*, gaji guru-guru *Volkschool*, perbelanjaan kantor, sekolah, biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung. Dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, *gemeentehoofd* didampingi oleh *Raad Gemeente* yang anggota-anggotanya terdiri dari kepala-kepala kampung, hukum-hukum mesjid dan *malar-malar*.²⁹⁾

E. PERJUANGAN DI DAERAH

Sebagai akibat pendidikan yang terbelakang dan kurangnya surat kabar yang masuk ke Nusa Tenggara Barat dan konservatifnya pemimpin masyarakat di waktu itu, rakyat Nusa Tenggara Barat sangat ketinggalan kesadaran nasionalnya kalau dibandingkan dengan rakyat yang di Jawa. Walaupun pendidikan secara Ba-

29). Abdurrahim SH. dkk, Monografi Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, halaman: 770-771, tahun 1975.

rat telah mulai diperkenalkan sejak tahun 1896 tetapi karena jenisnya hanya *Volkschool* dan *Tweede Inlandsche Eilandsche School* (SD 4 Tahun) sedangkan HIS baru mulai didirikan pada tahun 1919 di Bima, tahun 1923 di Mataram maka orang-orang yang terpelajar masih dapat dihitung dengan jari. Dari tamatan kedua sekolah yang pertama di atas hanya sedikit yang melanjutkan ke Sekolah Guru Bantu 1 Tahun dan ke *Normaal School* (NS) di luar daerah pada umumnya Makasar. Di samping karena kurang mampu ekonominya tetapi juga karena pemerintah berusaha menghalanginya agar masyarakat Nusa Tenggara Barat tetap tertutup dan terisolasi dari dunia luar.

Situasi dan kondisi yang diinginkan itu memang tercapai. Masyarakat Nusa Tenggara Barat itu hanya sedikit pengetahuannya tentang dunia luar. Kehadiran Sarekat Islam yang diantar langsung oleh H.O. S. Cokroaminoto sekitar tahun 1916 dengan pidatonya yang pertama di pasar sapi Praya, yang telah banyak menarik simpati masyarakat, namun karena anggota-anggotanya tersiar yang terdiri dari rakyat yang buta huruf sama sekali tidak membantu meningkatkan kesadaran nasional masyarakat.

Pengetahuan mereka tentang dunia luar kurang sekali. Mereka belum dapat menyadari penderitaan yang sedang dihadapi oleh rakyat di Pulau Jawa. Kepedihan dan keresahan sosial yang dirasakan oleh penduduk di Pulau Jawa akibat perbedaan yang menyolok antara golongan pribumi dan golongan Eropa tidak dirasakan oleh rakyat di Nusa Tenggara Barat. Pada saat kegelisahan sosial di beberapa daerah di luar Nusa Tenggara Barat yang mewujudkan pemberontakan-pemberontakan Petani di Jambi (1916), Pasar-rebo (1916), Cimareme (1918), Toli-Toli (1920) sebagian rakyat di Nusa Tenggara Barat sedang dilanda kegelisahan sosial yang diakibatkan oleh wabah yang sedang berjangkit dan keharusan kerja rodi di jalan-jalan serta pajak tanah yang semakin meningkat. Pemberontakan Bahandi Lombok Swapraja Sumbawa (1923) dan pembangkangan rakyat di Lombok Timur yang tergabung dalam *Gerakan Dewi Anjani* (yang kemudian lebih terkenal dengan nama *Gerakan Sapuq Puteq*) merupakan perwujudan dari kegelisahan itu.

Karena peristiwa di atas satu sama lain tidak mempunyai kaitan dan tidak ada hubungannya dengan pemogokan di Jawa seperti pemogokan di pegadaian (Januari 1922) dan pemogokan di antara pegawai kereta api (Mei 1923). Pemberontakan dan pembangk-

kangan yang di Nusa Tenggara Barat bermotifkan enggan membayar pajak dan kerja rodi, sedangkan peristiwa pemogokan di Jawa disebabkan oleh banyaknya pengangguran dan tenaga yang disia-siakan akibat politik penghematan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara ketat dan pajak rakyat semakin meningkat.

Reaksi pemerintah yang sangat keras dengan mencabut hak berapat serta memecat kira-kira seribu pekerja telah memberi petunjuk bagi petugas Pemerintah Belanda di Nusa Tenggara Barat untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi setiap kegiatan dan kekecewaan masyarakat supaya tidak menimbulkan pengaruh di kalangan rakyat, Terutama dengan cara memperketat dan menyaring surat kabar yang masuk ke Nusa Tenggara Barat dan mengawasi gerak-gerik para terpelajar yang berasal dari luar daerah agar jangan dipengaruhi oleh gerakan non-koperasi yang sedang meluas di kalangan Dewan Rakyat dan kaum terpelajar sejak tahun 1922 di Pulau Jawa. Sejak pergolakan memuncak pada akhir tahun 1926 dengan pecahnya pemberontakan di Banten, Sumatera Barat dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa, pengawasan atas semua kegiatan anggota-anggota tersiar SI semakin diperketat.

Kalau diperhatikan tingkat kesadaran nasional dan tingkat kecerdasan masyarakat Nusa Tenggara Barat ketika itu tindakan Belanda tersebut adalah berlebihan. Sebab tidak ada sesuatu yang harus ditakutkan dan dikhawatirkan. Tetapi untuk mencegah kemungkinan, Belanda bertindak sangat waspada. Mamiq Fadelah, Kepala Desa Dasan Lekong Lombok Timur yang dianggap tidak loyal kepada pemerintah diberhentikan menjadi Kepala Desa pada tahun 1926. Tetapi karena itu beliau lebih leluasa membawa rakyatnya ke dalam gerakan Sapuq Puteq. Berdua dengan dr. Raden Sujono bersama-sama memimpin Gerakan Sapuq Puteq yang bersikap acuh tak acuh kepada pemerintah. Semula Gerakan Sapuq Puteq yang berasal dari Gerakan Dewi Anjani bertujuan untuk membendung pengaruh Islam Waktu Lima yang semakin berkembang mendesak golongan Islam yang masih mengutamakan adat-istiadat daripada hukum Islam itu sendiri. Di bawah pimpinan dokter Raden Sujono dan Mamiq Fadelah Gerakan Sapuq Puteq ini menjurus kepada kegiatan sosial yang dapat mengurangi wibawa pemerintah. Sikap mereka menunjukkan dan mengarah kepada sikap yang non-kooperatif. Mereka lebih loyal kepada pemimpin mereka daripada kepada Pemerintah Belanda, sehingga menimbulkan kemarahan di kalangan pejabat pemerintahan dan

memindahkan dr. Raden Sujono ke Madiun (Jawa Timur). Sementara itu kesadaran rakyat semakin meningkat untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang tersedia. Kesempatan bersekolah yang tidak hanya semata-mata didasarkan kepada keturunan telah memperluas kesempatan bagi anak-anak orang kebanyakan yang berbakat dan cerdas. Anak-anak tamatan *Tweede Inlandsche Eilandsche School* dan HIS yang beruntung dalam ujian saringan masuk berhasil melanjutkan pendidikannya ke NS atau Mulo di luar daerah dan kebanyakan ke Pulau Jawa dan Makasar. Di situ mereka sempat berkenalan dengan pemuda-pemuda dari daerah lain dan memasuki perkumpulan pemuda, yang di daerah asal mereka Nusa Tenggara Barat tidak pernah ada. Oleh karena sekembalinya, mereka juga tidak berinisiatif mendirikan perkumpulan pemuda sebab kondisi masyarakatnya masih kurang sekali. Apa lagi kebanyakan pemuda terpelajar menurut ukuran daerah waktu itu (tamatan *Volkschool*, *Tweede Inlandsche Eilandsche School*, HIS, dan lain-lain) terutama yang cerdas dan berinisiatif telah mengikat diri ke dalam kelompok pegawai pemerintah. Mereka telah merasa mantap dan karena hasil pendidikan yang disengaja, mereka merasa lebih dan memisahkan diri dari pemuda yang terjun ke dalam masyarakat.

Berita dilangsungkannya Kongres Pemuda Indonesia II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 untuk mempersatukan segala perkumpulan pemuda Indonesia yang ada dalam satu badan gabungan yang telah menghasilkan Sumpah Pemuda pengaruhnya di Nusa Tenggara Barat hanya sedikit sekali. Bagi mereka yang sempat mengetahuinya melalui surat kabar hanyalah dikenangnya sebagai peristiwa yang menarik yang patut dicontoh tetapi tidak pernah dapat diwujudkan dalam bentuk perkumpulan sebab di antara mereka sendiri terpecah-pecah berdasarkan profesi dan pendidikannya.

Situasi yang demikian itu dipertajam lagi akibat tindakan Belanda yang semakin konservatif dan reaksioner. Pembatasan pers yang masuk pengawasan yang lebih keras terhadap para cerdik-cendekiawan terutama terhadap mereka yang berasal dari luar daerah dan putra daerah yang pernah belajar di luar daerah serta pengawasan terhadap pertemuan-pertemuan menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk berinisiatif di dalam bidang sosial maupun politik. Dan untuk tetap terpeliharanya situasi yang mantap itu Belanda mempergunakan sistem masyarakat tradisional sebagai

benteng penghambat kemajuan serta melakukan pengawasan ekonomi dan politik yang sebaik-baiknya.

Sehingga setiap kelompok profesi cenderung pada penekunan di bidang masing-masing. Perhatian Belanda terhadap kemakmuran rakyat ditujukan untuk memperoleh sumber pajak yang sangat dibutuhkan lagi pembangunan jalan raya dan irigasi, gedung-gedung dan pasar. Perdagangan semuanya dikuasai oleh orang Timur Asing, kebanyakan Cina dan Arab. Barang perdagangan yang terbesar ialah hasil pertanian dan peternakan. Akibat pembangunan jaringan jalan raya dan irigasi yang semakin sempurna telah meningkatkan hasil produksi pertanian yang meramaikan lalu-lintas perdagangan. Juga memberi pengaruh pada pola pertanian tradisional dari ekstensif ke intensif. Perladangan dengan sistem berpindah-pindah berubah menjadi menetap dan mulai membangun persawahan. Cara *nggaro* (melumatkan tanah dengan menghalau kerbau atau menuntun kerbau mengitari sawah) semakin terdesak diganti dengan bajak. Berbagai jenis bibit padi, jagung, kedelai, dan lain-lain varietas unggul mulai masuk melalui Balai Benih yang diusahakan oleh Pemerintah.

Sementara itu jumlah penduduk semakin meningkat. Sawah pertanian semakin sempit oleh pengepungan-engepungan karena pewarisan. Di Lombok Barat sebagai akibat langsung dari cara pemilikan tanah yang tidak adil di masa lampau yang diperkuat dengan Stbl. 1906, Nomor 431 mengenai larangan perpindahan hak atas tanah kepada orang-orang Sasak, menjadikan orang-orang Sasak yang beragama Islam tetap hidup sebagai buruh tani. Sedangkan pertambahan penduduk di daerah ini laju dengan pesat. Sehingga lapangan pekerjaan di desa menjadi sulit. Faktor-faktor di atas mendorong terjadinya mobilitas sosial dan geografis. Rakyat yang hidupnya terjepit di desanya pergi ke daerah lain membuka tanah pertanian baru dan menetap di situ. Sebagian pergi ke kota-kota mencari pekerjaan memburuh di pelabuhan, toko-toko, dan perusahaan milik orang Cina di Cakranegara dan Ampenan, Labuhan Haji, dan lain-lain. Di antaranya ada yang mencoba berdagang kecil-kecilan atau sebagai perantara dalam perdagangan hasil bumi dan peternakan.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah berpendidikan lebih mudah dalam usahanya dan menyesuaikan diri dengan keadaan, mendorong orang tua untuk berusaha menyekolahkan anak-anak mereka. Tetapi memasuki sekolah bu-

kanlah usaha yang mudah. Mahalnya biaya dan kurangnya fasilitas serta adanya diskriminasi menyulitkan bagi rakyat yang kurang mampu. Untuk dapat masuk ke *Tweede Inlandsche Eilandsche School* harus melalui testing dan setelah duduk di sekolah tersebut harus membayar sekolah yang mahal bagi orang yang tidak mampu. Rata-rata uang sekolah berkisar antara f. 0,05 – f. 0,25 a' bulan. Anak-anak yang ingin memasuki HIS diseleksi oleh Asisten Residen yang pertimbangannya selalu didasarkan kepada keturunan, kekayaan dan loyalitas orang tuanya kepada Pemerintah Belanda. Karena itu tidak mengherankan kalau hanya sedikit sekali anak-anak yang dapat memasuki sekolah. Namun karena sekolah adalah salah satu syarat bagi mobilitas sosial maka ia pun menjadi rebutan di kota dan desa yang cara berpikirnya sudah maju.

Tetapi di desa yang jauh dari kota dan desa yang letaknya terisolasi sekolah adalah momok yang menakutkan seperti kenyataan yang terjadi di Bayan (Lombok Barat) sekolah yang pertama dibangun pada tahun 1930 dibakar rakyat.³⁰⁾ Ketakutan masyarakat kepada sekolah itu oleh karena sebagian masyarakat menganggap sekolah adalah sumber perusak tradisi warisan budaya nenek-moyang.

Memang pada pertengahan dasawarsa ketiga abad XX kebudayaan di Nusa Tenggara Barat mengalami transisi yang dipelopori oleh golongan terpelajar dan golongan ulama Islam yang fanatik. Masyarakat terpaksa memberi konsesinya. Adat dan aturan diubah sesuai dengan desakan dari kebutuhan mereka dalam masyarakat. Kesenian ditambah jumlahnya dengan orkes keroncong, yang dibangun bersama antara orang terpelajar yang berbakat dengan pendatang-pendatang dari luar daerah.

Faktor transportasi dan larisnya hasil pertanian sebagai obyek perdagangan, menyebabkan banyaknya orang pergi ke Mekkah menunaikan ibadah haji. Di antaranya ada yang bermukim di sana bertahun-tahun lamanya dan sekembalinya mereka mendirikan pesantren yang mendidik orang-orang dewasa dan anak-anak. Usaha para Tuan Guru menyebabkan agama bertambah maju dan semakin bermutu.

30). Wawancara dengan Haji Syamsulhakim, tanggal 17-7-1978.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1922 – 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA PADA TAHUN 1930

Keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan dari Indonesia telah mendatangkan kemakmuran yang memberikan kenikmatan kepada lapisan atas dari masyarakat Kolonial Belanda, sehingga Pemerintah Kolonial terlalu percaya akan kekuatannya dan kekuasaannya. Mereka telah mengabaikan kepentingan rakyat dan selalu memperhatikan kepentingannya sendiri. Jurang pemisah antara pribumi dengan golongan Belanda dan asing terasa semakin dalam yang menimbulkan suatu kekuatan ekstrim yang datang dari kaum nasionalis dan kaum kolonial yang konservatif dan reaksioner. Dan karena dalam pertarungan tersebut di atas kaum kolonial lebih unggul maka politik etis dan assosiasi tercampak begitu saja. Semakin banyak modal Belanda masuk ke Indonesia semakin bertambah golongan pribumi yang menjadi orang upahan. Kondisi itu semakin mempertajam garis pemisah menurut warna kulit, antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Kemewahan golongan yang pertama dan sikapnya yang semakin tertutup semakin menjauhkan mereka dari rakyat.³¹⁾ Keadaan yang demikian itu membangkitkan semangat memperjuangkan kehidupan Indonesia Merdeka, tetapi yang menimbulkan perpecahan antara golongan politik. Ada yang non-kooperatif dan kooperatif. Terhadap mereka yang non-kooperatif Pemerintah Belanda bertindak sangat keras dan reaksioner. Dan melalui pengalaman di daerah Jawa, Belanda bertindak hati-hati dan menjadikan tokoh-tokoh adat sebagai alat dan berusaha membendung masuknya pengaruh partai-partai politik ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ditambah pula oleh keadaan rakyat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang masih terlena dan kebanyakan masih takut kepada pemimpin-pemimpin mereka,

31. Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, halaman 88-89, Tahun 1975.

maka jarang sekali di antara rakyat yang berani masuk partai secara terang-terangan. Mereka menjadi anggota secara sembunyi-sem-bunyi dan merupakan anggota tersiar. Di antara tokoh-tokoh masyarakat yang aktif menggerakkan rakyat supaya masuk partai dan mengobarkan semangat anti penjajah ialah Kasan, seorang guru *Volkschool* di Paoq Pampang (Lombok Timur) dan Rajikin, Kepala Kantor Pos di Labuhan Haji (Lombok Timur). Mereka itu adalah aktivis PSII. Sejak Serikat Dagang masuk di Lombok pada tahun 1916 sempat mengembangkan diri dan mendapat sambutan baik dari golongan agama Islam. Di Kesultanan Sumbawa paham-paham kebangsaan lebih sulit oleh kekuasaan Sultan yang memegang urusan agama dan adat. Semua pemimpin adat merupakan pemuka masyarakat mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi rakyat secara langsung dan berusaha supaya rakyat tidak mempunyai pandangan lain selain yang telah digariskan oleh Sultan. Lagi pula rakyat waktu itu belum banyak yang mengenyam pendidikan. Demikian pula di Bima dan Dompu, rakyat tidak bebas bergerak dan berorganisasi. Setiap organisasi yang menjurus ke politik selalu dicegah oleh pemuka masyarakat yang menjadi kaki-tangan Sultan. Kondisi yang demikian itu selalu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Belanda. Dan untuk mengikat hati Sultan-Sultan dan para Kepala Distrik Belanda tidak segan-segan mengobarkan harta dan benda untuk mendirikan istana bagi raja-raja di Pulau Sumbawa dan memberi tekanan kepada setiap usaha pergerakan yang menyadarkan diri bagi kemerdekaan bangsanya. Setiap pemimpin partai yang datang dari luar yang berusaha hendak mengembangkan partai di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa selalu ditolak atau geraknya dibatasi. Ketika Sukardjo Wirjopranoto dari Parindra datang ke Pulau Sumbawa pada tahun 1938 hendak mengembangkan partai tersebut, beliau gagal karena mendapat halangan dari Pemerintah Belanda. Hasilnya hanya beberapa simpatisan yang lebih terkenal dengan anggota tersiar. Dan dalam perjalanan berlabuh di Labuhan Haji (Lombok Timur) tak seorang pun diperkenankan oleh Pemerintah Belanda untuk menjumpainya.³²⁾ Demikianlah sejak Serikat Dagang sampai Sarekat Islam dan PNI tidak ada sebuah pun yang berhasil mengembangkan pengaruhnya di kedua pulau di atas.

32). Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 11-8-1978.

Kemudian terhadap golongan agama, Belanda membedakannya antara yang Islam Waktu Lima dan Islam Waktu Telu di Lombok. Sekalipun kedua golongan agama ini pada awalnya sama-sama menentang Pemerintah Belanda, golongan Islam Waktu Lima memandang Pemerintah Belanda adalah pemerintah kafir yang tidak baik diimani, dan golongan adat yang lebih terkenal dengan Islam Waktu Telu menganggap Pemerintah Belanda merusak adat terutama dengan ajarannya melalui sekolah.

Pada awal kekuasaan Belanda di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa kedua golongan agama tersebut telah memperlihatkan pembangkangannya karena masalah pajak dan karena ketidakseimbangan mereka terhadap Pemerintah Belanda. Maka untuk memecah kesatuan dan persatuan antara kedua golongan itu Belanda telah mempertajam perbedaan yang terdapat di antara keduanya. Belanda menyadari benar, bahwa orang-orang Waktu Telu yang berhati jujur tetapi bodoh dengan pemimpin-pemimpin mereka yang pada umumnya adalah orang-orang bangsawan yang takut kehilangan pengaruh karena Islam Waktu Lima mengajarkan persamaan dan kebebasan dan yang selalu menganjurkan untuk menghancurkan kebatilan maka Belanda berhasil mendekati mereka dan menjauhi para ulama yang secara terang-terangan enggan bekerja sama dengan Belanda. Namun pendekatan Belanda kepada golongan Islam Waktu Telu ini hanya politis belaka. Tujuannya ialah untuk membendung kemajuan Islam Waktu Lima yang setiap tahun bertambah banyak orang-orang Waktu Telu yang bertaubat sebagai hasil usaha para ulama. Para ulama ketika itu berjuang semata-mata dari syiarnya agama Islam. Tidak ada latar belakang politis. Karena itu Belanda tidak berbuat apa-apa dan pula tidak mendekatinya.

Sekolah-sekolah diselenggarakan oleh Pemerintah. Di Pulau Sumbawa penyelenggaraannya dilaksanakan bersama-sama dengan swaprja. Sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh orang-orang Arab, *Yayasan Chung Hwa Chung Hwie*, *Ibtidaiyah* yang didirikan oleh Muhammadiyah dan NU, seperti *Al Irsyad Sekolah Al Ittihad*, *Darul Ulum*, Sekolah Cina, *Schakelschool* Muhammadiyah dan *Ibtidaiyah* NU diizinkan terus berdiri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Taman Siswa tidak diperkenankan masuk di Nusa Tenggara Barat. Lembaga-Lembaga Pendidikan agama yang diselenggarakan berdasarkan pola pondok pesantren tidak diganggu selama tidak menyimpang

dan menyinggung kepentingan pemerintah. Untuk tertibnya pengawasan diserahkan kepada Kepala Swapraja dan Kepala-Kepala Distrik. Malah untuk meracuni dan melemahkan semangat Islam, Pemerintah Belanda memberikan fasilitas sebaik-baiknya bagi pedagang-pedagang untuk memasukan kitab-kitab perukuan, kisah-kisah akhirat dan lain-lain terbitan Bombay.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Akibat krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Hindia Belanda, telah menimbulkan penderitaan di kalangan rakyat Nusa Tenggara Barat. Sebagian kekurangan uang dan makanan, sebagian lagi kekurangan uang dan pakaian. Perbedaan penderitaan yang demikian itu disebabkan oleh perbedaan tempat, situasi dan keadaan alam setempat. Di daerah-daerah yang mempunyai pengairan tehnis yang teratur, hasil pertanian cukup baik tetapi karena tidak ada yang membelinya mereka kekurangan uang untuk membeli berbagai kebutuhannya yang lain. Sedangkan di daerah *tadah hujan* kebanyakan hasil pertaniannya kurang, tetapi untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka tidak mempunyai uang untuk membelinya. Pada waktu itu semuanya murah, hampir tidak berharga. Namun demikian tidak ada yang membelinya karena pedagang-pedagang hasil bumi dan peternakan menutup perusahaan mereka untuk sementara. Tak terkecuali bank-bank seperti: *Volksbank* dan *Balische Volkscrediet Bank* terpaksa menciutkan usaha dan pegawainya karena terancam failit. Apa lagi sejak tahun 1920 banyak nasabah yang menunggak pembayaran hutangnya kepada Bank. Dan pada zaman malaise hampir semua nasabah tidak dapat membayar hutangnya sekalipun mendapat potongan 50%.³³⁾ Karena itu di antara tahun 1934-1936 bank-bank untuk sementara tidak mengeluarkan kredit lagi. Beberapa orang pegawainya diberhentikan tanpa pesangon.

Kesulitan yang demikian itu dialami pula oleh Pemerintah. Kas pemerintah hampir kosong, karena sebagian besar keuangan pemerintah diperoleh dari pajak tanah, sedangkan pada zaman itu rakyat tidak mampu lagi membayar pajak. Tetapi meskipun de-

33). Wawancara dengan Mamiq Ripaah, tanggal 11-8-1978.

Wawancara dengan Haji Adam, tanggal 26-9-1978.

Wawancara dengan Lalu Moh. Zain Mustami, tanggal 1-10-1978.

Wawancara dengan Lalu Imbang, tanggal 2-10-1978.

mikian pemerintah memaksa dan mengancam dengan hukuman kurungan bagi setiap orang yang tidak dapat membayar pajak. Sehingga karena takutnya membayar dengan apa saja yang disukai pemerintah, seperti kuda atau kerbau. Bagi yang tak dapat membayar pajak sawahnya dilelang. Di Lombok harga sawah per Ha f 5,-. Maka karena keadaan kas yang sangat tipis demikian terpaksa gaji pegawai dan guru-guru hanya dibayar 50%. Dan agar mereka tidak menderita karenanya, maka bagi mereka yang digaji oleh Swapraja mendapat beras dan kayu api dari pemerintah. Setelah keadaan ekonomi menjadi normal kembali kekurangan gaji mereka dibayar penuh pada tahun 1934. Tunggakan pajak juga ditagih kembali sehingga pemerintah berjalan sebagai biasa lagi.

C INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN ORGANISASI/PARTAI

Perkembangan partai politik yang semakin pesat di Pulau Jawa mendatangkan pengaruh bagi kesadaran berorganisasi di kalangan rakyat di Nusa Tenggara Barat. Pengaruh itu masuk ke sana dengan lambat dan terbatas di kalangan rakyat yang sudah bersekolah. Yang mengembangkan paham kepartaian ini pun kebanyakan dari petugas-petugas pemerintah. Mereka mengembangkan paham kepartaian di kalangan teman sekerja atau sahabat dan kenalan yang terdekat dan dapat dipercaya secara sembunyi-sembunyi. Benih paham kepartaian yang pertama kali pada tahun 1916 datang di Nusa Tenggara Barat ialah Sarekat Islam (SI). Dalam waktu singkat simpatisan SI berkembang dengan cepat terutama di kalangan umat Islam. Tujuan yang utama ialah memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan, terutama kalau ada kematian, membina persaudaraan seagama, dan berusaha menghapus kebatilan. Pada masa itu terkenal dengan zaman saudara. Di Lombok Timur selain Kasan dan Rajikin, juga terkenal Raden Gde Nuraksa tokoh masyarakat yang aktif mengembangkan SI. Di bawah pimpinan beliau di Pancor dibentuk Kooperasi dengan Amaq Kalsum sebagai Ketua dan bendaharawannya Haji Toha. Usahanya menjual batu-bata, hasil bumi, dan alat pertanian. Anggota-anggota hanya boleh menjual barangnya kepada kooperasi dan dilarang menjual barang kepada orang asing. Melihat perkembangannya yang demikian itu pemerintah segera melarangnya dan dibubarkan. Selain Sarekat Islam, Parindra juga berusaha mengembangkan anggotanya di Pulau Lombok dan Pulau Sumba-

wa. Di Pulau Lombok dikembangkan oleh Drh. Supaman untuk pertama kali pada tahun 1934. Di Lombok Timur yang aktif mengembangkan Parindra ialah dr. Punomo, dokter Poliklinik Selong. Mula-mula paham kepartaian itu dikembangkan di kalangan teman-teman dan kenalan terdekat. Pada tahun 1938 R. Sukardjo Wirjopranoto khusus datang ke Pulau Sumbawa untuk mencoba secara langsung mengembangkan Parindra di sana tetapi karena mendapat halangan dari pemerintah maka usaha beliau gagal. Dalam perjalanan kembali ke Jawa, beliau gagal pula turun di Pulau Lombok. Bahkan setiap orang dilarang menemui beliau ketika kapal yang ditumpangnya sedang berlabuh di Labuhan Haji.³⁴). Partai Nasional Indonesia pun tidak berhasil membentuk cabang di Nusa Tenggara Barat. Setiap usahanya selalu mendapat halangan dari Pemerintah Belanda. Seperti juga partai-partai yang lain hanya berhasil mendapat anggota tersiar yang tidak pernah tergabung di dalam suatu organisasi yang legal. Karena itu tokoh-tokoh PNI lebih memusatkan kegiatannya di dalam masalah sosial daripada politik. Hampir bersamaan waktunya dengan Parindra masuk pula ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Nahdhatul Ulama pertama kali dipimpin oleh Haji Zainuddin di Pancor.³⁵). Karena ajaran dan tujuan NU sesuai dengan mazhab Syafei yang menjadi anutan terbesar di Lombok dan Sumbawa maka anggota NU ini cepat tersebar sampai di desa-desa. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang dalam pandangan masyarakat belum dapat diterima pada waktu itu maka perkembangannya di Lombok hanya terbatas kepada orang-orang tertentu khususnya rakyat yang sudah berpendidikan. Muhammadiyah yang terorganisasi di Lombok pertama kali didirikan dan dipimpin oleh M. Asmo dan berpusat di Mataram. Cabang-cabangnya terdapat di Labuhan Haji, Selong, Pohgading, Tanjung Teros, Masbagik dan Labuhan Lombok. Sebelum itu sejak tahun 1918 Muhammadiyah sudah masuk di Lombok yang dibawa oleh pedagang dari Sumatera. Golongan Muhammadiyah pada waktu itu lebih terkenal dengan Kaum Muda. Ajarannya dianggap penduduk terlalu modern dan dirasakan tidak sesuai dengan paham yang telah dianut oleh masyarakat di waktu itu.³⁶).

34). Wawancara dengan Mantiq Ripuati, tanggal 11-8-1978.

Wawancara dengan Rasyidi, tanggal 12 s.d. 14-11-1978.

35). Wawancara dengan Rasyidi, tanggal 12 s.d. 14-11-1978.

36). Wawancara dengan Haji Hijaz, tanggal 10-10-1978.

Pada tahun 1937 lahir Muhammadiyah Cabang Bima yang dipelopori oleh Idris M. Jafar, A.D. Talu dan M. Hasan. Setahun kemudian pada tahun 1938 lahir pula Perhimpunan Islam Bima (PIB) yang dipelopori oleh H. Sulaiman, H. Usman Abidin yang kemudian dilebur menjadi Ormas NU Cabang Bima. Karena takut kepada Pemerintah Belanda kaum pergerakan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa lebih mengutamakan usaha sosial dari pada politik. Usahanya mendirikan sekolah, koperasi dan lain-lain.

Situasi dan pergolakan politik di pulau Jawa ditutup serapat-rapatnya oleh Pemerintah Belanda. Surat-surat kabar yang masuk ke Nusa Tenggara Barat diawasi dengan ketat. Pegawai dan guru dilarang berlangganan surat kabar selain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka karena keadaannya yang selalu terisolasi demikian ditambah pula mereka hanya merupakan anggota tersiar (simpatisan) maka reaksinya tidak nampak benar. Situasi di Jawa yang dapat diketahui dari koran yang lolos dari pengawasan pemerintah sekedar sebagai bahan pembicaraan yang menarik dan meneguhkan kepercayaan kepada setiap simpatisan partai politik yang ada.³⁷⁾

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal De Jonge (1931–1936) yang didasarkan kepada pandangan Colijn telah memberikan corak dan garis yang mewarnai tindakan Pemerintah Belanda di daerah Lombok dan Sumbawa. Menurut Colijn daerah-daerah perlu diberi otonomi dan perlu pula dibentuk pemerintahan pulau (*eiland gouvernement*). Hindia Belanda hanya merupakan suatu kesatuan oleh karena hal itu dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kesadaran yang ada ialah kesadaran pulau (*eilandbesef*). Suatu lembaga perwakilan bagi daerah pulau akan turut bertanggung jawab dalam pemerintahan daerah itu. Yang dengan jelas dinyatakan oleh Colijn ialah bahwa: (1) tidak ada kesadaran bangsa Indonesia, (2) kesatuan Indonesia hanya merupakan suatu fatamorgana.³⁸⁾

Maka tidak heran kalau petugas-petugas di daerah mulai dari

37) Wawancara dengan Haji Idris, M. Jafar, tanggal 5-7-1978.

Wawancara dengan Haji Hijaz, tanggal 10-10-1978.

38) Sartono Kartodirdjo dkk, Jilid V, Hal. 68-69, Tahun 1975.

Asisten Residen, sampai Kontrolur dan kaki tangannya berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan dan membina perasaan sukuisme dan daerahisme yang didasarkan kepada etnis, kultur dan agama. Setiap usaha atau lembaga yang akan membina kesatuan dan persatuan baik lokal maupun nasional selalu dihalangi dan ditekan sehingga bubar atau kehilangan tujuan. Setiap aktivitas masyarakat selalu diawasi oleh pemerintah. Timbulnya petisi Sutardjo Kartohadikusumo pada tahun 1937 telah menggetarkan hati kolonialisme Belanda, dan berusaha agar pengaruhnya tidak sampai ke pulau Lombok dan Sumbawa. Pegawai-pegawai dilarang berlangganan surat kabar yang memuat berita pergerakan, kecuali surat kabar yang mendukung pemerintah. Kekuatan masyarakat dipecah ke dalam beberapa golongan secara samar. Sasaran utama ialah golongan agama Islam. Pada golongan ini tersimpan kekuatan yang kalau menemukan kesadarannya dapat membahayakan pemerintah. Yang dijaganya jangan sampai terjadi pemuka agama menggunakan kedudukannya untuk keperluan agitasi politik. Tetapi sesuai dengan ajaran Snouck Hurgronje mereka tidak dilarang selama usahanya itu semata-mata hanya mengajar agama, membaca al Qur'an, dan ilmu agama. Yang demikian itu tetap bebas. Namun demikian mereka tidak boleh menjadi besar dan kuat. Maka untuk mencegahnya pemerintah selalu menjauhi ulama, tetapi selalu mendekati tokoh-tokoh adat terutama kaum bangsawan. Walaupun pada awal pemerintahan Belanda, baik golongan agama maupun golongan adat pernah sebagian dari mereka sama-sama memusuhi pemerintah tetapi pada akhirnya golongan adat menjauhkan diri dari ulama-ulama karena kepentingan mereka terancam. Para ulama beserta pengikutnya umumnya sangat fanatik menjalankan syariat agama dan selalu berusaha menyadarkan golongan adat tentang kekeliruannya mengenai kelalaian mereka menjalankan ibadah menurut syariat agama Islam.

Semula pertentangan dan masalahnya hanya remeh saja. Tetapi ketika pemerintah mulai mengeksploitasi sebagai alat politiknya untuk melemahkan kekuatan masyarakat, maka keadaannya menjadi lain. Golongan adat yang di Lombok kebanyakan tergabung di dalam ummat yang masih awam, membentuk suatu organisasi baru yang kemudian lebih terkenal dengan nama Waktu Telu. Mereka itu tetap berpegang kepada kepercayaan masa lampau yang pelaksanaan ibadahnya hanya diserahkan kepada kiyai, pemimpin agama mereka. Kiyai-kiyai mempunyai iden-

titas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Kainnya hitam dengan garis putih, baju putih dan ikat kepala putih. Karena itu mereka lebih terkenal dengan nama *Sapug Puteq* (ikat kepala putih). Pemimpinnya yang terkemuka antara lain dr. Sujono dan Mamiq Fadelah. Menghadapi kedua tokoh itu pemerintah menjadi cukup berat. dr. Sujono pun dikembalikan dari Madiun. Mereka pada umumnya masih sederhana dalam semua tindakan dan perkataannya. Setia dan taat kepada pimpinan, dan tidak mempunyai pandangan lain selain apa yang digariskan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Karena itu mereka mudah terpedaya oleh orang-orang yang hanya bermaksud untuk mengeksploitasi mereka. Maka untuk melemahkan Islam, Pemerintah Belanda lebih dekat kepada mereka. Hal ini menyebabkan para ulama semakin tidak senang kepada pemerintah dan golongan adat. Lebih-lebih golongan Islam Waktu Telu ini sering menjadi korban kaum petualang yang mengaku diri sebagai penjelmaan raja-raja Lombok di zaman dahulu dan membuat datu-datuan yang maksudnya hanya sekedar untuk mencari keuntungan materi. Di antara mereka terkenal sejak tahun 1920 an adalah nama-nama seperti: Guru Dana, Guru Mustiaji, Inaq Beh, Ios (seorang Menado), guru Diralim dan Papug Gde dari Lenek (Lombok Timur). Timbulnya mereka itu berturut-turut, ditangkap yang satu timbul yang lain. Kalau pada akhirnya mereka ditangkap atau dibuang ke luar daerah oleh pemerintah bukanlah karena pemerintah tidak senang, tetapi karena takut kepentingan pemerintah menjadi terancam. Karena jujurnya mereka hanya mengakui datu itulah satu-satunya pemimpin mereka. Mereka tidak mau lagi tunduk kepada pemerintah.³⁹⁾ Apalagi keadaan sudah memuncak demikian, orang yang membuat datu-datuan itu ditangkap dan kepada pengikutnya dijanjikan datu mereka akan dilepas bila menyediakan uang tebusan. Tetapi meskipun uang tebusan sudah dibayar datu mereka tetap tidak muncul lagi sehingga menimbulkan anggapan umum bahwa pemerintahlah yang sesungguhnya menjadi pemain di balik layar. Tampak jelas betapa Pemerintah Belanda menggunakan kecakapannya untuk memperoleh keuntungan politik dan materi.

Keuntungan politis, kekuatan Islam menjadi terpecah. Tetapi itu saja belum cukup. Pemerintah juga memecah kekuatan

39) Wawancara dengan H. Syamsulhakim, tanggal 17-7-1978.
Wawancara dengan Mamiq Fadelah, tanggal 15-10-1978.

adat sehingga terpecah belah. Di Kesultanan Dompu Sultan Abdullah dipecat dan dibuang ke Kupang (Timor). Kerajaan Dompu dihapus dan digabungkan dengan Kerajaan Bima pada tahun 1937. Tentu saja tindakan ini sangat menyakitkan hati rakyat Dompu, terutama para bangsawannya merasa sangat dirugikan. Dan agar mereka tidak berontak dengan bantuan Kerajaan Sumbawa, maka sebelumnya pada tahun 1931 antara Kerajaan Sumbawa dengan Kerajaan Bima sudah pertautkan dengan tali perkawinan antara Sultan Muhammad Kaharuddin III dengan puteri sulung Sultan Muhammad Salahuddin, raja Bima.

Kalau di pulau Sumbawa Belanda mengobarkan perpecahan dengan mengorbankan kerajaan yang lemah untuk digabungkan dengan kerajaan yang lebih besar, maka di Lombok dengan dalih akan membangun dua buah kerajaan baru dengan batas keduanya ialah sungai Babak yang di dalam istilah histori lokalnya *Timuq Juring dan Baret Juring*, maka Belanda mengadakan penelitian silsilah para bangsawan untuk mendapatkan keturunan yang pantas menjadi raja di kedua kerajaan yang akan dibentuk itu. Janji yang demikian itu sangat merangsang para bangsawan yang ambisi untuk mendapatkan tempat yang mulia itu, yang sesungguhnya idee itu hanyalah isapan jempol selaku alat politik yang mematikan. Tiap kelompok bangsawan berusaha mengagungkan silsilah mereka masing-masing dengan merendahkan silsilah yang lain.

Maka yang timbul bukanlah dua buah kerajaan tetapi mental penjilat yang membawa perpecahan. Silsilah-silsilah yang dibawa juga turut lenyap bersama naskah-naskah lama yang sangat berarti bagi penelitian sejarah seni sastra di pulau Lombok. Akibatnya memperbaharui luka-luka lama yang belum sembuh. Timbul perasaan desaisme yang merapuhkan persatuan masyarakat. Terjadi tekanan-tekanan oleh pemimpin-pemimpin yang ambisius dan golongan petualang yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain dalam usaha menjalankan peranannya yang memperbodoh rakyat. Masyarakat sendiri tidak pernah menyadari bahwa pemimpin-pemimpin tersebut mempermainkan mereka. Hanya timbul kesan bahwa zaman sudah berubah, di zaman mana orang-orang sudah tidak mengindahkan lembaga adat dan sopan-santun lagi. Sebagian orang kurang menepati janji dan tidak jujur. Dan dalam pandangan mereka juga berpendapat demikian itu penyebabnya ialah sekolah, suatu lembaga kebudayaan yang

menurut pendapat mereka dipaksakan oleh Belanda untuk merusak agama dan adat nenek moyang. Kesan ini sangat mendalam kepada mereka yang belum memahami tujuan orang bersekolah. Menurut anggapan sebagian dari masyarakat bahwa sekolah hanya untuk anak-anak pemuka masyarakat saja. Lagi pula tenaga anak-anak mereka perlukan untuk membantu di sawah, ladang dan di rumah. Akibat kenaikan jumlah penduduk, masyarakat tidak lagi dapat hidup seenaknya, tetapi harus bekerja keras. Kebutuhan ekonomi lebih menonjol dari pada kepentingan yang lain. Sedangkan tanah pertanian yang dimilikinya semakin sempit, masih harus dibagi-bagi antara saudara yang berhak. Di samping bertambah sempit juga pertumbuhannya semakin berkurang. Dan sejak penerobosan ekonomi uang dalam kehidupan desa, orang-orang asing Arab dan Cina mulai memiliki tanah dengan prantaraan anak negeri.

Di daerah Lombok Barat akibat sistem pemilikan maka banyak tanah yang pemiliknya adalah orang-orang yang menganut agama Hindu dan yang diperkuat dengan *Stbl.* 1906 No. 431.^{39a)} menyebabkan sebagian besar penduduk hidup sebagai buruh tani dengan bagi hasil. Dua pertiga dari hasil panen padi untuk pemilik sawah dan sepertiga untuk penggarap. Selain itu penggarap berhak memperoleh hasil palawija seluruhnya. Di samping bagi hasil ada lagi dengan cara *majekin*. Untuk tiap Ha sudah tertentu jumlah padi bagi pemilik tanah. Jika panen normal peraturan yang demikian masih menguntungkan si penggarap, masih mempunyai hasil yang lumayan. Tetapi pada tahun-tahun yang naas, selain penggarap tidak memperoleh apa-apa, juga kekurangan setoran dan menjadi hutang si penggarap kepada pemilik sawah. Namun karena takut kehilangan tanah garapan, mereka terpaksa bertahan walaupun pahit. Di desa-desa sekitar Ampenan, kebanyakan penduduk laki-perempuan memilih pekerjaan menjadi buruh di perusahaan-perusahaan dan pelabuhan Ampenan.

Di pulau Sumbawa dengan penduduk yang masih jarang, sebahagian penduduk mengusahakan perladangan sebagai pokok pencaharian. Di pulau Lombok sebagian penduduk di daerah per-

39.a) P. De Roo De la Faille, *Studie Over Lombokse Adatrecht, Adatrechtbundels XV: Bali en Lombok.* No. 18, halaman 132.

sawahan *tadah hujan* juga mengusahakan perladangan sebagai mata pencaharian tambahan untuk membantu kesulitan makanan sebelum panen di sawah. Karena perladangan ini tidak terawasi oleh pemerintah, maka semakin lama semakin banyak tanah yang menjadi gundul dan berbatu-batu yang tidak dapat dijadikan ladang lagi. Sehingga untuk mendapatkan tanah ladang harus pergi jauh dari kampung dan perlu bermukim selama musim perabasan hutan dan **sejak bibit** ditanam sampai panen selesai. Karena kenaikan jumlah **penduduk** dan kebanyakan tanah menjadi gersang akibat dijadikan **ladang** setiap tahun, maka penduduknya harus bertransmigrasi ke daerah Dompu; orang-orang dibagian selatan pegunungan Rinjani bertransmigrasi ke daerah Lombok Barat Daya.

Tetapi berbagai faktor alam, seperti curah hujan yang tidak merata dan datangnya musim hujan yang terlambat dan kebiasaan penduduk yang berpesta ria melebihi kemampuan, merupakan sebab mengapa masyarakat tidak dapat melepaskan dirinya dari kemiskinan. Hampir setiap tahun di Lombok terdapat daerah yang kekurangan makanan. Hal ini juga disebabkan karena beras diekspor ke luar daerah. Juga disebabkan penduduk belum biasa menjadikan palawija sebagai bahan makanan pokok selain beras. Penduduk hanya diperkenankan menanam padi sekali setahun untuk menjaga timbulnya penyakit. Sedangkan hasil produksi per Ha masih rendah, dan kebutuhan dengan jumlah ekspor tidak seimbang. Antara tahun 1901–1928 jumlah ekspor beras sekitar antara 12.000 ton sampai 19.000 ton setiap tahun. Menurut catatan *Statistiek Bureau* dan *Handelbank* di Ampenan jumlah impor beras setiap tahun antara tahun 1929–1937 berkisar antara 17.000 ton – 23.000 ton.

Hal di atas dimungkinkan oleh usaha pemerintah mengadakan Jawatan Pertanian Rakyat pada tahun 1928 dikepalai oleh seorang *Landbouwconsulent* yang berkedudukan di Mataram.⁴⁰⁾

Demikian pula di daerah pulau Sumbawa pemerintah membuka Sekolah Pertanian, sebagai klas tambahan dari *Vervolgschool*.

Penyuluhan dan berbagai kebun contoh dibuka untuk membimbing rakyat bertani secara intensif. Terutama di pulau Lombok sistem pengairan yang sudah mulai sejak kerajaan Mataram dikembangkan dan disempurnakan. Jaringan irigasi yang sempurna

40) J. Sunarno dkk, Mengedari Penjuru-Penjuru Pulau Lombok Halaman 40, Tahun 1961.

telah meningkatkan produksi pertanian. Tetapi zaman malaise sektor pertanian mengalami kesuraman karena ekspor beras berkurang. Maka rakyat pun banyak mengusahakan tanaman palawija berupa kacang-kacangan, jagung, juga tebu dan tembakau. Hasilnya lebih besar dari pada kalau menanam padi, yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Diantara beberapa petani ada juga yang mengusahakan perdagangan sendiri dan berhasil. Hasil ternak merupakan penghasilan kedua setelah pertanian, dan kebanyakan diekspor ke Singapura dan Hongkong. Hasil perkebunan yang diekspor ialah kopra. Pelabuhan ekspor seperti Ampenan, Labuhan Haji, Labuhan Sumbawa dan Bima. Aktivitas perdagangan yang ramai memerlukan tenaga halus dan kasar yang menimbulkan mobilitas sosial.

Kemungkinan terjadinya mobilitas sosial yang demikian itu karena dibantu oleh perkembangan sekolah yang semakin maju. Selain untuk mendapatkan tenaga di kantor-kantor, Belanda bermaksud membentengi diri dari bahaya Islam yang selalu ditakutinya. Dalam pengalamannya sejak awal pemerintahannya di pulau Lombok dan Sumbawa hampir semua perlawanan dijiwai oleh semangat Islam. Sekolah yang didirikannya pertama kali ialah *Tweede Inlandsche Eilandsche School* sampai klas IV di tiap kota penting menurut penilaiannya di waktu itu. Dalam tahap pertama sekolah semacam itu hanya terdapat di Mataram, Pringgabaya, Masbagik dan Praya di pulau Lombok. Sedangkan di pulau Sumbawa hanya terdapat di Sumbawa-besar dan Bima. Baru beberapa tahun kemudian dibuka pula *Volksschool* di tiap ibukota Kedistrikan (Kecamatan) dan *Vervolgschool* di tiap ibukota onderafdeeling yang sebelumnya tidak ada sekolah semacam itu. Yang diajarkan pada *Volksschool* ialah membaca, menulis dan berhitung. Melalui saringan tamatan *Volksschool* dapat melanjutkan ke *Vervolgschool* dengan uang sekolah rata-rata f 0,05 (lima sen).

Untuk keperluan anak-anak orang terkemuka di Mataram (1923) dan Bima (1919) dibuka HIS (*Holandsch Inlandsche School*) yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarannya. Lama pendidikan di HIS 7 tahun dengan uang sekolah sesuai dengan penghasilan orang tua murid. Rata-rata berkisar antara f 3,- — f 8,-. Guru-gurunya kebanyakan dari luar daerah, Jawa, Sulawesi dan Timor. ⁴¹⁾ Anak-anak yang pandai dan mampu dapat melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager*

Onderwijs), OSVIA dan lain-lain ke luar daerah, Jawa dan Sulawesi. Selain dari itu ada pula sekolah khusus bagi anak-anak wanita yaitu *Meisyes School* (Kopschool) yang didirikan di Bima pada tahun 1921. Untuk memenuhi kebutuhan guru desa maka pemerintah juga membuka sekolah guru OVO di Mataram, Selong, Sumbawa besar dan Bima. Lama pendidikan 2 tahun dari *Vervolgschool*. Murid-murid *Vervolgschool* juga diberi kesempatan untuk masuk *Normalschool* dengan ujian seleksi. Kebanyakan mereka melanjutkan pada sekolah Norma di Makasar dan Jember. Juga murid-murid lulusan *Vervolgschool* mendapat kesempatan masuk ke lingkungan sekolah Belanda dengan dibukanya sekolah schakel di Selong (Lombok Timur) pada tahun 1933. Murid-muridnya kebanyakan dari anak-anak pemuka masyarakat dan mampu. Sehingga kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu menjadi terdesak. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan badan-badan swasta dan organisasi sosial berusaha mendirikan sekolah umum maupun agama.

Organisasi sosial yang memelopori pendirian sekolah swasta di Lombok ialah Nahdhatul Wathan dan Muhammadiyah. Tahun 1935 Nahdhatul Watha di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid mendirikan Madrasah Ibtidaiyah di Pancor. Tahun 1937 Muhammadiyah di bawah pimpinan Asmo mendirikan Sekolah Mu'alimin di Pancor. Pada tahun itu juga Muhammadiyah mendirikan Sekolah Kemajuan Islam di Pancor di bawah pimpinan Haji Muhammad Sedek. Untuk keperluan pendidikan anak-anak pegawai pada tahun 1937 di Selong didirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak oleh Nyonya Nyoman Tahir dan di Mataram didirikan oleh Nyonya Subali. Di Swapraja Sumbawa sekolah swasta banyak diusahakan oleh organisasi-organisasi sosial seperti NU dengan mendirikan Madrasah NU, orang-orang Arab mendirikan *Al Irsyad*, Muhammadiyah mendirikan *Madrasah Ibtidaiyah* dan orang-orang Cina mendirikan Sekolah Cina. Di Swapraja Bima Muhammadiyah di bawah pimpinan A.D. Talu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah dan *Sekolah Aisyiah* dan orang-orang Arab mendirikan Madrasah *Al Irsyad*. Di samping itu ada pula sekolah agama Darul Ulum yang didirikan oleh Pemerintah Swapraja Bima. Selain itu Muhammadiyah di Lombok

- 41) Wawancara dengan permaisuri Sultan Sumbawa, tanggal 2-10-1978.
Wawancara dengan M. Rasyidi, tanggal 12 s/d 14-11-1978.

pada bulan Juli 1939 mendirikan *schakel school* di Mataram. Guru-gurunya antara lain Rasyidi, Harun, Haris, Muchtar Malaka dan Murdikun. Pelajaran yang diberikan bahasa Belanda, bahasa Indonesia, berhitung, ilmu sejarah dan gimnastik. Uang sekolah setiap anak murid 10 sen dengan jumlah muridnya sekitar 250 orang. Diluar organisasi Muhammadiyah, NU, *Per-satuan Islam Bima* (P I B) dan organisasi politik Parindra masing-masing membentuk kepanduan. Maka di tiap ibukota afdeeling dan onder afdeeling terdapat kepanduan Anshor, Hisbul Wathan dan Suryawirawan.

Di kota Bima dan Raba-Bima selain ketika kepanduan tersebut di atas terdapat pula kepanduan lokal yang dibentuk oleh P I B dengan nama *Kepanduan Muslimin Bima* pada tahun 1939⁴²⁾

Kehidupan kebudayaan khususnya kesenian berkembang dengan baik. Antara adat dan kesenian merupakan suatu jalinan yang erat dan dukung-mendukung dalam perwujudannya. Hampir tidak ada upacara adat tanpa kesenian. Minimal pembacaan lontar dan maximal mengadakan pertunjukan tari-tarian dari beberapa organisasi semacam festival dan pada malam penutupan diadakan pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk, jenis-jenis kesenian yang hidup dan berkembang pada saat itu seperti *oncer*, *rudat*, *cupak*, *kayaq sando*, *baris*, *tandak geroq*, *telek*, *gamelan beleq*, *pereret*, *barong tengkok*, *rebana*, *legong*, *arja*, *jangger*, *gandrung*, *tari tanak*, *lenggo*, *mpaa*, *se-re*, *sekeco*, *lawas*, *mpisi*, dan *seni tembong*. Kemajuan kesenian yang demikian itu disebabkan oleh adanya apresiasi masyarakat dan bantuan yang besar dari raja-raja seperti di pulau Sumbawa. Di pulau Sumbawa raja menyediakan sawah adat yang diberikan kepada setiap pemain dengan hak pakai turun-temurun. Tersedianya tanah yang hasilnya mencukupi kebutuhan hidup, menjadikan mereka selalu berlatih dan meningkatkan diri yang menyemarakkan setiap upacara adat atau keramaian di istana raja. Perkembangan seni ukir terbatas pada hiasan batu nisan dan hiasan bangunan. Pandai emas dan perak terdapat di Sekarbela,

42). Wawancara dengan Rasyidi, tanggal 12 s/d 14 - 11 - 1978.

Wawancara dengan I Wayan Gde, tanggal 9 s/d 10 - 11 - 1978.

Wawancara dengan Umar, tanggal 16 s/d 17 - 11 - 1978.

Wawancara dengan R. Sumantri, tanggal 18 s/d 19 - 11 - 1978.

Wawancara dengan R. Subali, tanggal 20 s/d 21 - 11 - 1978.

Wawancara dengan M. Saleh Ntobu, A.D. Talu., H. MThayeb Abdullah, tanggal 22 s/d 25 - 11 - 1978.

Kamasan dan Sumbawa besar dan Bima. Mereka membuat perhiasan dan alat rumah tangga. Pertenunan dengan berbagai motif hiasan yang indah berkembang di seluruh pulau Lombok dan Sumbawa. Pada waktu itu seolah-olah sudah menjadi ketentuan bahwa seseorang gadis baru dapat kawin bila sudah mempunyai kain tenun yang banyak. Anyam-anyaman dari bambu dan daun lontar banyak terdapat di Kotaraja dan Terara. Seni sastra juga tumbuh dan berkembang dengan baik sekali. Selain merupakan kelanjutan yang lama juga terdapat hasil ciptaan baru, seperti *Babad Gandor*, *Babad Pringgabaya*, *Rereg Sasak*, *Anak Jawak* dan lain-lain.

Sikap pemerintah Belanda yang selalu menjauhkan pemimpin-pemimpin Islam, tidak melemahkan semangat mereka. Malah para pemuka agama semakin aktif mengadakan tabligh ke kampung-kampung di samping membuka pengajian kontinyu di tempat mereka masing-masing. Namun pengawasannya tetap tanggung jawab Kepala Distrik. Lembaga pendidikan yang mereka adakan lebih terkenal dengan nama Pondok Pesantren. Ilmu yang diajarkan seperti *ushul*, *figh* dan tasawuf, nahu dan syaraf. Di pulau Lombok tercatat nama-nama mubaligh yang terkenal seperti : Tuan Guru Haji Umar Kelayu Tuan Guru Haji Badarul Islam Pancor, Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, Tuan Guru Haji Saleh Bengkel, Tuan Guru Haji Abdulhamid Dasan Agung, Tuan Guru Haji As'ari Sekarbala, Tuan Guru Haji Abdulkarim Praya, Tuan Guru Haji Mali Pagutan, Tuan Guru Haji Syarifuddin Pancor, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Kelayu, Tuan Guru Haji Abdullah Kelayu, Tuan Guru Haji Zainuddin Tanjung, Tuan Guru Haji Subagan Kopang, Tuan Guru Haji Sidik Karang Kelok (Sufi), Tuan Guru Haji Ibrahim Tanjungluar, Tuan Guru Haji Muhammad Mertak (Sufi), Tuan Guru Haji As'ari Kediri, Tuan guru Haji Abdulhamid Kediri, Tuan Guru Haji Abdulhafidz Kediri, Tuan Guru Haji Muchtar Abdulmalik Kediri, Tuan Guru Haji Abdulkarim Kediri, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Bengkel, Tuan Guru Haji Umar Praya. Di pulau Sumbawa terkenal imam-imam istana, dan beberapa ulama seperti Haji Zainuddin di Utan, Haji Mustafa di Empang. Syekh H.M. Tahir dari Teke, T.G.H. Abubakar dari Teke, T.G.H. Abdurrahman Idris T.G.H. Ishaka Abdulkadir, T.G.H. Said dari Ngali, T.G.H. Yasin T.G.H. Usman Abidin, T.G.H. Abubakar Husen, Syek Mansur dan Syek Muhammad. Beliau-beliau itulah yang telah me-

letakkan dasar bagi perkembangan dan peningkatan agama di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan gigih dan tak kenal putus asa. Dari sebagian besar penduduk pulau Lombok Penganut Islam Waktu Telu pada awal abad ke- 20, pada seperdua dari pertengahan abad ke- 20 berangsur-angsur jumlah itu menjadi merosot, tinggal di daerah-daerah yang terpencil yang tersebar di seluruh pulau Lombok seperti Tanjung, Bayan, Obelobel, Sembalun, Pengadangan, Sapit, Sukarara, Pujut, Jonggat Utara, Narmada, Batukumbung, Karangbayan, Lingsar dan Lainnya Di daerah pulau Sumbawa masih terdapat orang-orang Donggo yang tetap pada agama nenek moyang yang berdasarkan penyembahan roh nenek moyang dan Dewa Laut.

Para ulama aktif membuka pengajian-pengajian dan pondok seperti pondok di Kediri yang didirikan sejak tahun 1919 oleh Tuan Guru **Haji As'ari**, Tuan Guru **Haji Muchtar Abdulmalik**, Tuan Guru **Haji Mustafa** dan tahun 1924 oleh Tuan Guru **Haji Abdulkarim**. Pondok ini berkembang terus dan dilanjutkan oleh ulama-ulama Tuan Guru **Haji Abdulhamid**, Tuan Guru **Haji Abdulhafidz** dan Tuan Guru **Haji Ibrahim**. Di Kopang (Lombok Tengah) pondok pesantren yang didirikan oleh **Sayid Alwi** sejak tahun 1919 berkembang terus. Murid-muridnya berdatangan dari seluruh daerah Lombok, bahkan juga yang datang dari pulau Bali (Jembrana, Buleleng dan Klungkung). Biaya penyelenggaraannya diusahakan sepenuhnya oleh para ulama tersebut. Anak-anak hanya membawa bekal dari rumah. Uang sekolah tidak dipungut dan akomodasi gratis yang disediakan oleh pondok. Murid-murid diam di pondok-pondok yang sederhana dan masak sendiri. Mereka belajar secara duduk di tikar, belum memakai bangku. Pondok-pondok semacam ini mengikuti pola lama yang banyak diselenggarakan bagi pengajian orang dewasa, seperti di Kelayu, Kopang (1919), Lopen, Praya dan Bengkel tahun 1925, Pancor tahun 1935. Bedanya dengan kelompok pengajian biasa ialah anak-anak di pondok sudah menerima pelajaran secara teratur setiap hari dari pagi sampai siang berdasarkan kurikulum yang sudah diatur secara modern.⁴³⁾ Murid-murid inilah yang kemudian mengembangkan dan meningkatkan pendidikan agama di desa asalnya dengan memberikan pelajaran

43). Wawancara dengan Halidi, tanggal 28 - 11 - 1978.

mengaji Kitab Suci Al Qur'an pada anak-anak. Di antaranya ada pula yang mendirikan pondok pesantren atau kelompok pengajian yang didirikan di desa-desa yang diberikan secara bergilir. Lain pula kelompok pengajian belajar membaca Al Qur'an yang diselenggarakan di langgar dan di mesjid dan di rumah-rumah. Salah seorang di antara Tuan Guru yang sangat aktif ialah Tuan Guru Muhammad Saleh dari Loran Lombok Tengah. Beliau sangat berjasa dalam usaha menegakkan agama Islam di Lombok. Beliau telah banyak menyadarkan ummat Islam dari kelalaiannya mengerjakan ibadah dan menuntun ummat Islam Waktu Telu kepada ajaran agama Islam yang *haq*. Di samping beliau mengajarkan fiqh dan ushul juga beliau mengajarkan *thareqat*. Beliau sangat disegani oleh sahabat-sahabatnya karena kuatnya beribadah seperti pembawaan wali-wali ullah. Pusat-pusat *thareqat* lainnya ialah Sakra, Padamara, Sisik, Mesonggak, Gerung, Karang kelok, Mataram. Pengikutnya kebanyakan orang tua saja. Orang-orang muda dilarang karena jiwanya dianggap belum stabil. Aliran *thareqat* yang berkembang *Naksabandiyah*, *Qadariyah*, *Atthohiriyah*, *Samaniyah* dan lain-lain. Tujuan *thareqat* ialah mempertebal imam dalam hati pengikut-pengikutnya, sehingga tidak ada yang lebih indah dan dicintai selain dari pada Tuhan, dan kecintaan itu melupakan dirinya dan dunia ini seluruhnya.

Sementara itu kedudukan ulama di dalam masyarakat menjadi sangat penting. Kebanyakan rakyat menganggap mereka keramat dan mendapat penghormatan yang luar biasa. Tingkah laku dan tutur kata serta petuanya menjadi pedoman bagi murid-muridnya. Pemerintah Belanda berusaha untuk melemahkan pengaruh Tuan Guru dengan berbagai cara.

Menyadarkan ummat Islam Waktu Telu dari kekeliruannya dan supaya kembali kepada ajaran yang benar sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist, bukanlah pekerjaan yang mudah. Lebih-lebih kalau pemimpin atau orang terkemuka di dalam masyarakat tersebut tidak berhasil disadarkan. Maka beliaulah yang memelopori penolakan secara terang-terangan meminta keliang (Kepala Kampung) dan Kepala Desa dari golongannya sendiri, terpisah dari orang Islam Waktu Lima, seperti yang terjadi di Darek tahun 1937 dalam suatu pertemuan antara pemuka-pemuka Waktu Telu dengan pemerintah yang dihadiri juga oleh Asis-

ten Residen dan Kontrolur Lombok Tengah dan para Kepala Distrik Lombok Tengah. Tetapi atas keberatan para Kepala Distrik, antara lain Lalu Wirantanus, Kepala Distrik Praya, maka permohonan mereka ditolak. Alasannya karena mereka (Waktu Telu) adalah orang-orang Sasak dari golongan Islam sehingga tidak ada alasan untuk memisahkan diri dari golongan Islam Waktu Lima. Pada tahun 1937 pondok pesantren di Pancor di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Zainuddin Abdulmajid diubah menjadi *Madrasah Ibtidaiyah*.

Di pulau Sumbawa pada tahun 1937 masuk paham Muhammadiyah yang kebanyakan pengikutnya terdiri dari golongan muda yang moderat. Pelopornya antara lain Idris M. Ja'far, Moh. Hasan dan A.D. Talu. Muhammadiyah mendapat sambutan di hati rakyat dan dalam waktu yang singkat berkembang sampai ke desa-desa. Kepesatannya telah menimbulkan pertentangan dengan golongan konservatif yang menamakan dirinya *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang tidak dapat menerima cara berpikir baru yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Dan mereka yang tidak senang dengan Muhammadiyah membentuk organisasi *Perhimpunan Islam Bima (P I B)* pada tahun 1938. Tokoh-tokohnya. H. Sulaiman dan H. Usman Abidin. Usahanya yang riil mendirikan *Ibtidaiyah Islamiyah*. Meskipun demikian Muhammadiyah semakin berkembang dan pengikut paham tua semakin merosot. Karena pemikirannya yang maju, menarik tokoh-tokoh muda dan sebagian usahanya mendirikan sekolah agama. Maka melihat kenyataan ini beberapa pemimpin Islam menyadari, bahwa perpecahan tidak mendatangkan manfaat sehingga timbul cita-cita untuk mempersatukan kedua golongan dengan mendirikan *Ikatan Qaum Muslim (Iqam)*, yang dipelopori oleh Idris M. Ja'far (dari Muhammadiyah) dan H. Usman Abidin (dari PIB).⁴⁴

Situasi di Eropa yang semula hendak ditutupi oleh Pemerintah Hindia Belanda dari pengetahuan masyarakat, tidak dapat dipertahankan lagi. Dari pers sebagian rakyat yang menjadi pegawai, mengetahui situasi yang sebenarnya dan pengetahuan ini sampai kepada masyarakat dalam bentuk lisan dari mulut ke mulut. Juga mereka mendengar dan mengetahui

44). Wawancara dengan M. Saleh Ntobu, A.D. Talu dan H.M. Thayep Abdullah, tanggal 22 s/d 25 - 11 - 1978.

bagaimana gabungan politik Indonesia (GAPI) di bawah pimpinan Muhammad Husni Thamrin, Mr Amir Syarifuddin dan Abikusno Cokrosuyoso menuntut Indonesia berparleman. ⁴⁵). Mengetahui keadaan yang sebenarnya, masyarakat menyambutnya dengan perasaan lega. Harapan rakyat dengan kepergian Belanda keadaan akan menjadi lebih makmur. Barang-barang akan menjadi murah. Masyarakat terlalu lama merasakan kesulitan hidup, lebih-lebih daerah-daerah yang selalu ditimpa kelaparan seperti yang diderita secara berturut-turut oleh sebagian masyarakat Lombok Selatan pada tahun 1938, daerah Lape dan Lopok di pulau Sumbawa. Pajak yang semakin berat karena pada umumnya harga barang hasil pertanian sangat murah dan uang sulit dicari. Harga barang industri tidak seimbang dengan harga barang produksi pertanian. ⁴⁶). Maka rakyat sangat mengharapkan kedatangan Jepang untuk membebaskan mereka dari kemiskinan dari kekuasaan Belanda. Harapan dan sikap masyarakat yang demikian itu memang sudah lama ditiup-tiupkan dan dibiina oleh kaki tangan Jepang yang menyamar sebagai pedagang barang kelontong, tekstil dan sepeda. Di Cakranegara terdapat toko Miyure, sebuah toko Jepang yang menjual sepeda. Penjualannya sangat murah dan secara kredit sampai ke desa-desa. Petugasnya keliling ke desa-desa mengunjungi langganannya sambil memberikan propaganda tentang kebaikan Jepang. Propagandanya sangat termakan oleh masyarakat yang menimbulkan harapan akan masa depan yang lebih cerah dari pada di bawah Pemerintahan Belanda. Orang Jepang di Nusa Tenggara Barat hanya beberapa saja. Selain yang berjualan sepeda di Cakranegara (Lombok Barat), di Praya (Lombok Tengah) seorang Jepang bernama Omitami bekerja menjadi masinis di pabrik padi. Di Praubanyar Lombok Timur terdapat seorang lagi bernama Yamashita. Pekerjaannya sebagai tukang foto profesional yang keluar masuk kampung setiap hari. Ohakami dan Yamashita keduanya kawin dengan wanita Sasak. Kemudian setelah pendudukan Jepang, barulah masyarakat mengetahui bahwa mereka itu adalah opsir yang bertugas sebagai mata-mata Jepang.⁴⁷).

45). Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, halaman 23, Tahun 1975.

46). Wawancara dengan Lalu Wirantanus, tanggal 22 - 7 - 1978.

Wawancara dengan Lalu Muhammad Zain, tanggal 1 - 10 - 1978.

47). Wawancara dengan M. Samingan, tanggal 28 - 12 - 1978.

Akibat sikap Pemerintah Belanda yang angkuh dan ditambah pula oleh kemiskinan yang disebabkan oleh depresi ekonomi yang menghambat sejak tahun 1932 - 1934 yang akibatnya terus terasa dan terkesan di hati rakyat serta bencana alam kekurangan hujan pada tahun 1937/1938 yang memakan ratusan jiwa yang meninggal dunia di Lombok dan Sumbawa menyebabkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah bertambah renggang. Meskipun demikian tidak ada niat dan usaha pemerintah untuk memperbaiki hubungan yang mulai rusak itu. Malah karena negeri Belanda sendiri sudah mulai terancam oleh bahaya Perang Dunia ke II Pemerintah Belanda di daerah harus bekerja keras membanting tulang mengumpulkan dana untuk membiayai pemerintahannya. Tunggakan pajak yang lama harus dilunasi yang sangat memberatkan rakyat. Dan agar berhasil maka diadakan tekanan melalui pamong praja pribumi, seperti Sultan, Demung, Kepala Distrik dan Kepala Desa. Tindakan ini kurang menyenangkan Pamong praja pribumi. Ketidak-senangan mereka itu disadari benar oleh Pemerintah Belanda maka untuk tidak menambah parahnya situasi, maka surat-surat kabar yang masuk ke pulau Lombok dan Pulau Sumbawa diawasi dengan ketat. Pegawai-pegawai dilarang berlangganan surat kabar.

Dan kepada masyarakat Lombok dijanjikan akan diberikan dua buah pemerintahan kerajaan yang akan dipisahkan oleh sungai Babak. Usaha ini ialah untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak terpengaruh oleh aktivitas politik di pusat yang menuntut Indonesia berparlemen.

Terhadap tokoh pergerakan diadakan pengawasan yang ketat. Hak berkumpul dan berapat dibatasi. Tugas pengawasan itu dibebankan kepada Kepala Swapraja dan semua Kepala Distrik. Kepada setiap orang yang melanggar ditangkap dan ditahan di dalam penjara.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

Situasi politik yang semakin panas di dalam negeri, bertambah panas oleh politik Jepang yang ingin mendapat sumber bahan mentah dari Indonesia. Pembicaraan antara misi Perdagangan Jepang di bawah pimpinan Kebayashi dengan pihak Hindia Belanda dibawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook menemui jalan buntu. Kegagalan itu menimbulkan kegelisahan di kalangan Pemerintah Belanda di daerah Lombok dan Sumbawa. Menurut perhitungan mereka perang dengan Jepang tidak mungkin dapat dielakan lagi. Maka anak-anak dan wanita Belanda segera dikirim ke pulau Jawa. Dan ketika Perang Pasifik pecah dengan diserbunya pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 Pemerintah Belanda di daerah Lombok dan Sumbawa semakin gelisah. Pernyataan perang Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachhouwer kepada Jepang lima jam kemudian menambah kepanikan di kalangan orang-orang Belanda. Mereka itu seolah-olah kehilangan semangat dan berusaha mendekati para Sultan dan Kepala Distrik. Kepada mereka dinasehatinya kalau Jepang menang supaya menyerah saja. Dan supaya perbekalan jangan sampai jatuh ke tangan Jepang, pemerintah membentuk Barisan Perusak. Di Lombok Barisan Perusak dipimpin oleh Ir. Putuhena Kepala Dinas Pembangunan Umum dan Pengairan sedangkan Komandannya, ditunjuk Mamiq Fadelah. Barisan Perusak bertugas untuk memusnahkan semua sarana dan prasarana serta perbekalan seperti minyak dan bahan makanan. Tetapi berkat kecerdikan Mamiq Fadelah dan Ir. Putuhena serta beberapa orang masyarakat terkemuka, Belanda mengurungkan niatnya untuk memusnahkan segala sarana dan perbekalan yang sangat berharga itu. Bahan bakar dan bahan makanan yang sedianya akan dimusnahkan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Tindakan itu sempat meredakan kebencian rakyat yang pada akhir-akhir itu selalu mendambakan kepergian Belanda dari daerahnya. Sisa bahan bakar sebanyak 3.000 drum yang tidak dibagi-bagikan kepada rakyat disimpan oleh Mamiq

Fadelah di Belet (Lombok Timur).⁴⁸) Gedung-gedung dan jembatan pun sempat diselamatkan dari kehancuran. Kecuali jembatan Pelabuhan Ampenan dan beberapa puluh kendaraan sempat dihancurkan. Di pulau Sumbawa pun Belanda tidak sempat melakukan penghancuran karena panik oleh berita penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal H. Imamura pada tanggal 8 Maret 1942. Di Bima kas mulai kosong. Sementara itu di kalangan pegawai gaji mereka telah beberapa bulan tidak dibayar. Secara rahasia mereka yang tidak puas dengan keadaan bergabung dalam suatu komite pembebasan bersama-sama dengan pemuda-pemuda dari Hisbul Wathan dan Anshor. Serdadu KNIL yang berjumlah sekitar 14 orang itu dipimpin oleh Aritonang, dengan anggotanya antara lain; Sutawijaya, Sinolon, Simatupang, D. Saria dan Amir. Dari kalangan pemuda antara lain: Muhammad Qosmir, Muhammad Yahya, Hakim Hantabi, Amin Daeng Emo, Burhanuddin, Pieter Siun, H.Talib, Yusuf Salam, Sudarmono, Suwondo, Sudiran, Adhuri, Iskandar, Supardi, M.Sidik H.Rati, Capi, Rato Stambe, Yusuf Sulaiman, Nur Sulaiman, M.Said Hasny, Muhammad Yakub Monggo dan H. Yasin Dena. Situasi semakin gawat semenjak tibanya dua orang penerbang Belanda di Bima pada tanggal 30 April 1942 yang berusaha melarikan diri dari Kendari (Sulawesi) menuju Australia. Di Bima mereka merusak sebuah perahu Madura yang menolak membawa mereka ke Australia tanpa reaksi dari Pemerintah Belanda yang pada waktu itu masih memegang kekuasaan. Tindakan kedua penerbang itu menambah kemarahan mereka yang tergabung di dalam komite pembebasan kepada pemerintah Belanda. Mereka merencanakan akan melakukan perebutan kekuasaan pada tanggal 5 April 1942 jam 07.00 (pagi) dengan cara menangkap semua pejabat Belanda dengan jalan menghindari pertumpahan darah sejauh mungkin.

Dalam rangka usaha perebutan kekuasaan itu komite pembebasan menugaskan Aritonang dengan dibantu oleh Sutawijaya, Pieter Siun, Adhuri, Iskandar dan Muhammad untuk mengepung Asrama Polisi di Raba dan menangkap semua orang Belanda. Muhammad Qasmir, Nuhung, Sinolon dan Amir ditugaskan untuk mengamankan alat-alat komunikasi yang vital terutama sentral tele-

⁴⁸) Wawancara dengan Mamiq Fadelah, tanggal 15-10-1978.

pon Raba dan Radio di kamar bola. Supaya Belanda tidak dapat meloloskan diri ke luar kota diadakan pos-pos jaga di Kumbe di bawah pimpinan Suwondo dan Sudirman, di Dorondula di bawah pimpinan M.Yahya, di Podolo di bawah pimpinan Hakim Hantabi, dan di jembatan Ronggo dipimpin oleh Burhanuddin. Sebelum aksi penangkapan dilancarkan, pada malam hari tanggal 5 April 1942 H.E.Haak (Asisten Residen), Pons (Direktur *Algemeene Volk Crediet Bank*) dan J.W.Ros (*Bosch Architect*) sempat melarikan diri ke Sumbawabesar dengan membawa semua uang kas bank. Pejabat-pejabat Belanda yang tidak sempat melarikan diri dapat ditawan tanpa perlawanan. Mereka itu antara lain:

- | | | | |
|----|------------------|---|-------------------|
| 1. | Mr. Hachman | : | Kontrolur. |
| 2. | Karsboom | : | Agen K P M. |
| 3. | Bavelaar | : | Agen B P M. |
| 4. | K e p e r | : | Inspektur Polisi |
| 5. | Van der Capellen | : | Hoofd opziechter. |
| 6. | L u l l e r | : | Hoofd Cipier. |
| 7. | Daniel Adu | : | Mantri polisi. |

Maka sejak saat itu berakhirilah kekuasaan Pemerintah Belanda di Bima dan kekuasaan sepenuhnya kembali ke tangan Sultan Bima, M.Salahuddin.

Di Sumbawabesar H.E.Haak berusaha untuk memperoleh bantuan dari Sultan Sumbawa untuk membebaskan teman-temannya yang tertawan di Bima dengan menghasut bahwa rakyat Bima akan menyerang Sultan Sumbawa secara besar-besaran dan membohongi Sultan Sumbawa bahwa Sultan Muhammad Salahuddin (mertua Sultan Sumbawa) sudah ditangkap dan dipenjarakan oleh rakyat Bima.⁴⁹). Hasutan Mr. Haak tidak ditanggapi oleh Sultan Sumbawa. Maka mereka meminta bantuan polisi dari Lombok. Belanda berusaha hendak kembali ke Bima di Soriutu (Dompu) Belanda menderita dua orang korban yaitu kedua penerbang Belanda yang ikut bersama Asisten Residen Bima lari ke Sumbawa besar. Dari pihak rakyat Bima jatuh seorang korban yaitu Idris Hakim. Pasukan Belanda kembali dalam keadaan kacau balau ke Sumbawabesar. Sisa pasukannya ditangkap oleh rakyat Sumbawa atas perintah Sultan Sumbawa.

⁴⁹) H.Abdullah Thayep B.A. dkk, Selayang Pandang Sejarah Perjuangan Rakyat Bima, halaman 31-33, Tahun 1978.

Sebelum peristiwa penahanan orang Belanda di Bima, di Sumbawabesar terjadi insiden antara pemuda Anshor di bawah pimpinan Lalu Imbang dengan Pemerintah Belanda. Mula-mula diawali dengan penurunan bendera Belanda dan gambar Wilhelmina di sebuah sekolah di Lopok. Beberapa hari kemudian terjadi pula *Gerakan Raboran* di bawah pimpinan Sanro Acin yang hendak menyerang orang-orang Belanda di Sumbawabesar. Tetapi gagal karena lebih dahulu diketahui oleh Marsose. Tiga hari kemudian Belanda melarikan diri ke Lombok dengan membawa uang. Karena itu atas perintah Sultan, Kepala Bank Rakyat Srono ditangkap oleh Anshor di bawah pimpinan Lalu Imbang. Waar seorang Agen KPM di Sumbawabesar dan yang banyak menghasut rakyat supaya melawan kepada Jepang yang kemudian melarikan diri ke Lombok ditangkap oleh Lalu Moh. Zain Mustami, Lalu Majid, Moh Cen Anwar, Haji Mahmud (Penghulu) dan Haji Muhammad (Lebe Dalam) atas perintah Sultan Sumbawa. Ia diambil di tempatnya ditawan di Tete Batu (Lombok Timur) kemudian dipenjarakan di Sumbawabesar. Sultan Sumbawa yang telah mengungsi ke luar kota kembali lagi ke istananya untuk memegang tampuk pemerintahan.⁵⁰⁾

Seluruh rakyat merasa lega. Berita-berita mengenai kemajuan yang dicapai oleh Jepang dalam setiap sektor pertempuran menimbulkan kebanggaan di kalangan masyarakat. Kegembiraan dan kebanggaan itu disebabkan karena Jepang dapat mengalahkan Belanda dengan mudah.

Belanda yang selama ini dianggap kuat kenyataannya tidak lebih ibarat pohon besar yang bergeronggang di dalamnya. Tak mempunyai kekuatan dan daya tahan sama sekali. Lebih-lebih lagi kegembiraan masyarakat setelah mendengar bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia bukan untuk menjajah tetapi untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kekuasaan Pemerintah Belanda. Menurut pikiran rakyat, berkat Jepang lah maka penjajahan Belanda dapat dihapuskan dengan semboyan kemakmuran dan Asia untuk bangsa Asia, Jepang Indonesia sama-sama atau Jepang ada-

⁵⁰⁾ Wawancara dengan Lalu Mala, tanggal 30-9-1978.
Wawancara dengan Lalu Moh Zain Mustami, tanggal 1-10-1978.
Wawancara dengan Lalu M. Abdulmajid, tanggal 2-10-1978.
Wawancara dengan Lalu Imbang, tanggal 2-10-1978.

lah saudara tua banyak di antara rakyat dan pemimpinnya yang terpikat hatinya kepada Jepang. Semboyan itu didengar secara langsung dari pemimpin masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah seperti Kepala Distrik dan Kepala Desa. Juga ceritera dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh rakyat yang kebetulan mendengar radio atau membaca surat kabar. Rakyat sangat percaya bahwa Jepang benar-benar menjalankan Perang Suci demi kebebasan bangsa Asia seluruhnya. Dan yang terutama sekali rakyat sangat termakan oleh berita dan pengharapan, bahwa di bawah Pemerintahan Jepang segala barang kebutuhan akan murah. Mereka telah terlalu lama merasakan penderitaan di bawah penjajahan Belanda. Pembayaran pajak tanah, pajak jalan dan kerja rodi yang semakin meningkat dirasakan sangat berat oleh rakyat. Sehingga tidak heran kalau mereka selalu mendambakan kebebasan dan karena jujur dan ikhlasnya mereka pun menganggap Jepang adalah jujur dan berjanji yang sebenarnya. Mereka tidak syak sedikit pun apalagi yang menyampaikannya adalah pemimpin-pemimpin mereka yang terpercaya dan disegani. Terutama di Lombok, sebagian besar masyarakatnya simpatik kepada Jepang. Sejak lama mereka dikagumi oleh barang-barang Jepang yang membanjiri pasar yang harganya murah. Orang-orang Jepang sendiri terkenal ramah-tamah dan pemurah. Salah seorang yang terkenal ialah seorang Jepang pemilik toko Mayore di Cakranegara. Ia menjual sepeda secara kontan dan angsuran. Angsurannya rendah dan yang beli kredit boleh siapa saja tanpa membedakan pangkat jabatan dan kedudukannya di dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat merasa puas karena merasa dihargai, penghargaan mana tidak mungkin diperoleh dari orang Asing lainnya, apalagi dari orang Belanda. Sehingga karena percayanya kepada janji-janji Jepang, tidak sedikit orang-orang yang mengobrol barang-barang dagangannya dengan harga rendah dengan harapan bila Jepang sudah berkuasa di Indonesia barang-barang serupa akan dapat dibelinya dengan harga yang jauh lebih murah.

Masyarakat di pulau Lombok dan Sumbawa telah lama mengenal Jepang lewat barang-barang produksinya yang memenuhi pasaran. Masyarakat telah lama mengenal betapa keunggulan Jepang dalam memproduksi barang-barang pakaian dan alat rumah-tangga. Maka sejak diberitakan bahwa Pemerintah Belanda sudah menyerah, rakyat selalu menanti kedatangan balatentara Jepang dengan penuh harapan. Di pulau Lombok pendaratan Je-

pang lebih awal dari di pulau Sumbawa.

Pertama kali Jepang mendarat di Ampenan pada 8 Mei 1942. Kedatangannya disambut oleh semua Kepala Distrik dan dielu-elukan dengan bendera dan nyanyian Jepang oleh anak-anak sekolah.⁵¹⁾ Pendaratan pada tanggal 8 Mei 1942 di Ampenan dilindungi pesawat tempur. Pada tanggal 12 Mei 1942 mendarat pula Angkatan Daratnya di Labuhan Haji dipimpin oleh seorang Kapten. Kedatangannya yang disambut oleh Mamiq Fadelah bersama pegawai pemerintah. Semua pejabat Belanda berkumpul di rumah Asisten Residen di Mataram dan bersama-sama menyerah kepada Jepang.⁵²⁾

Sultan Bima yang menyadari, bahwa tentara Jepang pasti akan datang, maka sebelumnya beliau telah lebih dahulu mengirim utusan, untuk menemui pimpinan tentara Jepang ke Jawa, Makasar (Ujung Pandang sekarang) dan Waingapu. Ke Jawa diutus A.D. Talu, Nazaruddin, Sudirman, H.Yasin (penghulu), Hakim Hantabi dan Pieter Siun. Ke pulau Kelapa di Selat Sape diutus:

M.Yahya, M. Ali Matos dan Abdurrahim. Ke Makasar: Yusuf Sulaiman dan M.Saleh Ntobu, A.Wahid Ince. Ke Waingapu: M. Sidiq, H.Rati dan Burhanuddin. Utusan yang ke Jawa kembali bersama pasukan Jepang yang mendarat pada tanggal 17 Juli 1942 di bawah pimpinan Komandan pasukan payung Kolonel Saito. Mereka diterima di istana dan disambut oleh rakyat dengan meriah. Rakyat membanjiri halaman istana untuk mendengar pidatonya yang diterjemahkan oleh juru bahasa Ikuyama.⁵³⁾

Pendaratannya di Kesultanan Sumbawa melalui Labuhan Sumbawa, yang disambut oleh Sultan dan para pejabat istana dan demung. Di mana-mana tentara Jepang disambut dengan gembira oleh rakyat sambil mengacung-acungkan bendera Jepang. Hanya sedikit saja diantara mereka yang takut karena kurang luas alam pengertiannya. Mereka itu adalah rakyat yang terpencil hidupnya yang pada zaman Belanda hanya mengenal Kepala Desa dan Kepala Distrik saja. Sedangkan Belanda hanya dikenalnya dari ceritera dan dari mata uang yang mereka pergunakan. Selebihnya mereka tidak mengerti mengapa Belanda di negerinya. Demikian

⁵¹⁾ Wawancara dengan M.Rasyidi, tanggal 12 s/d 14-11-1978.

⁵²⁾ A.J. Sunarno dkk, *Mengedari Penjuru-Penjuru Pulau Lombok*, halaman 118, Tahun 1961.

⁵³⁾ H.Abdullah Thayep dkk, *Selayang Pandang Sejarah Penjuru Rakyat Bima*, halaman 34, Tahun 1978.

pula mengapa Jepang mengalahkan dan mengusir Belanda dan mengapa uang Belanda yang selama ini sangat bernilai dalam pandangan mereka, diganti dengan uang kertas yang mereka tidak mengerti. Bagi rakyat yang mengerti karena sekolah atau karena mereka menjadi pegawai atau guru merasa gembira karena Belanda yang dikenal mereka sombong dan angkuh dan yang sangat ditakuti rakyat, dapat dikalahkan dan dihina oleh Jepang.

Berhasilnya tentara Jepang menduduki daerah Lombok dan Sumbawa dengan mudah tanpa perlawanan sedikit pun, oleh karena sejak penyerahan G.G.Tjarda van Starkenborg Stachouwer, orang-orang Belanda di Nusa Tenggara Barat hanya memikirkan keselamatan dirinya. Urusan pemerintahan antara waktu penyerahan Hindia Belanda dengan pendaratan Jepang di Nusa Tenggara Barat hampir seluruhnya diurus oleh Pejabat pribumi. Di pulau Sumbawa diambil seluruhnya oleh Sultan dan di pulau Lombok oleh Kepala-Kepala Distrik. Maka sesuai dengan undang-undang No.1 Pasal 1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam-belas pada tanggal 7 Maret 1942 yang antara lain berbunyi: "Balatentara Nippon melangsungkan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang senantiasa yang sentausa dengan segera".⁵⁴), tentara pendudukan Jepang di Nusa Tenggara Barat segera mengadakan langkah-langkah penertiban. Semua orang Belanda ditahan dan dibawa ke luar Lombok, Pejabat-pejabat pribumi yang setia kepada Jepang diizinkan bekerja terus. Struktur organisasi pemerintah mulai disusun, yang pada hakekatnya tidak banyak perusahaan kecuali namanya saja. Pulau Lombok dan pulau Sumbawa masing-masing menjadi *ken*. Tiap *ken* dibagi atas *bun ken*, tiap *bun ken* terdiri atas *gun* dan *gun* dibagi atas *son*. Pulau Lombok dibagi menjadi 3 (tiga) *bun ken* dan pulau Sumbawa dibagi atas 2 (dua) *bun ken*. Daerah Lombok diperintah oleh seorang *Ken Kanrikang* yang berkedudukan di Mataram. *Ken Kanrikang* Sumbawa berkedudukan di Raba-Bima.

Jabatan *Ken Kanrikang* dan *Bun Ken Kanrikang* dijabat oleh orang Jepang. Sedangkan *Gunco* dan *Sonco* dijabat oleh pribumi dan kebanyakan Kepala Distrik dan Kepala Desa yang lama. Maksudnya untuk melancarkan urusan pemerintahan. Di samping

⁵⁴) Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah nasional Indonesia Jilid VI, Halaman 5, Tahun 1975.

itu swapraja Sumbawa dan swapraja Bima di pulau Sumbawa tetap diakui yang melaksanakan pemerintahan bersama-sama *Bun Ken Karikang*. Badan Pengadilan Zaman Hindia Belanda tidak berubah dengan tugas dan wewenang yang sama, tetapi selama Jepang memerintah Badan Pengadilan tidak berfungsi. Setiap kejahatan diurus langsung oleh *Kempetai*, yang pada umumnya bila sudah disiksa tersangka dilepas kembali tanpa dipenjara.

Pegawai-pegawai digaji berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri dan Lokal. Pegawai-pegawai yang pada Zaman Belanda digaji melebihi f 100,- dibayar dengan potongan yang besarnya berdasarkan ketentuan. Makin besar gajinya makin besar potongannya, berkisar antara 5% — 20%. Dan menurut ketentuan itu gaji pegawai Indonesia tidak boleh melebihi f 500,—⁵⁵).

Pemerintah Jepang juga mengharuskan setiap pegawai di kantor dan sekolah mengadakan upacara bendera *Hinomaru* setiap hari sambil menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*. Tarikh dan jam diganti dengan *Tarikh Sumera* dan jam Jepang. Juga rakyat diharuskan merayakan hari raya *Tencoseto*, hari lahirnya Kaisar Hiro hito. Alat pembayaran yang sah ialah rupiah kertas yang dikeluarkan pada Zaman Jepang. Uang kertas Belanda uang perak/logam Belanda dilarang. Di Lombok di samping uang kertas Jepang juga masih dipakai uang kepeng sebagai alat pembayaran.

Dalam usahanya untuk mendapatkan bantuan dari seluruh masyarakat Jepang membentuk Badan Propaganda yang anggotanya ditunjuk dari pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang berpengaruh, antara lain: Mamiq Fadelah, Raden Nune Nuraksa, Lalu Srinata, Go Sing Cong, Mamiq Muhammad, Lalu Durahman, H. Idris M. Ja'far dan Haji Abdulwahab. Dalam menjalankan tugasnya badan ini bergerak secara mobil dari desa ke desa bahkan bertugas sampai ke Bali. Propaganda dilakukan dengan pidato dan pementasan sandiwara yang dimainkan oleh pemuda-pemuda yang sengaja dibina untuk maksud itu. Propaganda bertujuan untuk mengerahkan segala tenaga dan kekuatan rakyat untuk membantu kepada usaha-usaha mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini dipertegas kemudian

⁵⁵) Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, Halaman 6—7* Tahun 1975.

oleh *Somobuco* (Kepala Departemen Urusan Umum). Mochiro Yamamoto pada upacara pembukaan Kantor Pusat Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada tanggal 16 April 1943.⁵⁶).

Sesuai dengan sifatnya yang militerisme, pemerintah Jepang mengadakan pembersihan di kalangan aparaturnya. Tetapi karena kekurangan tenaga, maka bagi pegawai yang tidak terang-terang menolak kerjasama dengan Jepang walaupun ada indikasi betapa kesetiaannya kepada Belanda sebelumnya, mereka dapat dimaafkan dan diperkerjakan terus dengan pengawasan. Sehingga tak seorang pun pegawai pribumi yang ditindak oleh Jepang. Kecuali jabatan *Ken Kanrikang* dan *Bunken Karikang*, jabatan-jabatan yang vital seperti Komandan Polisi, Kepala-Kepala Jawatan dipegang oleh Jepang yang mirip sebagai pengawas/polisi dari pada sebagai pimpinan. Di antaranya ada yang sama sekali tidak memahami tugasnya. Maka teknis operasional sepenuhnya ditentukan oleh staf pribumi asal tidak bertentangan dengan kepentingan untuk mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya.

F. SIKAP JEPANG TERHADAP BANGSA INDONESIA

Dengan kedok bahwa kedatangan Jepang di Indonesia tidak bermaksud menjajah, melainkan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang berusaha memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam masyarakat. Di Nusa Tenggara Barat Jepang dapat melihat tenaga kerja yang melimpah, tetapi tidak berpendidikan. Mereka sangat baik digunakan sebagai buruh kasar (*romusya*) untuk beberapa tujuan bagi memenangkan Perang Asia Timur Raya, antara lain untuk:

1. Meningkatkan hasil produksi pertanian, dan
2. Membuat tempat-tempat pertahanan.

Rakyat diklasifikasikan berdasarkan pendidikan dan statusnya di dalam masyarakat.

56). Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Halaman 11, Tahun 1975.

- a. Rakyat yang buta huruf
- b. Rakyat yang pandai tulis baca,
- c. Cerdik cendekiawan
- d. Alim ulama,
- e. Tokoh-tokoh adat.

Sebelum Jepang malangkah kepada tujuannya yang tersembunyi, Jepang memperhebat propaganda. Rakyat diajar mengenal kawan dan lawan. Karena umumnya tokoh-tokoh propaganda kebanyakan dari pemimpin masyarakat dan pemerintahan yang berpengaruh dan berwibawa di kalangan masyarakat waktu itu, maka setiap propaganda diterima oleh masyarakat tanpa penyingkiran dan pertimbangan. Seluruh rakyat ikut-ikutan memben-ci dan menganggap Inggris dan Amerika sebagai lawan. Mereka juga percaya akan misi suci Jepang ke Indonesia. Sikap rakyat yang sangat patuh dan setia kepada pemimpin mereka memudahkan jalan bagi Jepang untuk mengeksploitasi rakyat damai menepati tujuannya. Tokoh-tokoh ulama pada zaman Hindia Belanda anti Barat dan tidak pernah kerjasama dengan Belanda mulai didekati Jepang. Hanya para ulama tidak mempergunakan kesempatan itu bagi pengembangan dakwah oleh karena rakyat tidak berani, serba takut. Juga karena Jepang selalu memata-matai gerak gerik para ulama. Bahkan kadang-kadang Jepang yang ikut-ikut berjamaah sewaktu sholat Jum'at. Apakah mereka Islam atau bukan tidak ada yang mengurusnya. Juga sebaliknya Jepang tidak pernah berusaha untuk mengorganisasi golongan agama ini dalam suatu kekuatan yang diarahkan bagi kepentingan Jepang sebab keadaan sosial ekonomi rakyat tidak memungkinkan. Kelompok yang mereka kenal selama ini hanyalah kelompok yang didasarkan kepada kharisma. Itulah kelompok pengajian yang menjadikan Tuan Guru Sebagai ikutan. Menyadari itu semua Jepang memberikan kelonggaran kepada para alim ulama untuk mengembangkan Islam. Madrasah-madrasah berjalan terus sebagai biasa tetapi tidak luput dari pengawasan Jepang agar mereka tidak mengadakan kegiatan politis,

Sedangkan tokoh-tokoh adat yang pada zaman Belanda mempunyai tempat yang lebih baik di dibandingkan dengan ulama, pada zaman Jepang tidak mendapat perhatian. Penganut mereka yang kebanyakan rakyat yang beragama Islam Waktu Telu pada penglihatan Jepang adalah rakyat yang malas dan statis. Kefa-

natikannya kepada adat menjadikan mereka seolah-olah acuh tak acuh kepada Jepang. Karena itu Jepang menilai mereka rakyat yang kurang pengertian dan kurang bermanfaat bagi men-sukseskan Perang Asia Timur Raya dan kemakmuran Asia Timur Raya di bawah Dai Nippon.

Di samping itu juga karena mereka yang demi golongan adat ini dihindangi oleh rasa rendah diri yang cenderung menjadikan mereka terisolasi yang dinilai Jepang seolah-olah mereka terlalu apatis, tetapi masih dapat dimanfaatkan bagi peningkatan produksi pertanian dan untuk penyelesaian pusat-pusat pertahanan dan jalan-jalan raya.

Lebih-lebih setelah pada tahun 1943 tentara Serikat mulai mengadakan pukulan balasan, Jepang menyadari betapa pentingnya partisipasi rakyat dalam segala bidang. Kekalahan demi kekalahan di berbagai sektor pertempuran juga telah mengubah taktik perang yang dijalankan selama ini dari ofensif menjadi defensif. Untuk memperkuat pertahanannya Jepang sangat memerlukan bantuan dari penduduk. Untuk keperluan pertahanan dan keamanan pada tahun 1943 pemuda-pemuda yang belum kawin, sehat dan berkelakuan baik, umur 14 - 22 tahun dikerahkan menjadi *Seinendan*, *Kaibodan* umur antara 23 - 35 tahun, *Heiho* umur antara 18 - 25 tahun.⁵⁷). Syarat yang lain mereka harus sudah pandai tulis baca. Kepada mereka itu diberikan latihan militer, seperti baris berbaris dan perang perangan dengan memakai senapan kayu atau tongkat bambu. *Seinendan* bertugas untuk membantu tugas-tugas kepolisian. *Heiho* sebagai pembantu prajurit dan pada saat genting mereka diangkat menjadi *kaigun* dan *rikugun* dengan senjata lengkap. Di Nusa Tenggara Barat kedudukan *Heiho* dipandang tinggi oleh rakyat. Di samping itu ada pula yang menjadi Peta, tetapi hanya beberapa orang saja. Yang terkenal ialah Putera Abdul kadir, putera Sultan Bima dengan pangkat opsir.

Tempat melatih para pemuda diadakan *Seinen Kurenso* di Mataram dan Bima. Selama latihan mereka digembleng mental dan fisiknya. Pelajaran yang diutamakan ialah *Seisyin* dan semangat. Semangat yang diutamakan ialah semangat satria

57). Lalu Wacana B.A. dkk, Sejarah Daerah NTB, halaman 147, Tahun 1977/1978.

atau *busyido* yang murni, yakni: berbakti kepada pemimpin rendah diri, jiwa budak dan menanamkan disiplin yang keras.⁵⁸). Dan semangat yang demikian tertanam luas di kalangan anak-anak, Kepala-kepala Sekolah juga dilatih di pusat-pusat latihan untuk mendapatkan latihan semangat, disiplin dan ketrampilan *taiso* (senam).

Untuk mengawasi dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang sosial, politik dan ekonomi, *Kompetai* dan *Toketai* disertai urusan intel dan langsung mengadili/mengusut bagi yang dianggap bersalah dengan mengenyampingkan lembaga Pengadilan yang ada.

Rakyat pun selalu dicekam rasa ketakutan, keadaan ekonomi semakin parah. Tindakan sewenang-wenang semakin tampak. Kekayaan rakyat dan tenaga rakyat dikerahkan bagi kepentingan perang. Mas dan perak, besi-besi tua dan senjata-senjata, keris dan pedang diminta dan dikumpulkan mereka. Padi dan ternak dibeli dengan harga yang murah. Dan dalam pelaksanaannya ada juga padi rakyat dan ternaknya yang tidak dibayar. Sehingga karena itu di suatu daerah seperti Lombok Selatan yang tadinya masyarakatnya hemat, suka menyimpan padi, pada zaman Jepang sifat hemat dan suka menyimpan berubah menjadi pemboros, baginya yang penting padinya tidak terlalu banyak diambil Jepang. Ayam dan itik asal mau mereka tangkap sendiri tanpa izin. Telur ayam mereka ambil sendiri di *sangkak* (kandang ayam) tanpa perasaan malu.

Segi positifnya juga ada, rakyat yang biasa kikir menjadi pemurah. Padinya diberikan cuma-cuma kepada orang lain. Ada yang ternaknya disembelih dan dijual murah kepada teman dan tetangganya atau dimakannya bersama-sama. Yang kelebihan padi menitip padinya kepada orang yang tidak memiliki padi dengan upah yang lumayan besarnya. Sehingga makanan menjadi merata. Bahan-bahan makanan yang lain, seperti ubi dan jagung banyak dan harganya murah. Orang-orang yang tidak mempunyai uang pun dapat minta atau menukar dengan barang dan bahan lain yang tidak dimiliki oleh petani. Hanya keadaan yang demikian tidak merata. Di beberapa tempat di daerah Bima ada juga yang kekurangan beras. Yang terasa sulit merata di seluruh daerah ialah pakaian. Jepang menjalankan mono-

58). Lalu Wacana B.A. dkk, sejarah Daerah NTB, halaman 149 - 150 Tahun 1977/1978.

poli. kapas. Yang boleh menanam dan mengusahakan kapas hanyalah Jepang yang diselenggarakan oleh *Kanibu*. Badan yang menyelenggarakan pengolahan, dan juga penanaman kapas adalah *Nanyo Kuhatso Kaitsha (Nanko)*.

Di Lombok Tengah Nanko dipimpin oleh Ashigawa. Tenaga teknisnya bernama Kamtjoek. Tenaga-tenaga lapangannya dan tenaga administrasinya adalah pemuda-pemuda daerah yang selain mendapat gaji juga mendapat uang jalan, beras, gula dan gula. Tenaga lapangan bertugas mengawasi dan memeriksa tanaman kapas dan menggeledah serta menyita benang dan tenunan yang tanpa izin. Agar si pelanggar tidak melanggar lagi alat-alat tenun dan alat pemintalannya yang dijumpai petugas pada saat melakukan pelanggaran juga disita. Petugas yang tidak tegas disiksa dan dipecat. Rakyat hanya boleh mengolah kapas dan benang milik Jepang dengan bagi hasil belah pinang.⁵⁹). Tetapi karena kebutuhan yang mendesak, dan harga kain di pasaran gelap yang menarik, maka rakyat pun tidak kehilangan akal. Mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi. Namun demikian tidak sedikit rakyat yang berpakaian karung. Sehingga penyakit kulit dan kutu badan merajalela. Fasilitas pengobatan sangat minim, walaupun yang datang berobat dipoliklinik terbatas pada anak-anak sekolah dan pegawai namun hanya dapat dilayani dengan tablet kina dan salep saja. Tenaga medis sangat kurang. Rakyat kebanyakan meminta bantuan dukun yang membuat obat dengan bahan tradisional.

Keresahan rakyat ditambah lagi dengan sikap Jepang yang meminta gadis kepada Sultan Bima untuk memuaskan nafsu tentaranya. Walaupun permintaannya itu dapat ditolak oleh Sultan M. Salahuddin atas dukungan rakyat namun sangat mengejutkan dan menggelisahkan yang menyebabkan setiap orang yang mempunyai anak gadis terburu-buru mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang disukainya. Karena khawatir anaknya akan diminta Jepang pada masa itu masyarakat Bima mengawinkan anak-anak mereka secara serentak. Untuk membangun saran pertahanan seperti gua-gua, jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya Jepang mengerahkan tenaga kasar melalui Kepala Distrik di Lombok dan Sultan di pulau Sumbawa. Tenaga rakyat yang di-

59). Wawancara dengan Lalu Ambawa, tanggal 30 - 7 - 1978.

kerahkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan kapas, yute dan jarak. Tetapi ketika tenaga-tenaga yang diperlukan sulit didapat karena kebanyakan rakyat menghilang maka tumpuan kemarahan adalah Kepala Desa. Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi jatahnya dipukul di muka umum, disaksikan oleh rakyat dan sanak keluarganya. Rakyat pun semakin takut dan semakin sulit dikerahkan. Akhirnya Jepang mengumpulkan rakyat secara paksa. Kalau truk masih kurang muatannya Jepang menaikkan siapa saja yang dijumpainya di jalan maupun di pasar. Tidak peduli siapa mereka dan dari mana dan hendak ke mana, tidak diurus. Orang yang dijumpai sedang memikul dinaikkan bersama pikulannya, dan kelak kalau kembali dari pekerjaan tidak diperhitungkan ganti rugi. Sehingga pada masa itu sangat populer di kalangan rakyat dengan nama *Motor Gauk* (artinya oto garuk). Penderitaan rakyat tidak sampai di situ saja. Di tempat bekerja mereka bekerja keras. Makanan dan kesehatan kurang diperhatikan oleh Jepang. Bagi yang lamban dan malas dipukul. Itulah antara lain yang menyebabkan banyak *romusya* yang meninggal dunia. Malaria, pekerjaan berat, pukulan dan bentakan adalah beberapa di antara sebab-sebab yang menjatuhkan semangat mereka ditambah kesedihan yang tak tertahankan di bawah siksaan Jepang. Tempat-tempat proyek Jepang itu antara lain di Lombok : Bangko-Bangko, Lembar, Gili Trawangan, Tanjung Ringgit, Labuhan Lombok, Rambang, Lendang Marang, dan lain-lain. Di pulau Sumbawa : Lunyuk, Mapin, Palibelo, Nanga Tumpu, Pelabuhan Bima, dan lain-lain. Di antaranya sangat terkenal dengan malariannya. Walaupun Jepang tidak pernah mengumumkan jumlah *romusya* yang tewas, tetapi adalah menjadi rahasia umum bahwa pergi menjadi *romusya* adalah penderitaan.

Maka akibatnya di beberapa desa, pertanian terbengkalai, produksi pertanian menurun. Pemerataan hasil bumi terhalang oleh karena takut bepergian; selain takut ditangkap untuk dijadikan *romusya* juga karena takut dipukul Jepang di jalan. Orang yang salah memberi hormat, atau yang terlambat hormat dipukul.⁶⁰⁾

Bagi rakyat yang selamat kembali ke desa dari tugas ro-

60). Wawancara dengan Lalu Mala, tanggal 30 - 9 - 1978.

Wawancara dengan Haji Adam, tanggal 26 - 9 - 1978.

Wawancara dengan Marniq Fadelah, tanggal. 15 - 10 - 1978.

musya, mereka mendapat pengalaman bagaimana seharusnya bekerja keras, akalnya terbuka. Begitu juga mereka yang menjadi *Seinendan*, *Heiho*, *Keibodan* memperoleh pengalaman yang banyak dalam perantauan selama bertugas di desa-desa atau daerah di luar desanya.

Pengerahan tenaga rakyat tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi anak-anak sekolah juga dikerahkan melaksanakan *kinkrohosi* di sawah, di jalan, kantor pemerintah dan tempat umum. Selain itu juga mereka diberi latihan jasmani dan latihan kemiliteran. Pelajaran di sekolah terbengkalai tidak sesuai dengan kurikulum. Mereka digembleng agar memiliki semangat Jepang. Setiap pagi mereka menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan lagu-lagu lainnya. Lagu-lagu dalam bahasa Indonesia juga diajarkan dan pada umumnya mars perjuangan yang mengobarkan semangat anti Inggris dan Amerika. Setiap pagi sewaktu hendak memasuki kelas harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang. Pada awal dan akhir pelajaran setiap hari harus terlebih dahulu *Seikerei* (melakukan penghormatan) ke arah istana Kaisar Tenno Haiko di Tokyo. Keharusan *Taiso* tidak terbatas pada sekolah negeri tetapi juga sekolah sekolah swasta. Karena keharusan ini Madrasah Ibtidaiyah Kediri di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Hafidz membubarkan diri dan mengembalikan kepada pondok pesantren sampai kekuasaan Jepang berakhir. Sekolah swasta Cina yang diselenggarakan oleh *Chung Hwa Chung Hwie* juga harus menyelesaikan diri dengan ketentuan di atas

Agar sekolah-sekolah dapat dijadikan tempat pendidikan yang bersifat militeristik dan tempat propaganda sesuai dengan konsepsi Jepang, maka Pemerintah Jepang melatih guru-guru di Mataram, Sumbawa besar, Bima dan Selong. Sebagai pelaksana propaganda harus dapat meyakinkan murid-murid dan rakyat, bahwa kedatangan Jepang bukan untuk menjajah, tetapi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Musuh utama adalah Inggris dan Amerika. Tenno Haika adalah mahadewa keturunan *Amaterasu Omikami*. Kedatangan Jepang adalah untuk membina kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Jepang Indonesia sama-sama atau Jepang adalah saudara tua. Maka untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya seluruh rakyat harus membantu Jepang. Guru-guru juga harus

mengadakan propaganda kepada masyarakat di sekitarnya. Alat propaganda lainnya juga dipergunakan radio dan surat kabar. Ketika itu yang banyak beredar ialah surat kabar *Bali Shinbun* dan *Rinjani Shinbun*. Dalam tahun 1944 dengan jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya Angkatan Perang Jepang dari Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall oleh Angkatan Perang Serikat maka seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam dan kekalahan Jepang telah terbayang. Tentara Serikat telah mulai melancarkan serangan atas kota-kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya, bahkan tentara Sekutu telah mendarat di Balikpapan. Situasi yang kritis itu mendorong Pemerintah Militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan *Saiko Syikikan Kumakici Harada* pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Jumbi Cosakai*).⁶¹ Di Nusa Tenggara dibentuk juga badan persiapan kemerdekaan tingkat daerah (*Syu Kaigin*). Dari Nusa Tenggara Barat di tunjuk anggota-anggotanya: H. Idris M, J'afar, M. Amin Daeng Emo, H. Abdulwahab, Go Sing Cong, R.N. Nuraksa, Mamiq Fadelah Lalu Srinata, Mamiq Muhammad dan Lalu Durahman. Pada sidangnya yang pertama pada bulan Juni 1945 di Singaraja sempat juga dihadiri oleh Ir. Soekarno dalam perjalanan kembali dari menyaksikan penguburan Amat Heiho di Tarakan. Tiap-tiap utusan daerah mendapat kesempatan berbicara langsung dengan beliau untuk menerima petunjuk-petunjuk beliau tentang persiapan kemerdekaan yang datang. Dari beliau tiap-tiap daerah masing-masing memperoleh selempar bendera merah-putih.

Dengan tindakannya itu Jepang mengharapkan akan mendapat bantuan yang besar dari rakyat dan rakyat akan dapat melupakan perbuatan Jepang yang telah lampau. Tetapi dasar Jepang tidak jujur, kentara benar perbedaan antara tindakan dengan ucapannya. Sampai menjelang kekalahannya Jepang masih sempat menangkap 29 (dua puluh sembilan) orang-orang terdiri dari rakyat biasa dan pegawai negeri, Mereka diancam dengan hukuman bunuh karena kesalahan yang belum terbukti. Sebab sejak ditangkap sampai saat akan dilaksanakannya hu-

61). Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Halaman 16, Tahun 1975.

kuman mereka tidak pernah diadili. Kecuali mereka dituduh telah bekerjasama menyembunyikan dua orang *Heiho* asal Jawa, masing-masing bernama Syukur dan Slamet Kedua *Heiho* tersebut melarikan diri sewaktu mereka bertugas di Singgigi (Lombok Barat). Dari sana mereka melarikan diri dan bersembunyi di Kondok (Bloam) desa Jrowaru. Dalam usaha melarikan diri mereka dapat ditangkap, dan Jepang menjumpai baju dinas *heiho* tersebut pada salah seorang penduduk desa Jrowaru yang kebetulan menjadi anggota koperasi *Tangkis Mudarat* (tamu). Bukti itu dijadikan alasan oleh Jepang, bahwa semua anggota koperasi Tamu berkomplot. hendak berontak kepada Jepang. Dan padi-padi yang dikumpulkan koperasi sebagai usahanya, dianggap Jepang sebagai persiapan perbekalan perang. Maka pada bulan Juli 1945 semua anggota koperasi Tamu ditangkap dan akan dibunuh secara bertahap di Surabaya. Tahap pertama dikirim 27 orang ke Surabaya melalui Lembar pada tanggal 16 Agustus 1945. Kedua puluh tujuh mereka itu ialah Lalu Sedek, A. Sinarah, A. Nur, A. Munarah, A. Miwang, A. Kangkung A. Asan, A. Munir, A. Adam, L. Sahak, Abdulmuin, R. Sukero, Ferera L. Mahnep, L. Abdullah, Hamdan, Nursana, H. Hijaz, A. Ceruring, A. Rumilang, Senang, Medak, Mas Asmo, L. Jaya, Wasal, M. Rumintang dan L. Unus.

Di Surabaya mereka ditahan di *Sumatera Street Gubeng*. Tetapi berhubung dengan Proklamasi Kemerdekaan, mereka di bebaskan. dalam perjalanan pulang ke Lombok, A. Sinarah meninggal dunia dan dikuburkan di dekat Rumah Sakit Pasuruhan. Di Jember mereka dibantu dan ditampung oleh Panitia Penolong Korban Perang. Kedatangannya kembali di Lombok sangat melancarkan usaha pembentukan KNI, BKR, dan PMI, karena sewaktu masih di Jawa mereka sudah mendapat petunjuk di Banyuwangi, dari pejuang-pejuang di sana. Dari mereka dan surat kabar yang dibawa mereka pemimpin rakyat di Lombok dapat mengetahui tentang kapitulasi Jepang kepada Sekutu.

Sebelum itu sejak awal September 1945 Jepang telah menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada putera-putera daerah antara lain:

1. Pimpinan Pemerintah Daerah Lombok kepada Raden Nuna Nuraksa.
2. Pimpinan Pemerintahan Lombok Timur kepada Mamiq Fadelah.

3. Pimpinan Pemerintahan Lombok Tengah kepada Lalu Srinata.
4. Pimpinan Pemerintahan Lombok Barat kepada I Gusti Ngurah.

Dan pimpinan pemerintahan di pulau Sumbawa diserahkan kepada tiap-tiap Sultan. Tindakan Jepang di atas bagi pemimpin dan rakyat Nusa Tenggara Barat merupakan suatu anugerah dan kebaikan yang luar biasa. Sebab sebelum para tawanan kembali dan datangnya utusan dari Jawa dan Bali ke Nusa Tenggara Barat berita tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu masih samar-samar.⁶²).

G. SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP JEPANG

Letak Nusa Tenggara Barat yang berhadapan dengan Australia dan pula di persimpangan jalan dari Utara ke Selatan serta posisinya terhadap Samudera Indonesia yang terbuka, telah mendorong Jepang untuk menempatkan daerah ini di bawah kekuasaan Angkatan Laut, Armada Selatan kedua. Nusa Tenggara Barat di jadikan daerah sumber perbekalan untuk mensuplai kebutuhan tentaranya yang bertugas di Nusa Tenggara Timur bahkan Sulawesi dan Maluku. Sebagai daerah perbekalan daerah Bima menjadi penting dengan pusat perbekalan di Tente. Di situ disimpan bahan makanan beras, jagung dan lain-lain. Sedangkan Lombok dan Sumbawa di samping daerah sumber juga sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan makanan. Dan untuk mengamankannya di Nusa Tenggara Barat ditempatkan tentara yang cukup banyak yang memerlukan berbagai fasilitas dan kebutuhan lahir dan bathin.

Inilah yang menjadi pangkal keretakan hubungan antara rakyat dengan Jepang. Karena kebutuhan yang mendesak Jepang telah berani meminta gadis-gadis melalui Sultan Bima dengan alasan untuk dipekerjakan sebagai pelayan warung kopi (semacam bar) khusus bagi tentara Jepang. Permintaan itu sangat menyinggung perasaan Sultan dan rakyatnya yang terkenal sangat fanatik agama. Atas inisiatif beberapa pemuda di desa Tente, Kecamatan Woha dibentuk suatu komite dengan nama *Komite*

62). Lalu Wacana B.A. dkk, Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, halaman 77 - 78, Tahun 1975.

Rakyat Islam Tente yang bertugas untuk menyampaikan protes kepada Jepang melalui Sultan Bima. Komite yang terdiri dari M. Tayep Abdullah, Yahya Teta Ani, Abubakar Abbas, Dolah Ahmad dan Ahmad Daeng Ame segera menghadap Sultan dan mohon izin untuk menemui Mayor Jenderal Tanaka di Raba.

Sultan pun berunding dengan Jeneli A.D. Talu mengenai permintaan Jepang. Jeneli A.D. Talu bersama para *Gelarang* (Kepala Desa), dan Kepala Kampung di wilayahnya menolak permintaan Jepang. Mereka bertekad akan menyerahkan keris terhunus kepada Jepang yang melambangkan tekad bahwa jiwa dan raganya akan mereka pertaruhkan, demi kehormatan wanita di daerah Bima. Beberapa tokoh yang lain, seperti M. Saleh Bakri, Dr. Sajirin, Yahya dan Muhammad A. Wahab, langsung menemui pemimpin Jepang dan menasehati mereka supaya tidak menyinggung perasaan rakyat yang fanatik pada adat dan agama Islam demi keselamatan mereka sendiri. Dengan penolakan dari Sultan Bima yang dibarengi dengan berbagai protes dari masyarakat, Jepang pun mengurungkan niatnya untuk mengumpulkan gadis-gadis.

Karena di Bima tidak berhasil, maka Jepang mendatangkan wanita dari pulau lain. Maka untuk mencegah pengumpulan gadis yang dilakukan secara paksa oleh Jepang rakyat Bima mengawinkan anaknya secara serentak. Perkawinan semacam itu terkenal di kalangan rakyat dengan nama kawin berontak.

Tindakan Jepang yang sewenang-wenang seperti meminta gadis, mengumpulkan padi dan hewan, senjata-senjata tradisional dan pengerahan tenaga *romusya* menimbulkan kesadaran rakyat bahwa Jepang telah menipu mereka. Berita-berita kekejaman-nya yang menyeramkan bulu roma telah menimbulkan kebencian rakyat kepada Jepang. Rakyat berusaha sedapat mungkin menghindari perjumpaan dengan Jepang. Selain takut di tangkap untuk menjadi *romusya* mereka juga takut untuk dipukul kalau salah memberi hormat. Kehidupan rakyat semakin sulit. Mereka kurang leluasa mencari nafkah. Semakin ditakuti, tindakan Jepang semakin merajalela. Rakyat diperlakukan semena-mena. Apalagi melakukan kesalahan atau kejahatan. Kalau tertangkap kaki tangannya diikat lalu digantung dan dipukul sampai pingsan dan berkali-kali. Apabila telah dipukul mereka dilepaskan tanpa diurus lagi.

Jepang sama sekali tidak menghiraukan adat-istiadat rakyat. Mereka bebas berkeliaran keluar masuk kampung menangkap ayam, itik dan mengambil telur, kadang-kadang hanya dengan memakai cawat. Kehendaknya mesti berlaku dan harus cepat dilaksanakan. Bagi yang terlambat dan tidak dapat melakukan perintah dengan tepat dipukul dan dikata-katai. Kesemuanya sangat menyinggung perasaan rakyat yang menertibkan dendam yang tidak kesudahan. Tetapi karena tidak terorganisasi reaksi rakyat hanya timbul dalam bentuk pemukulan dan pembunuhan emosional. Seperti peristiwa terbunuhnya Taniguci, pemimpin perkebunan kapas di Sesait (Lombok barat) pada tahun 1943. Karena kekejamannya sejak bertugas di Sesait ia sangat di benci oleh rakyat. Tidak sedikit rakyat yang dipukulnya karena hanya kesalahan yang kecil saja. Suatu hari salah seorang rakyat yang bernama Amaq Baris dipukul karena terlambat memasang bajak yang menyebabkan Amaq Baris gelap mata dan membunuh Taniguci. Kepala Distrik Bayan, Raden Sigit yang membela Taniguci dilawan pula oleh rakyat di bawah pimpinan Amaq Jaliah, Penghulu Sesait dan Amaq Asiam, *mangkubumi* (pemimpin adat Sesait). Karena peristiwa terbunuhnya Taniguci itu semua orang laki-laki dewasa Sesait ditangkap dan diangkut ke Mataram. Setelah mendapatkan siksaan mereka dilepaskan lagi, kecuali yang sembilan belas orang. Mereka itu adalah : Amaq Rumpat, Amaq Baris, Amaq Indah, Amaq Gantut, Amaq Era, Amaq Kina, Amaq Cangkir, Amaq aliap, Amaq Aiq (Kepala Kampung), Amaq Arif, Amaq Jaliah (Penghulu), Amaq Asiam (Mangkubumi) Amaq Bendang, Kecu, Amaq Kenip, Amaq Akon, Sahdin, Sedin, Sebab dan Kelepok. Sampai selesai Perang Dunia II mereka itu lenyap tanpa berita. ⁶³).

Peristiwa lain terbunuhnya seorang tentara Jepang di Ra-ba-Bima oleh adik Sultan Bima pada tahun 1944. Tentara itu dibunuh ketika hendak memasuki rumah seorang wanita di malam hari. Untuk menyelamatkan diri adik Sultan berlindung di istana. Mengetahui hal itu tentara Jepang mengepung istana, tetapi setelah Sultan menjelaskan duduk persoalannya kepada pemimpin tentara Jepang, mereka mengundurkan diri. Pada awal tahun 1945 di Kedistrikan Gerung terjadi dua kali pemu-

63). Wawancara dengan Haji Adam, tanggal 23 - 9 - 1978.

Wawancara dengan Haji Idris M. Ja'far, tanggal 5 - 7 - 1978.

kulan atas tentara Jepang yang dilakukan oleh rakyat. Setelah melapor kepada Kepala Distrik, mereka menghilang diri. Dan meskipun tentara Jepang mencarinya tetapi tidak ada rakyat yang membantunya dengan sungguh-sungguh. Kepala Distrik pun pura-pura tidak mengenal orang-orang yang telah melakukan pemu-kulan. Sedikit pun rakyat tidak simpati lagi kepada orang Je-pang. Rakyat menganggap semua orang Jepang rakus dan biadab yang tidak mengenal perikemanusiaan.

Bab V

P E N U T U P

Dengan berakhirnya Bab IV dari naskah ini maka selesailah tinjauan kami sekitar Zaman Kebangkitan Nasional di Nusa Tenggara Barat dari akhir abad ke-19 tahun 1945. Maka dalam Bab penutup ini kami ingin memberi kesimpulan dari seluruh materi naskah yang ada, sesuai dengan sistematika yang menjadi kerangka penulisan naskah ini.

Pertama :

Geografis Nusa Tenggara Barat terletak antara $115^{\circ}46'$ BT, $119^{\circ}10'$ BT dan $8^{\circ}5'$ LS, $9^{\circ}5'$ LS, terdiri dari dua buah pulau besar Lombok dan Sumbawa dan kurang lebih 99 buah pulau kecil di sekitarnya. Luas seluruhnya 17.700 km^2 (*Bijblad* No. 14377). Jumlah penduduk: 2.202.333 jiwa (menurut Sensus 1971).

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang No. 64 tahun 1958. Dan yuridis formal, Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan 6 Daerah Swatantra Tingkat II terbentuk mulai tanggal 14 Agustus 1958 ialah pada tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 46 tahun 1958 dan Undang-Undang No. 69 tahun 1958.

Dalam perkembangan sejarah Nusantara, pulau Lombok dan Sumbawa sejak abad ke-14 merupakan daerah yang penting dalam lalu lintas perdagangan, terutama sebagai tempat persinggahan kapal untuk mengisi air minum. Karena kesuburan tanahnya, kedua pulau di atas telah menjadi daerah rebutan antara kerajaan-kerajaan sekitarnya sehingga terpecah-pecah dalam 5 buah kerajaan kecil yang hidup di dalam percekocokan dan menimbulkan keresahan sosial di kalangan rakyat banyak. Mayoritas penduduknya terdiri dari 4 kelompok etnis masing-masing suku bangsa Bima, suku bangsa Sumbawa, suku bangsa Sasak dan suku bangsa Bali. Selebihnya termasuk suku bangsa Melayu, Jawa, Bugis, Makasar, Selayar, Bajau dan lain-lain.

Kedua :

Pada akhir abad ke-19 Nusa Tenggara Barat terpecah ke dalam 5 buah kerajaan kecil, masing-masing kerajaan Mataram di pulau Lombok, kerajaan Sumbawa kerajaan Dompu, kerajaan Sanggar dan kerajaan Bima. Kelima kerajaan itu adalah sahabat dari Gubernemen dan mengakui daerah mereka adalah bagian dari

Hindia Belanda. Kerajaan Mataram diperintah oleh raja Anak Agung Gde Ngurah Karangasem yang didampingi oleh kedua putranya Anak Agung Ketut Karangasem dan Anak Agung Made Karangasem. Di kerajaan Sumbawa memerintah Sultan Muhammad Jalaluddin III yang didampingi oleh ketiga orang menterinya: Datu Ranga, Datu Kalibelah dan Datu Dipati. Yang memerintah di Dompu ialah Sultan Muhammad Sarajuddin (1882-1934) yang didampingi oleh Majelis Adat dan Majelis Agama. Majelis Adat beranggotakan 4 orang yaitu Raja Bicara, Rato Renda, Rato Rasanae dan Rato Parenta. Majelis Adat berwenang mengangkat dan memberhentikan raja. Sedangkan di Bima yang memerintah ialah Sultan didampingi oleh Majelis Tureli, Majelis Hadat dan Majelis Agama.

Adanya majelis-majelis di atas menunjukkan bahwa raja tidak memerintah secara otoriter dan absolut, tetapi melalui musyawarah dan mufakat.

Pada masa akhir abad ke-19 sebelum Belanda memerintah secara langsung di Nusa Tenggara Barat tidak terdapat pendidikan formal. Pewarisan ilmu dari generasi ke generasi dilakukan secara tradisional. Kebanyakan dilaksanakan secara individual. Pendidikan formal pertama kali diusahakan oleh Pemerintah Belanda dengan mendirikan *Volkschool* di Mataram pada tahun 1896 kemudian dikembangkannya menjadi *Tweede Inlandsche Eilandschool* (SD, 4 tahun).

Kesenian sejak akhir abad ke-19 hampir seluruhnya sifatnya hanya meneruskan kesenian lama untuk memenuhi kebutuhan dalam upacara adat dan agama/kepercayaan. Adat istiadat mulai berubah mulai dari kota dan desa-desa yang kuat agamanya. Beberapa peninggalan seperti taman-taman menjadi terbengkalai. Bangunan-bangunan di kota-kota mulai dipengaruhi oleh arsitektur Eropa. Mengenai agama, yang terbesar penganutnya ialah Islam, kemudian menyusul Hindu, Budha dan animis. Penganut Islam pada umumnya fanatik, tetapi sebagian besar penganut agama Islam di Lombok kurang memberatkan syariat agama, Islam. Urusan pelaksanaan *mu'amalah* diserahkan sepenuhnya kepada kiyai/penghulu mereka. Kemudian golongan ini lebih terkenal dengan nama *Islam Waktu Tehu*. Pengikutnya tidak boleh mengerjakan ibadah dan mempelajari agama. Jumlah penganut Hindu hanya sedikit saja, yaitu orang-orang Bali yang datang ke Lombok pada abad ke-17. Mereka menetap di Mataram, Cakranegara,

Pagutan, Pagesangan dan sedikit di Marmada dan Tanjung. Penganut Budha dan animis (fetis) berasal dari rakyat yang tidak mau masuk agama Islam dan melarikan diri ke gunung-gunung dan daerah terisolasi Pengantap, Ganjar, Tendaun, dan Tawun. Penganut animis (fetis) berdiam di daerah Donggo (Bima).

Mata pencaharian penduduk yang utama ialah bercocok tanam, dan sebagai mata pencaharian tambahan ialah beternak dan meramu. Mengolah tanah kebanyakan masih sederhana. Hanya sebagian kecil yang sudah mempergunakan bajak. Hasilnya yang terbanyak padi, jagung dan cukup untuk konsumsi sendiri. Padi di Lombok kebanyakan diekspor ke luar daerah melalui pelabuhan Ampenan. Dari pedalaman diangkut ke pelabuhan dengan kuda atau dipikul. Jalan raya dan jembatan belum ada. Alat-alat pengangkutan yang memakai roda belum dikenal penduduk. Komunikasi juga sangat sulit. Pemberitaan yang penting dilakukan dengan mengirim utusan atau surat. Dalam jarak dekat dilakukan dengan kentongan atau beduk.

Ketiga :

Kemenangan orang-orang liberal di Negeri Belanda pada tahun 1848 telah menimbulkan politik haluan baru yang berdasarkan liberalisme. Tokoh-tokoh politik seperti van Deden, van Kol, van Deventer dan Brooschooft telah meminta kepada Pemerintah Belanda agar memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Demikianlah ketika Belanda baru berkuasa di Nusa Tenggara Barat ia mulai dengan politik etikanya dengan memperhatikan kesejahteraan, kecerdasan dan ekonomi rakyat. Jaringan jalan, irigasi dan pendidikan mulai diselenggarakan secara bertahap. Tetapi karena Belanda membangun dengan pengerahan daya dan pengumpulan dana dari rakyat, telah menimbulkan pemberontakan akibat keresahan sosial yang disebabkan karena rakyat merasakan pajak terlalu berat dan kerja rodi di jalan-jalan menyinggung kehormatannya.

Maka sementara pemerintah membangun, ia harus memadamkan pemberontakan yang timbul silih berganti mulai dari Perang Gandor, Perang Undru, pemberontakan Ngali, pemberontakan Kala, Pemberontakan Dena, Pemberontakan Pringgabaya I, Pemberontakan Pringgabaya II dan lain-lain yang kesemuanya merupakan perwujudan dari keresahan sosial dari seseorang maupun suatu kelompok masyarakat yang merasa kehormatannya tersinggung dengan penerapan nilai-nilai baru yang kadang-kadang sangat

bertentangan dengan nilai-nilai tradisional.

Tetapi melalui kekerasan dan tangan-tangan penguasa pribumi pemungutan pajak dan pengerahan tenaga rodi dijalankan dengan paksa. Rakyat yang tidak mau membayar pajak hartanya disita dan yang tidak mau kerja rodi dihukum. Rakyat yang dikenakan kerja rodi hanya kaula saja. Bangsawan, pejabat, pemuka agama dan para haji dibebaskan dari kerja rodi. Untuk melindungi rakyat dari rentenir Pemerintah Belanda mendirikan rumah Gadai di Ampenan, Kantor Bank di Mataram, Sumbawa besar dan Bima. Bank-bank yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat antara lain: *Bandelsbank*, *Balisch Volkserediet bank* dan *Volkscredietbank*. Rumah sakit dibangun di tiap ibukota onderafdeeling dan pasar dibangun hampir di tiap desa. Sekolah yang didirikan ialah *Volk-school* di tiap ibukota kedisarikan dan *Tweede Inlandsche Eilandschool* di tiap ibukota onderafdeeling dan kota-kota kedisarikan tertentu seperti Ampenan, Gerung, Masbagik, Pringgabaya, Cakra-negara, Kopang, dan Sakra. HIS didirikan di Bima tahun 1919 dan di Mataram tahun 1923.

Pada tahun 1924 Undang-Undang Desentralisasi mulai dilaksanakan. Kedisarikan di Swapraja Sumbawa dihapus dan kedemungan dijadikan *gemeente* yang dikepalai oleh seorang demung. Kedemungan diberi wewenang mengatur dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gemeente*. Demung melaksanakan pemerintahan didampingi oleh *Gemeente Raad*. Pengawasan keuangan dipegang oleh kontrolur.

Di Lombok dan Bima wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja diberikan kepada Asisten Residen. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata maupun pidana hanyalah pengadilan yang sudah ditetapkan oleh Belanda. Untuk ini dibuat *Raad Sasak* bagi suku bangsa Sasak, *Raad Kerta* bagi suku bangsa Bali, *Landraad* bagi suku bangsa Jawa, Melayu dan sebagainya. Di tiap kedisarikan juga diadakan pengadilan tingkat kedisarikan. Di Swapraja Sumbawa diadakan tiga jenis pengadilan yaitu: *Raad van Landshoofden* (Rapat Adat Besar), *Zelfbestuurgerecht*, dan *Gemeentegerecht*.

Dibangunnya jalan-jalan, irigasi, pasar, bank, rumah sakit dan sekolah di Nusa Tenggara Barat telah menambah kemakmuran, kesejahteraan dan kecerdasan rakyat. Beberapa orang telah dapat mengenyam pendidikan sistem Barat dan akibat lancarnya transportasi banyak rakyat yang pergi menunaikan ibadah haji

ke Mekah. Di antaranya ada yang setelah bermukim beberapa tahun lamanya di Mekah, sepulangnya mereka membuka pesantren di desanya dan mengadakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran ummat Islam dari kekeliruannya selama ini. Akibatnya ummat Islam di Lombok terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama yang kuat berpegang kepada Hadist dan Al Qur'an yang lebih populer dengan nama *Islam Waktu Lima* dan golongan yang tetap berpegang kepada adat yang lebih populer dengan sebutan *Islam Waktu Telu*. Pada awalnya Islam Waktu Telu ini tergabung ke dalam Gerakan Dewi Anjani atau kemudian lebih terkenal dengan Gerakan Sapuq Puteq. Dan karena Belanda bersikap Islam-phobi, maka ia lebih mendekatkan diri kepada golongan adat daripada kepada para ulama. Hal lain juga karena para ulama selalu menentang segala unsur kebudayaan yang datang dari Barat sehingga tidak mungkin ada kerjasama antara penjajah Belanda dengan para ulama. Sikap dan tindakan para ulama tersebut telah memberikan dasar bagi pertumbuhan organisasi dan paham yang menentang penjajahan Belanda.

Tetapi karena Belanda selalu mengadakan pengawasan yang ketat sekali, maka meskipun Sarekat Islam telah masuk di Lombok sejak tahun 1916, di Sumbawa sejak tahun 1918 tetapi golongan Islam yang simpati kepadanya tidak dapat mewujudkan diri dalam suatu organisasi. Mereka meskipun banyak tetapi merupakan anggota tersiar. Karena itu usahanya pun terbatas untuk tujuan sosial seperti waktu kematian dan sebagainya. Tokoh-tokoh SI yang terkenal pada waktu itu di NTB antara lain: Raden Gde Hukum, Raden Gde Nuraksa, Mamiq Wiranata dan Syekh Muhammad.

Dua tahun kemudian sejak SI masuk di Lombok, pada tahun 1918 masuk pula Muhammadiyah atau lebih terkenal dengan sebutan Kaum Muda. Tetapi karena ajaran yang moderat, Muhammadiyah tidak mendapat sambutan sahabat Sarekat Islam. Simpatisannya terbatas di kalangan orang Arab, orang Melayu dan pegawai serta desa tertentu seperti Tanjung (Lombok Timur) dan Pohgading (Lombok Timur).

Kalau Sarekat Islam dan Muhammadiyah, dua organisasi modern tidak dapat berkembang karena tekanan pemerintah, maka apalagi gerakan wanita. Sebelum tahun 1930 wanita terutama anak-anak gadis masih hidup di dalam pingitan dan sepenuhnya di bawah kekuasaan kaum pria. Pendidikan yang baru

dikenyamnya hanya tamatan kelas 3 SD. Kecuali hanya satu dua orang saja yang sudah menamatkan HIS. Pada umumnya wanita di Nusa Tenggara Barat sampai tahun 1928 masih hidup di dalam kawin paksa.

Mengenai agama, sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Barat pemeluk agama Islam yang fanatik. Tetapi banyak di antaranya tidak memberatkan syareat agama. Terutama penganut agama Islam di Lombok pada waktu itu kebanyakan yang tidak melaksanakan ibadah. Urusan ibadahnya diserahkan kepada kiyai dan penghulu mereka. Kemudian karena kegigihan para ulama seperti Tuan Guru Haji Umar, Tuan Guru Haji Badarul Islam, Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Haji Saleh Hambali, Tuan Guru Haji Abdulkarim dan lain-lain. Jumlah mereka semakin merosot, mereka yang tidak bersedia bertaubat membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Gerakan Dewi Anjani yang kemudian lebih terkenal dengan nama Sapuq Puteq atau Islam Waktu Telu. Tujuan gerakan ini ialah untuk mempertahankan status agama yang dianutnya sama dengan Islam Waktu Lima. Dan karena Belanda mengkhawatirkan kemajuan Islam yang semakin pesat, ia membenarkan adanya golongan Islam Waktu Telu untuk bebas melakukan ibadah sesuai dengan tradisi yang mereka warisi. Karena ini kekuatan Islam menjadi terpecah dan lemah. Tokoh-tokoh Sapuq Puteq yang terkenal ialah dr. R. Sujono dan Mamiq Fadelah. Dan karena penganut Islam Waktu Telu sangat jujur, berhati tulus maka mereka sering menjadi korban penipuan yang mendakwakan dirinya sebagai penjelmaan raja-raja dari zaman kerajaan Pejanggik dan kerajaan Selaparang. Orang-orang itu seperti Guru Dana, Guru Mustiaji, Ios, Inaq Beh, Papuq Gde dan lain-lain. Di pulau Sumbawa perkembangan agama Islam lebih baik berkat usaha para Sultan yang dibantu oleh Majelis Syara'.

Selain penganut agama Islam, ialah penganut Hindu, Budha dan fetis. Penganut Hindu adalah keturunan orang-orang Bali yang datang ke Lombok pada akhir abad ke-17, sedangkan penganut Budha dan fetis adalah penduduk asli Nusa Tenggara Barat yang tidak mau masuk Islam dan melarikan diri ke gunung-gunung dan daerah yang terisolasi. Akibat keadaan agama seperti di atas maka tampak bahwa penyerapan unsur-unsur kebudayaan di Lombok lebih banyak melalui agama pra-Islam sedangkan di daerah Sumbawa yang pemerintahannya ditetapkan berdasarkan hukum syara' dan hukum adat maka penyerapan unsur-unsur kebudayaan lebih

banyak melalui agama Islam. Zending pun diperkenankan untuk mengadakan penyiaran agama Nasrani tetapi tidak berhasil, kecuali sedikit saja di kalangan orang Donggo yang beragama fetis di Mbawa.

Sebelum pulau Lombok dan pulau Sumbawa dikuasai langsung oleh Pemerintah Belanda, di sana tidak ada lembaga pendidikan yang formal yang diatur secara modern. Sekolah yang pertama didirikan ialah *Volkschool* di Mataram pada tahun 1896. Kemudian dikembangkan menjadi *Tweede Inlandsche Eilandschool* (SD 4 tahun) yang didirikan di kota-kota penting dan ibukota onderafdeeling, seperti Ampenan, Mataram, Gerung, Tanjung (Lombok Barat), Praya, Kopang, Masbagik, Pringgabaya, Selong, Sakra, Sumbawa besar (1914), Dompu dan Bima. Beberapa tahun kemudian *Volkschool* didirikan di tiap ibukota kedis-trikan. Di Swapraja Sumbawa *Volkschool* baru merata di seluruh ibukota kedemungan pada tahun 1917. Murid-murid sulit dicari karena pandangan agama yang menganggap sekolah itu kafir untuk di pulau Sumbawa sedangkan di pulau Lombok selain tidak disukai oleh golongan agama juga kaum adat pada mulanya tidak menyukainya karena dianggapnya sumber perusak adat. Sehingga untuk mencegah anak-anak berhenti bersekolah di Swapraja Sumbawa pemerintah mengangkat mandor sekolah yang bertugas mengurus anak-anak yang absen. Anggapan golongan adat di Lombok memang beralasan sebab pada umumnya penganjur perubahan/pembaharuan adalah mereka yang sudah mengenyam pendidikan di sekolah. Kebanyakan mereka kurang menghargai kebudayaan warisan nenek moyangnya.

Untuk mendapatkan tenaga pegawai yang lebih bermutu dan memberi kesempatan kepada anak-anak orang bangsawan, kaya dan terpendang didirikan pula HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) di Bima pada tahun 1919 dan di Mataram pada tahun 1923. Anak-anak yang akan masuk HIS diseleksi oleh Asisten Residen. Selain jenis-jenis sekolah di atas ada pula sekolah khusus untuk anak-anak wanita *Meisjeschool* yang didirikan di Bima pada tahun 1921. Guru-guru yang diperlukan didatangkan dari Jawa, Bali, Makasar, Ambon dan Kupang. Anak-anak yang tamat *Tweede Inlandsche Eilandsche School* dan HIS yang lulus testing dapat melanjutkan ke *Normaal School* dan Mulo di Makasar atau Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan akan guru bantu pemerintah membuka Kursus Guru Kilat 1 tahun yang kemudian berkembang

menjadi OVO.

Sementara terjadinya pergolakan yang ditimbulkan oleh desa-desa yang kurang senang kepada Belanda, kehidupan kesenian lesu. Baru kira-kira setelah dasawarsa kedua abad ke-20 aktivitas kesenian timbul kembali atau muncul kreasi-kreasi baru akibat pengaruh Kebudayaan Barat dan Timur Tengah. Hal ini terlihat pada bentuk bangunan mesjid maupun rumah tinggal. Seni tari maupun seni suara vokal dan intrumental serta seni pedalangan tumbuh dengan suburnya untuk memenuhi keperluan adat dan hiburan. Bahkan ditambah dengan bentuk baru seperti *rudat* dan orkes. Selebihnya hanya bersifat meneruskan kesenian sebelumnya.

Gerakan pemuda dan kepanduan dalam periode tahun 1900 – 1928 tidak ada. Selain karena kurangnya pengetahuan juga karena tidak ada yang membimbingnya dan kerasnya pengawasan Pemerintah.

Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan minat baca rakyat sangat kurang. Inisiatif untuk mendirikan pers juga tidak ada. Yang berlangganan surat kabar pun sangat sedikit. Yang mampu berlangganan surat kabar hanya terbatas pada guru, pegawai dan kepala desa yang kaya.

Terdorong oleh berbagai kebutuhan hidup menyadarkan beberapa orang yang sudah berpendidikan untuk mencukupi kebutuhan hidup secara praktis dan ekonomis. Untuk mengatasi kesulitan hidup secara gotong royong pada tahun 1920 beberapa orang Bima di bawah pimpinan Abdulhamid Raja Bicara membentuk Koperasi Konsumsi yang diberi nama Satya Usaha. Di Pancor (Lombok Timur) SI di bawah pimpinan Raden Gde Nuraksa mendirikan Koperasi Produksi dan Konsumsi. Tetapi keduanya di bubarkan karena dianggap pemerintah menghalangi dan menyaingi usaha orang asing (Cina).

Akibatnya masuknya pengaruh Partai Nasional Indonesia di Bima timbul PETANI (Persatuan Tani Indonesia) yang didirikan oleh Hasan Muhammad. Karena kegiatannya sangat politis, organisasi tidak lama umurnya karena dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. Selain Petani ada pula organisasi buruh lokal yang didirikan oleh buruh KPM. Meskipun tujuannya semata-mata bersifat sosial tetapi juga tidak diizinkan berkembang sehingga mati tidak lama setelah dibentuk.

Keempat :

Sejak selesainya pemberontakan-pemberontakan rakyat karena kehormatannya tersinggung atau segan membayar pajak dan bekerja rodi, maka keadaan menjadi aman. Hubungan pemerintah dengan rakyat melalui penguasa bumiputra kepala desa dan kepala distrik sangat baik. Semua rakyat dan pimpinannya sibuk dengan urusan masing-masing. Yang mengetahui tentang politik hanya orang-orang terpelajar dan pegawai negeri tetapi karena takut kepada pemerintah mereka tidak berani bergerak. Maksimal mereka hanya membicarakan politik dengan sahabatnya saja. Lebih dari itu tidak berani angkat bicara karena mereka selalu diawasi pemerintah.

Pendidikan rendah dan kurangnya komunikasi dengan dunia luar menyebabkan rakyat di Nusa Tenggara Barat tidak peka menerima kejadian yang ada di luar lingkungannya sendiri. Pemberontakan Baham di Lunyuk tahun 1923 dan pembangkangan rakyat yang tergabung di dalam Gerakan Dewi Anjani dua peristiwa yang tidak mempunyai hubungan satu sama lain, maka apalagi kejadian yang terjadi jauh dari lingkungannya seperti Jawa sama sekali tidak ada hubungannya. Pemuda-pemuda yang bersekolah di luar daerah juga sekembalinya tidak berinisiatif untuk mengorganisasi rakyat yang sudah berpendidikan terutama pemudanya. Terutama sekali sebabnya hampir sebagian besar tamatan *Vervolgschool* dapat ditampung di berbagai kantor dan perusahaan. SI pun tidak dapat berbuat apa-apa karena anggotanya yang tersiar dan ketatnya pengawasan pemerintah. Hanya yang agak menggembirakan kesadaran orang tua menyekolahkan anak mereka semakin bertambah, tetapi kesempatan bersekolah semakin terbatas. Kemajuan agama juga semakin meningkat.

Kelima :

Dalam periode antara tahun 1928 — 1942, berdasarkan pengalaman di Jawa, Pemerintah Belanda di Nusa Tenggara Barat bertindak sangat hati-hati. Penganut partai selalu dibendunginya dengan mempergunakan Sultan dan Kepala Distrik untuk menekan setiap usaha pergerakan bagi kemerdekaan Indonesia. Maka meskipun Rajikin dan Kasan dua orang aktivis PSII di Lombok berusaha sekuat tenaganya namun PSII tidak pernah terwujud dalam bentuk organisasi. Lebih-lebih di pulau Sumbawa yang kekuasaan adat dan agama di tangan Sultan maka rakyat tidak mempunyai pandangan dan pendapat lain selain yang telah digaris-

kan oleh Sultan dan Kepala Distrik. Demikian pula ketika Sukardjo Wirjopranoto dari Parindra datang ke pulau Sumbawa (Bima) pada tahun 1938 juga tidak berhasil membentuk Parindra karena dihalangi pemerintah. Dalam perjalanan kembali di Labuhan Haji (Lombok) juga tidak diberi turun dan tak seorang pun diperkenankan naik ke kapal menemuinya. Karena itu usahanya gagal kecuali simpatisan yang merupakan anggota tersiar dan terbentuknya *Kepanduan Suryawirawan*. Perpecahan antara golongan Islam Waktu Telu dengan Islam Waktu Lima semakin dipertajam, sekolah-sekolah diselenggarakan oleh Pemerintah. Sedang di Pulau Sumbawa diselenggarakan bersama-sama dengan Swapraja. Selain yang diselenggarakan pemerintah ada juga yang diselenggarakan oleh orang Arab, orang Cina, organisasi NU, Muhammadiyah, Ikatan Qaum Muslimin (IQAM) Bima dan para ulama Islam yang terkenal dengan pesantrennya.

Sementara itu seluruh daerah dilanda oleh akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Rakyat menderita kekurangan uang dan ada pula yang kekurangan makanan. Perusahaan banyak yang menutup usahanya. Keuangan Pemerintah menjadi kacau karena pajak kurang masuk. Kantor-kantor Bank melakukan pengurangan pegawai. Gaji-gaji di pulau Sumbawa dibayar 50%, selebihnya dibayar dengan kayu, beras dan sebagainya.

Mengenai kehidupan organisasi/partai di Nusa Tenggara Barat berkembang sangat lambat dan dibawa oleh petugas-petugas pemerintah yang datang dari luar daerah terutama dari pulau Jawa. Pengembangannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak pernah berbentuk organisasi. Organisasi/partai yang mempunyai simpatisan di Nusa Tenggara Barat, seperti Sarekat Islam, Parindra, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Di samping organisasi yang datang dari luar ada pula yang tumbuh di daerah yang bersifat lokal dengan usaha khusus untuk memajukan agama Islam seperti *Nahdhatul Wathan* (HW) tahun 1935, *Persatuan Islam Bima* (PIB) tahun 1938 dan *Ikatan Qaum Muslimin* (IQAM) Bima. Karena para simpatisan partai di atas tidak terikat di dalam organisasi yang nyata dan teratur, maka aktivitasnya hampir tidak nampak pula. Setiap ada hal-hal yang kebetulan diketahuinya dari surat kabar, mereka hanya mengadakan pembicaraan/diskusi antara teman dekat dalam kesempatan bertamu dan lain-lain.

Menjelang keruntuhan pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Belanda semakin reaksioner. Perasaan sukuisme semakin di-

kobar-kobarkan. Kekuatan masyarakat dipecah dalam beberapa golongan. Terutama yang menjadi sasarannya ialah kekuatan umat Islam. Namun demikian karena kesadaran rakyat semakin tinggi, organisasi sosial semakin berani dan memperlihatkan usahanya di bidang pendidikan yang banyak membantu terwujudnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat.

Kehidupan kebudayaan, khususnya kesenian berkembang terus melanjutkan kesenian masa sebelumnya. Seni kriya pun berkembang dengan baik pula, oleh karena harganya terbeli oleh rakyat dan mempunyai nilai magis tradisional yang tidak dapat disaingi oleh barang produksi luar negeri. Seperti kebanyakan alat rumah-tangga dan perhiasan yang dari emas dan perak dan logam lainnya.

Sementara itu agama pun menunjukkan kemajuan yang pesat. Banyak sekali Tuan Guru yang tersohor yang menyediakan hidupnya untuk kemuliaan agama. Di Bima terkenal Sultan Muhammad Salahuddin sebagai pelopor bagi kemajuan agama Islam dengan usahanya mendirikan madrasah hampir di tiap desa. Kemajuan yang dicapai masyarakat dipandang dengan perasaan dingin dan curiga oleh Pemerintah Belanda.

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang sudah mulai renggang ditambah pula oleh situasi politik dan ekonomi yang makin gawat. Pada tahun 1938/1939 beberapa daerah mengalami bencana kelaparan karena kurang curah hujan. Sedangkan Belanda sangat memerlukan uang untuk membiayai pemerintahannya. Maka untuk menghadapi masalah politik dan ekonomi ini Pemerintah Belanda bersifat keras dan kaku. Lebih-lebih setelah negeri Belanda diduduki oleh Jerman sikapnya makin keras dan angkuh, untuk menutup kepanikannya dan kebutuhan ekonominya. Pengawasan atas tokoh-tokoh pergerakan dan masuknya surat kabar diperkeras. Pemungutan pajak diintensipkan. Dan untuk menarik simpati tokoh-tokoh pemimpin Sasak di Lombok, pemerintah Belanda berjanji akan membangun dua kerajaan di Lombok dengan sungai Babak sebagai batas antara keduanya. bahkan maksud yang tersembunyi di samping untuk memperoleh simpati dari orang-orang Sasak juga untuk mengalihkan perhatian rakyat dari apa yang sedang terjadi di Eropa dan Jawa yang sedang giat menuntut Indonesia berparlemen.

Keenam :

Tetapi kegelisahan mereka mulai tampak sejak pembicaraan

antara misi Perdagangan Jepang dengan pihak Hindia Belanda mengenai bahan bakar untuk kapal-kapal mereka. Sehingga menurut perhitungan mereka perang dengan Jepang tidak mungkin dielakkan. Dan ketika Jepang sudah mulai menyerbu ke Indonesia Belanda mulai mendekati para Sultan dan Kepala Distrik dan menasehati mereka supaya kalau Jepang menang hendaknya mereka pandai-pandai menempatkan diri. Agar semua perbekalan dan prasarana tidak jatuh ke tangan Jepang di Lombok, Belanda membentuk *Barisan Perusak* yang dipimpin oleh Ir. Putuhena. Barisan Perusak di Lombok Timur dipimpin oleh Mamiq Fadelah. Tetapi karena nasehat dari beberapa orang pemimpin rakyat perusakan belum sempat dilaksanakan secara luas kecuali hanya beberapa buah kendaraan dan jembatan pelabuhan Ampenan. Bahan makanan dibagi-bagikan kepada rakyat dan bahan bakar disimpan oleh Mamiq Fadelah yang kemudian diserahkan kepada Jepang setelah mendarat di Lombok. Penyerahan Belanda kepada Jepang menambah kepanikan pemerintah Belanda di Lombok dan Sumbawa. Di pulau Sumbawa kas mulai kosong, gaji pegawai tidak terbayar dan atas inisiatif para pemuda di Bima yang didukung oleh Knil dan polisi merencanakan akan merebut kekuasaan pada tanggal 55 April 1942 tetapi sebelum terjadi Sistem Residen afdeeling Sumbawa bersama beberapa orang pejabat lainnya melarikan diri ke Sumbawa besar. Dan dengan bantuan polisi dari Lombok mereka kembali hendak menyerang Bima. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu di Soriteu dengan pasukan rakyat Bima yang menyusulnya. Dalam pertempuran itu jatuh korban di pihak rakyat Bima Idris Hakim dan di pihak Belanda beberapa orang tewas. Sisa pasukannya kembali ke Sumbawa besar dan sebagian besar ditangkap dan ditawan atas perintah Sultan Sumbawa. Orang-orang Belanda semuanya melarikan diri ke Lombok.

Berita kemenangan Jepang di segala sektor pertempuran disambut dengan perasaan lega oleh rakyat. Rakyat mengharapkan dengan kedatangan Jepang di Indonesia harga barang akan menjadi murah. Kemerdekaan Indonesia akan terwujud. Semboyan Jepang: Asia untuk Asia. Jepang Indonesia sama-sama atau Jepang adalah saudara tua sangat memikat hati rakyat dan pemimpin di Nusa Tenggara Barat.

Pendaratan Jepang di Lombok pada tanggal 8 Mei 1942 dan 12 Mei 1942, di pulau Sumbawa pada tanggal 17 Juli 1942

disambut dengan gembira oleh pemimpin dan rakyat Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat termasuk wilayah *Kaigun Syu Sunda Minseibu* (Propinsi Sunda Kecil) di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua). Semua pejabat Belanda ditawan dan dibawa ke luar daerah. Pejabat pribumi diizinkan bekerja terus. Pulau Lombok dan pulau Sumbawa masing-masing merupakan *Ken*. Daerah bawahannya meliputi *bun ken*, *gun* dan *son*. Semua jabatan penting dipegang oleh Jepang. Pemerintah Jepang juga mengharuskan semua kantor dan sekolah mengadakan upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*. Tarikh dan jam diganti dengan Tarikh Sumera dan jam Jepang. Alat pembayaran yang sah ialah mata uang kertas yang dikeluarkan pada zaman Jepang. Di Lombok di samping uang kertas juga dipakai uang kepeng. Untuk mendapat bantuan bagi kemenangan Perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk Badan *Propaganda* yang dipimpin oleh putra-putra daerah.

Dengan kedok kedatangan Jepang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan, Jepang memanfaatkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat bagi kemenangan Perang Asia Timur Raya. Mereka mendekati para ulama dan mengarahkan tenaga pemuda untuk *seinendan*, *keibodan*, *heiho* dan tidak sedikit yang dilatih menjadi *Kaigun*, *Rikugun* dan Peta. *Pemuda-pemuda dilatih dalam* *Seinen Kurenso* yang diadakan di Mataram, Selong, Sumbawa besar dan Bima. Mereka mendapat latihan fisik dan mental. Jepang memberantas rasa rendah diri, jiwa budak dan menanamkan disiplin yang keras. Kepala-kepala sekolah juga dilatih di pusat-pusat latihan untuk mendapatkan latihan semangat dan ketrampilan *taiso*. Untuk keperluan perbekalan Perang, Jepang mengumpulkan besi tua, senjata tajam, padi dan ternak. Jepang juga menjalankan monopoli atas jarak yute dan kapas. Karena itu sebagian besar rakyat kekurangan makanan dan pakaian. Kesehatan rakyat sangat buruk. Hampir seluruh rakyat menderita penyakit kulit.

Keresahan rakyat bertambah pula karena Jepang meminta gadis untuk dipekerjakan di warung atau bar yang tersedia khusus bagi tentara Jepang. Permintaan mereka ditolak, tetapi karena itu para orang tua di Bima mengawinkan anak gadisnya dengan pemuda yang disukainya secara masal.

Melalui Sultan dan Kepala Distrik Jepang mengarahkan tenaga romusya untuk membangun tempat pertahanan dan

proyek-proyek yute, jarak dan kapas. Dan ketika pengerahan tenaga yang diperlukan tidak lancar, maka secara paksa Jepang menangkap dan mengangkut setiap orang laki-laki di mana saja mereka jumpai tanpa sepengetahuan penguasa setempat.

Akibatnya di beberapa desa produksi pertanian menurun, Pemerataan hasil bumi terhalang karena rakyat takut keluar rumah, terutama tidak berani berjalan melalui jalan raya. Pengerahan tenaga rakyat tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi anak-anak sekolah pun dikerahkan untuk melaksanakan *kinrohosi* di sawah, jalan, kantor-kantor pemerintah dan tempat umum. Murid-murid diberi latihan jasmani dan latihan militer. Guru-guru juga diberi latihan untuk menjadi propagandis yang dapat meyakinkan murid-murid dan rakyat bahwa kedatangan Jepang bukan untuk menjajah tetapi untuk memerdekakan Indonesia. Maka supaya Jepang dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya rakyat harus membantu Jepang. Alat propaganda lainnya juga dipergunakan radio dan surat kabar. Dua buah surat kabar yang beredar pada waktu itu ialah *Bali Shinbun* dan *Rinjani Shinbun*.

Sementara itu dengan jatuhnya Saipan pada tahun 1944 dan terpukul mundurnya di berbagai sektor pertempuran, maka seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam dan kekelahan Jepang mulai terbayang. Kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya telah mulai diserang tentara Sekutu. Situasi semakin gawat dengan didudukinya kota Balikpapan. Maka dalam situasi yang demikian itu Pemerintah Militer Jepang mengumumkan pembentukan Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritu Junbi Cosakai*), pada tanggal 1 Maret 1945.

Di Nusa Tenggara dibentuk juga Badan Persiapan Kemerdekaan Tingkat Daerah (*Syu Kaigin*). Dari Nusa Tenggara Barat ditunjuk anggota-anggotanya: H. Idris M. Ja'far, M. Amin Daeng emo, H. Abdul Wahab, Go Sing Cong, Raden Nuna Nuraksa, Mamiq Fadelah, Lalu Srinata Mamiq Muhammad dan Lalu Durahman. Pada sidangnya bulan Juni 1945 di Singaraja sempat dihadiri oleh Ir. Soekarno dalam perjalanan kembali dari menyaksikan penguburan Amat Heiho di Tarakan. Dalam kesempatan itu Ir. Sukarno memberi petunjuk dan kepada wakil dari tiap-tiap daerah dan diberikan masing-masing selemba bendera merah putih.

Dengan tindakan itu Jepang mengharapkan akan mendapat bantuan yang lebih besar dari rakyat Indonesia. Tetapi dasar Jepang tidak jujur, sampai menjelang kekalahannya pada bulan

Juli 1945 Jepang masih sempat menangkap 29 orang terdiri dari rakyat biasa dan pegawai negeri di Lombok karena tuduhan mengadakan makar untuk berontak kepada Jepang. Mereka diancam dengan hukuman mati dengan kesalahan yang belum terbukti. Tetapi karena Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mereka dilepas kembali pada tanggal 31 Agustus 1945. Pada awal September 1945 Pemerintah Jepang di Nusa Tenggara Barat menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada putra-putra daerah.

Demikianlah karena faktor komunikasi, perbedaan adat istiadat sikap dan tingkah laku serta agama ditambah pula oleh situasi perang akhirnya terjadi kesalahpahaman antara rakyat kepada Jepang berubah menjadi sikap benci dan antipati. Usaha Jepang dalam mengumpulkan padi dan ternak, monopolinya atas kapas, yute dan jarak serta keberaniannya meminta gadis-gadis untuk keperluan tentara, dianggap perbuatan yang tamak dan rakus serta bertentangan dengan agama yang sangat menyinggung kehormatan dan perasaan rakyat. Keganasannya serta kebiasaannya memukul tanpa memilih bulu dan tempat telah menimbulkan reaksi dari rakyat dengan pembunuhan seperti peristiwa Sesait (Lombok Barat). Pada tahun 1943 pembunuhan Jepang di Bima dan Mamben (Lombok Timur) pada tahun 1944 serta pemukulan yang dilakukan rakyat kepada Jepang di Kedistrikan Gerung (Lombok Barat). Karena itu juga semua rakyat tidak lagi memberi bantuan secara ikhlas bahkan diusahakan sedapat mungkin bagaimana supaya Jepang gagal dalam semua usahanya.

DAFTAR KATA DAN NAMA

A.

Al Irsyad,
Al Ittihad,
Anggota Tersiar,
Anshor,

B.

Badan Hukum Adat,
Badan Hukum Syara',
Badan Propaganda,
Balatentara Nippon,
baluna,
Batara Guru,
Baret Juring,
baruna,
bederep,
bekal beraya,
bengkok,
besiru,
Budha,
Bumi Luma,
Bumi Nae,
Bumi Nggeko,
Bun Ken Kanrikang,
Bunga Antin,
busyido,

C.

Chung Hwa Chung Hwi,

D.

Darul Ulum,
Datu Dipati,
Datu Kalibelah,
Datu Ranga,
Demung,
Dewa Masmawa,

Dokuritsu Junbi Cosakai,

E.

Enti Desa,

F.

Fetisch,

G.

GAPI,
gelarang,
gemeente
gemeenntegerecht,
Gerakan Dewi Anjani,
gerubuk,
golongan Sapuq Puteq,

H.

Heiho,
Hinomaru,
Hisbul Wathan,

I.

Ind. Stbl. No. 123,
IQAM,

J.

Janji Nopember
Jejawan,
Jeneli,

M.

mabangar,
Majelis Agama,
Majelis Hadat,
Majelis Tureli,
Mamanca lima,
Masmawa,
Menteri Telu,
motor gauk,

mpisi,

N.

Nahdhatul Wathan,
Nanko,
Nenti Mone,
nggaro,
Ngampo,
ngasak,
ngayah,
NU,
nu'a,
nyaka,
nyolasin,

O.

Onder afdeeling
Orkes keroncong,

P.

pemangan,
Parindra,
PIB,
Pecatu,
Pelukatan,
pemangku,
Pemberontakan Dena,
Pemberontakan Donggo,
Pemberontakan Gandor,
Pemberontakan Ngali,
Pemberontakan Pringgabaya I,
Pemberontakan Pringgabaya II,
Pemberontakan Sesela,
Pemberontakan Undru,
Pomekel,
penejuk,
Pengantong,
perbekel,
Peristiwa Labuhan Haji,
Peristiwa Lendang Marang,

Peristiwa Sesait,
peristiwa Soriutu,
peristiwa Wanasaba,
perkanggo,
PETA,
PETANI,
PNI,
Politik etika,
punggawa,
PUTERA,

R.

Raad Kerta,
Raad Sasak,
Raad van Landshoofden,
Raja Bicara,
Rato Parenta,
Rato Rasanae,
Rato Renda,
romusha,
rura,

S.

Sanfro,
Sangrya,
Sanre,
Sapuq Puteq,
Sarikat Dagang,
Sarikat Islam,
Schakel School,
Sainankorenso,
Seikire,
Staatblad (STB) 1906 No. 431,
Sumpah Pemuda,
Syu Kaigin,

T.

Taiso,
Taman Siswa,
Tana Samawa,

Tau Marisi,
Tanah pecatu,
Tarikh Sumera,
Timuq Juring,
Trimurti,

W.

Waktu Lima,
Waktu Telu,
Wayang Bali,
Wayang Sasak,

Z.

Zaman Malaise,
Zeefbestuurder,
Zelfbestuurdergerecht.

DAFTAR NAMA INFORMAN

135

No.	N a m a	Tahun	Alamat	Pekerjaan	Aktivitas
1.	Abdul Syamsulhakim, Haji.	74	Sengkol, Mantang Lombok Tengah	T a n i	Guru bantu SD, Pegawai kantor Asisten Residen lom- bok, Kepala Distrik Bayan, Asisten Kepala Distrik Se- dahan (Pemungut Pajak) berhenti dengan hormat ta- hun 1937.
2.	Adam, Haji.	79	Gerung, Lombok Barat.	Pensiunan Pegawai Negeri	Menteri hewan, Sedahan Distrik, Kepala Distrik, Kepala Pemerintah Setem- pat Lombok Barat, Pen- siun sejak 1953.
3.	A.D. Talu		B i m a.	Pensiunan Pegawai Negeri.	Pegawai Negeri, Anggota DPRD Kabupaten Bima, pensiunan.
4.	Akmaluddin, Haji	62	Labuapi, Lombok Barat.	T a n i	Tani, pernah jadi Riku- gun.
5.	Ambawa, Lalu	49	Penujak, Lombok Tengah.	Guru SD	Seinendan, Guru SD sam- pai sekarang.

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	N a m a	Tahun	Alamat	Pekerjaan	Aktivitas
6.	Ardhan, Lalu	51	Tuban, Lombok	T a n i	Kaibodan, Kembali menjadi petani th 1946.
7.	Fadelah, Mamiq.	78	Dasan Lekong Lombok Timur	T a n i	Kepala desa, Wakil Ketua Raad Sasak, Pemimpin Go- longan Sapuq Puteq, Ko- mandan Barisan Pengerusak, Ketua Badan Propaganda Je- pang Pejabat Bun Ken Kan- rikang, Anggota Legium Ve- teran Lombok Timur, Ak- tivis PNI.
8.	Gde, I Wayan.	65	Pajang, Lombok Barat	Pedagang	Pengusaha, Anggota DPRD Prop NTB, Swasta Aktivis PNI.
9.	Hasyim, Haji.	81	Praya, Lombok Tengah	Pensiunan Pegawai Negeri.	Kepala Distrik, Kepala Pe- merintah Setempat Lombok Tengah, Pensiun.
10.	Idris M. Ja'far, Haji.	75	Kampung Me- layu, Bima.	Pensiunan Pegawai	Pegawai Kontrolir Bima, Je- neli (Kepala Distrik) KPS

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	N a m a	Tahun	Alamat	Pekerjaan	Aktivitas
					Lombok Timur Pensiun, Aktivis Muhammadiyah.
11.	Imbang, Lalu.	73	Sumbawa besar	Pensiunan Kepala SD.	Guru SD, Kepala SD, pernah menjadi anggota Anshor.
12.	M a h m u d.	60	Kelayu, Lombok Timur.	Pensiunan Kepala SD.	Guru SD, Kepala SD.
13.	Mala, Lalu.	72	Sumbawa besar	Pensiunan Pegawai Negeri,	Panitera pada Pengadilan Swapraja Sumbawa besar, Demung, Pegawai Kabupaten Sumbawa besar, Pensiun.
14.	Manja Abdulmajid Lalu	70	Sumbawa besar	Pensiunan Pegawai Negeri.	Pegawai Swapraja Sumbawa besar, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Pegawai Kabupaten Sumbawa, Pensiun.
15.	Muh. Hijaz, Haji.	65	Mataram, Lom-	Pensiunan	Pegawai Kantor Distrik, Pe-

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	N a m a	Tahun	Alamat	Pekerjaan	Aktivitas
			bok Barat	Pegawai Negeri	gawai Kantor Penerangan Kabupaten Lombok Barat Pensiun, Anggota Legium Veteran Lombok Barat.
16.	Muh. Saleh Ntobu.	70	B i m a	Pensiun Pegawai Negeri.	Pegawai Negeri, Pensiun. Pernah menjadi pejuang.
17.	Muh. Thayep Abdullah, Haji.	65	B i m a	Pensiunan Pegawai Negeri.	Guru, Pegawai Penmas, Pensiun, Anggota Lagium Betteran Kabupaten Bima.
18.	Muh. Zain Mustami, Lalu.	72	Sumbawa besar	Pensiunan Pegawai Negeri.	Pegawai Kantor Kontrolir, Panitera pada Pengadilan Swapraja Sumbawa, Anggota Dewan Pengadilan Swapraja Bima, Kepala rumah Tangga istana Sumbawa Pegawai Kabupaten Sumbawa, Pensiun.

DAFTAR NAMA INFORMAN

139

No.	N a m a	Tahun	Alamat	Pekerjaan	Aktivitas
19.	Mustamin.	60	S a k r a.	Pensiunan Pegawai Negeri	Guru, Kepala Sekolah Penilik Sekolah, Kakandep PK Kecamatan Pensiun.
20.	Mustirin.	60	Tanjung Teros.	T a n i.	Tani, Komandan BKR Tani.
21.	Rasyidi.	59	Mataram.		Guru Schakel School Kepala Desa, Berhenti dengan hormat. Pernah sebagai pejuang.
22.	Rifaah, Mamiq.	77	Tanjung, Lombok Timur.	Pensiunan Pegawai Negeri	Pegawai Volkscredietbank, Asisten Kepala Distrik, kepala Distrik, Kepala Daerah Lombok, Pensiun, Anggota Legium Veteran Lombok.
23.	Samingan, Mas.	72	Selong	Pensiunan Pegawai Negeri	Guru, Kepala Sekolah, Guru HIS, Pimpinan CVO, Penilik SD, Pensiun. Sekarang: Wakil Ketua Persatuan Wredatama RI Lombok Timur.

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	N a m a	Tahun	Alamat	Pekerjaan	Aktivitas
24.	Subali, R	69	Mataram.	Swasta.	Pegawai Kantor Pos Telepon dan Telegraf di Ampenan, Swasta.
25.	Sumantri, R.	62	Mataram.	Swasta.	D a g a n g.
26.	Tahir, Lalu	55	Puyung, Lombok Tengah	Kepala Desa Puyung.	Kepala Desa, Tani, Kepala Desa sampai sekarang.
27.	U m a r.	52	Mataram.	Swasta.	Guru, Pegawai Negeri, Swasta.
28.	Usman; H, Lalu.	62	Sukarara, Lombok Tengah	T a n i	Juru tulis Desa, Tani Pernah menjadi Seinen dan, Tani.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahim S.H. dkk, *Monografi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat*, 1975.
2. Ahmad Amin, *Sejarah Bima*, Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 1971.
3. *Babad Gandor*.
4. *Bunga Rampai* (Rangkuman Babad tentang Lombok).
5. *Cakepan adat Waktu Telu*.
6. *Hasil Sementara Sensus Penduduk 1971*, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram Kantor Sensus dan Statistik, 1971.
7. Panitia Hari Pahlawan ke XXXIII Daerah Tingkat II Bima, *Selayang Pandang Sejarah Perjuangan Rakyat Bima (1908 - 1950)*, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bima, 1978.
8. *Propinsi Sunda Kecil*, Kementerian Penerangan, 1953.
9. Roo de La Faille, P, *de Studie Over Lomboksch Adatrecht Adatsrechbundels*.
10. Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen P dan K, 1975.
11. Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesi VI*, Departemen P dan K, 1975.
12. Sucipto Wiryosuparto, Drs, *Dari Lima Zaman Penjajahan Menuju Zaman Kemerdekaan*, Indira, 1956.
13. Sunarno, A, J. dan Mesir, Lalu, *Meninjau Penjuru Pulau Lombok* (manuskrip).
14. Utrecht, Dr. E.S.H., *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Penerbit Sumur Bandung, 1962.
15. Wacana, Lalu, dkk, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat*, 1975.
16. Wacana, Lalu, dkk, *Sejarah Nusa Tenggara Barat*, 1977.

Perpustakaan
Jenderal

9